



PERUBAHAN
(RKPD)
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024



*PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024**



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213];
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALUNG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALUNG TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tabalung Tahun 2024 merupakan penyesuaian atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalung Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan tentang perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 Tahun keempat.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024;

- b. Penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024;
- c. Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024; dan
- d. Penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

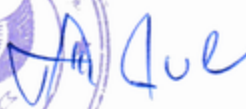
- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang dalam Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - Bab I. Pendahuluan;
 - Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - Bab VI. Penutup.
- (3) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMILDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

M. FIRDAUS HERNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 16

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		v
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3	Hubungan Antar Dokumen.....	I-13
1.4	Maksud dan Tujuan	I-15
1.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-16
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1	Keterkaitan RKPD dan APBD	II-1
2.2	Ketercapaian Kinerja dan Permasalahan Pembangunan sampai Triwulan II.....	II-50
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1	Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Perubahan Ekonomi Makro Daerah	III-1
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-9
3.1.3	Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Makro Daerah	III-10
3.2	Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1	Perubahan Kebijakan Pendapatan Tahun 2024	III-11
3.2.2	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024	III-16
3.2.3	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-20
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.....	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-5
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024.....	IV-5
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	IV-24

4.2.3	Prioritas dan Sasaran RKPD Perubahan Kabupaten Tabalong	IV-29
4.2.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024.....	IV-35
BAB V	RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (sampai Triwulan II)	II-4
Tabel 2.2	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Berdasarkan Urusan (sampai Triwulan II).....	II-9
Tabel 2.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2023	II-15
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023	II-22
Tabel 2.5	Sub Kegiatan pada RKPD yang Tidak Digunakan di APBD	II-48
Tabel 2.6	Sub Kegiatan yang Ditambahkan di APBD	II-49
Tabel 2.7	Rekapitulasi hasil Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah	II-52
Tabel 3.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Regional Kalimantan Triwulan I 2024	III-4
Tabel 3.2	Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2024	III-8
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024	III-12
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024	III-13
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024	III-16
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024	III-19
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	III-20
Tabel 3.8	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024	III-21
Tabel 3.9	Ringkasan Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024	III-22

Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong	IV-4
Tabel 4.2	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024	IV-7
Tabel 4.3	Hubungan Daya Saing Daerah dengan Perkembangan Ekonomi Inklusif	IV-25
Tabel 4.4	Perubahan Indikator Sasaran pada RKPD Perubahan Tahun 2024	IV-35
Tabel 4.5	Sinergitas Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-38
Tabel 4.6	Perbandingan Target dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024	IV-39
Tabel 5.1	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Berdasarkan Urusan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Tabalong	V-8

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain	I-14
Gambar 3.1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan Nasional (% , y-on-y)	III-2
Gambar 3.2	Pertumbuhan PDB Kalimantan Selatan Triwulanan (% , y-on-y)	III-3
Gambar 3.3	Pertumbuhan PDB Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023	III-5
Gambar 3.4	Inflasi Nasional Bulanan (% , y-on-y)	III-6
Gambar 3.5	Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (% , y-on-y)	III-7

BAB I

PENDAHULUAN

*PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan amanat peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005–2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025, dan dokumen RPJMD

Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024. Sedangkan perencanaan tahun 2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, yang berpedoman pada peraturan perundangan di atas dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi, program prioritas pembangunan, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD.
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan tahapan ke-V pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Disamping itu RKPD 2024 ini dapat menjadi tongkat estafet kesinambungan pembangunan jangka menengah untuk periode berikutnya. RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam perencanaan operasional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, RKPD yang disusun diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai upaya percepatan pencapaian visi dan misi daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6794);
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
42. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
57. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
60. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17).
61. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6)

63. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15).
64. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
67. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
68. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 18);
69. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);
70. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);

71. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-PD dan RTRW Kabupaten. Secara substansi keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang menjadi rujukan bagi dokumen Perencanaan jangka menengah atau tahunan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJMD Kabupaten Tabalong.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan tahapan ke-V dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Tabalong masa bakti tahun 2019-2024.

2. RKPD dan RTRW Kabupaten Tabalong

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabalong sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tabalong.

3. RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 1 (satu) tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tabalong.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pemerintah daerah yang sinergis antara perencanaan pemerintah nasional, provinsi serta kabupaten/kota yang berbatasan.

Oleh karenanya, substansi Perubahan RKPD Tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut :



Gambar 1.1

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lain

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan mensinkronkan dengan sasaran/program RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024.
2. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2024.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab 1 Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen Perubahan RKPD.
2. **Bab 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024**, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 hingga triwulan II.
3. **Bab 3 Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah**, yang memuat penjelasan tentang perubahan arah kebijakan ekonomi daerah, perubahan arah kebijakan keuangan daerah dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan daerah tahun 2024.
4. **Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta perubahan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
5. **Bab 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, memuat tentang rencana kerja dan pendanaan daerah.
6. **Bab 6 Penutup**.

BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2024

*PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota. Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten.

Penilaian hasil pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota (hasil evaluasi merupakan dasar dalam perubahan RKPD dan renja SKPD serta menjadi pedoman dalam perubahan APBD).

2.1. Keterkaitan RKPD dan APBD

Memperhatikan tahapan yang dilalui sampai triwulan II pelaksanaan APBD, terdapat perbedaan antara RKPD dengan APBD. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penetapan RKPD Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Penetapan APBD Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran

2024 serta Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Pada tahapan ini perbedaan antara RKPD dengan APBD disebabkan oleh :

- a. Hasil kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengalami pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan di mutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka :

- mengakomodir kegiatan mendesak yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga dan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID).
- usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama dalam sub kegiatan,

pergeseran anggaran antar sub rincian yang sama dan rincian uraian belanja kegiatan.

4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka :

- penyesuaian penambahan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa DAK ke Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- penggunaan dana Insentif Fiskal.

Adapun perbedaan antara RKPD dengan APBD meliputi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, jumlah pagu indikatif dan anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan. Perbedaan jumlah program, kegiatan dan anggaran antara RKPD dengan APBD dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.1.
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana
pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (sampai Triwulan II)

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW II)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	383.500.411.400	5	15	63	440.520.908.697	5	15	63	493.954.369.697	5	15	61
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	148.711.873.574	5	20	71	231.716.609.248	5	20	71	258.776.030.248	5	21	76
3	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	114.819.518.577	2	4	4	139.088.216.777	2	4	4	140.008.716.777	2	4	4
4	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	249.485.544.024	9	19	45	469.811.781.720	9	19	45	533.672.590.043	9	19	45
5	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	134.600.024.413	8	13	24	180.082.365.975	8	13	24	194.949.064.309	8	13	24
6	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	18.491.053.960	3	9	23	19.144.836.725	3	9	23	19.156.836.725	3	9	23
7	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.400.865.049	2	10	24	10.516.481.321	2	10	24	10.519.481.321	2	10	24
8	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	38.927.687.380	6	14	32	45.965.230.033	6	14	32	45.997.230.033	6	14	32

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW II)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	11.258.720.422	5	15	26	16.968.231.662	5	15	26	17.003.731.662	5	15	26
10	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.448.494.231	10	27	41	10.757.180.488	10	27	41	17.035.103.488	10	27	41
11	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	59.274.941.486	13	22	36	60.934.464.199	13	22	35	63.515.464.199	13	23	36
12	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60.189.005.659	10	15	24	65.983.885.127	10	15	25	66.270.385.423	10	16	25
13	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.705.921.818	5	16	36	14.930.573.868	5	16	33	14.946.573.868	5	16	33
14	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.443.424.779	5	9	27	21.488.122.221	5	9	27	21.535.122.221	5	9	27
15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	15.563.482.024	2	16	30	16.957.772.233	2	16	25	16.975.772.233	2	16	25
16	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.594.766.831	5	12	30	21.650.252.719	5	12	29	21.768.252.719	5	12	30
17	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	24.444.525.259	14	23	37	42.680.863.660	14	23	37	48.202.512.415	14	23	37

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW II)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
18	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.164.872.501	6	13	25	11.105.785.035	6	13	24	11.763.680.035	6	13	24
19	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.046.593.838	6	17	41	22.663.974.730	6	17	40	22.711.974.730	6	17	40
20	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.205.594.530	4	15	47	10.924.981.390	4	15	47	10.926.981.390	4	15	48
21	3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	25.811.466.806	5	17	29	45.710.064.306	5	17	28	48.452.434.306	5	17	32
22	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	75.638.381.263	3	20	53	82.777.171.783	3	19	52	83.058.171.783	3	19	53
23	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	58.698.610.822	2	16	41	81.392.547.853	2	16	41	81.492.417.853	2	16	41
24	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.336.643.301	4	18	61	19.154.011.503	4	18	61	19.224.611.503	4	18	61
25	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	322.996.106.042	3	12	47	341.321.854.357	3	12	47	348.703.386.763	3	12	47
26	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.987.282.500	2	8	29	17.235.832.658	2	8	28	17.314.832.658	2	8	28

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW II)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.989.792.539	3	12	33	15.087.638.532	3	12	33	15.172.638.532	3	12	33
28	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	14.379.044.240	3	9	24	15.043.449.696	3	9	24	15.098.449.696	3	9	24
29	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG	13.168.285.132	6	14	30	13.638.373.672	6	14	30	13.640.373.672	6	14	30
30	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK	15.887.483.001	6	16	42	16.115.216.786	6	16	42	16.121.216.786	6	16	42
31	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA	3.980.715.226	6	12	24	4.494.497.000	6	12	24	4.629.915.000	6	12	24
32	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS	3.166.577.054	6	13	30	3.642.416.269	6	13	30	3.647.416.269	6	13	30
33	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS	3.723.045.944	6	13	29	4.032.792.800	6	13	29	4.036.792.800	6	13	29
34	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA	5.237.586.107	6	13	25	5.867.332.318	6	13	25	5.869.332.318	6	13	25
35	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN	3.487.452.183	6	11	27	3.818.532.000	6	11	27	3.822.532.000	6	11	27
36	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO	3.372.478.742	6	13	36	3.599.182.000	6	13	36	3.617.182.000	6	13	36
37	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA	3.751.046.639	6	13	28	3.924.674.043	6	13	28	3.925.674.043	6	13	28

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW II)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI	2.931.599.151	6	13	29	3.321.451.281	6	13	29	3.323.951.281	6	13	29
39	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU	2.957.930.767	6	12	25	3.272.053.000	6	12	25	3.274.053.000	6	12	25
40	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA	3.030.311.000	6	13	28	3.272.053.000	6	13	28	3.480.399.115	6	13	28
41	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	68.444.915.607	6	12	26	51.146.346.577	6	12	26	49.693.745.692	6	12	26
Total		2.045.228.865.821	228	584	1.382	2.591.966.355.377	228	583	1.368	2.773.809.001.491	228	607	1.379

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2024 (SIPD-RI)

Tabel 2.2.
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana
pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Berdasarkan Urusan (sampai Triwulan II)

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	379.994.489.447	3	12	60	437.015.804.744	3	12	60	490.449.265.744	3	12	57
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	263.531.382.151	5	20	71	370.804.826.025	5	20	71	398.784.747.025	5	21	78
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	249.485.544.024	9	19	45	469.811.781.720	9	19	45	533.672.590.043	9	19	45
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	112.876.415.413	5	10	21	152.093.920.975	5	10	21	166.960.619.309	5	10	21
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.891.919.009	4	13	38	29.661.318.046	4	13	38	29.676.318.046	4	13	38
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	38.927.687.380	6	14	32	45.965.230.033	6	14	32	45.997.230.033	6	14	32
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.258.720.422	5	15	26	16.968.231.662	5	15	26	17.003.731.662	5	15	26

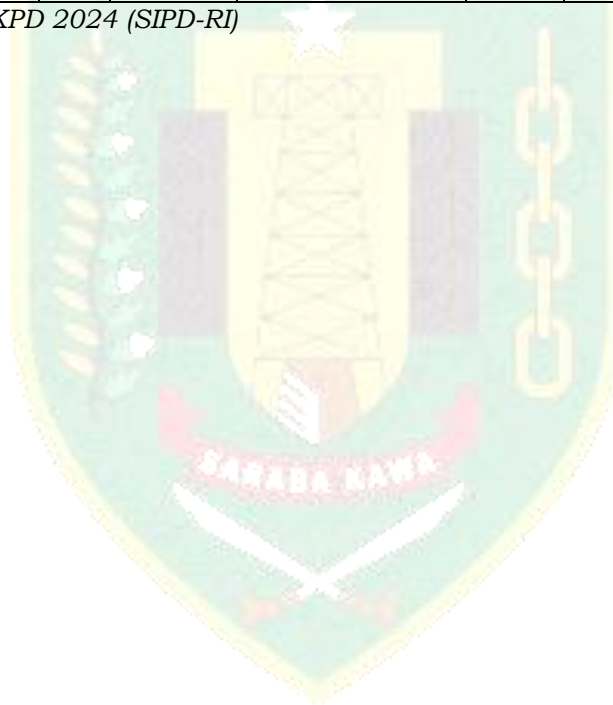
No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.515.180.831	7	19	29	8.823.867.088	7	19	29	9.430.367.088	7	20	32
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	30.921.999.498	5	12	20	32.432.269.048	6	13	20	32.558.269.048	6	13	20
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	21.723.609.000	3	3	3	27.988.445.000	3	3	3	27.988.445.000	3	3	3
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	60.189.005.659	10	15	24	65.983.885.127	10	16	25	66.270.385.423	10	16	25
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.705.921.818	5	16	36	14.930.573.868	5	16	33	14.946.573.868	5	16	33
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.443.424.779	5	9	27	21.488.122.221	5	9	27	21.535.122.221	5	9	27
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.933.313.400	3	8	12	1.933.313.400	3	8	12	7.604.736.400	3	8	28
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.563.482.024	2	16	30	16.957.772.233	2	16	25	16.975.772.233	2	16	30
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.867.744.811	3	10	23	20.841.993.870	3	10	22	20.959.993.870	3	10	23

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.807.198.090	6	10	17	16.560.160.770	6	10	17	16.685.160.770	6	10	17
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11.164.872.501	6	13	25	11.105.785.035	6	12	24	11.763.680.035	6	13	25
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.944.100.554	4	15	36	20.445.431.726	4	15	35	20.493.431.726	4	15	36
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	482.499.020	1	1	4	612.498.420	1	1	4	612.498.420	1	1	4
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	244.523.000	1	1	3	195.760.429	1	1	3	195.760.429	1	1	3
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.505.921.953	2	3	3	3.505.103.953	2	3	3	3.505.103.953	2	3	3
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.069.231.990	2	9	38	9.815.098.373	2	9	38	9.817.098.373	2	9	38
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.136.362.540	2	6	9	1.109.883.017	2	6	9	1.109.883.017	2	6	9
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.788.764.207	4	5	5	8.665.334.289	4	5	5	8.665.334.289	4	5	5
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.102.493.284	2	2	5	2.218.543.004	2	2	5	2.218.543.004	2	2	5

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	46.375.644.587	6	18	37	65.546.925.168	6	18	35	70.744.295.168	6	18	40
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.962.327.169	5	10	15	24.444.085.390	5	10	15	29.840.734.145	5	10	15
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.675.000.000	3	3	5	1.676.617.500	3	3	5	1.676.617.500	3	3	5
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	75.638.381.263	3	20	53	82.777.171.783	3	19	52	83.058.171.783	3	19	53
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	58.698.610.822	2	16	41	81.392.547.853	2	16	41	81.492.417.853	2	16	41
32	5.01 PERENCANAAN	15.201.303.465	3	15	52	15.968.671.667	3	15	52	16.039.271.667	3	15	52
33	5.02 KEUANGAN	338.983.388.542	4	13	63	358.557.687.015	4	13	62	366.018.219.421	4	12	71
34	5.03 KEPEGAWAIAN	10.638.791.013	2	9	30	11.501.117.006	2	9	30	11.586.117.006	2	9	30
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.351.001.526	1	3	3	3.586.521.526	1	3	3	3.586.521.526	1	3	3
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.135.339.836	1	3	9	3.185.339.836	1	3	9	3.185.339.836	1	3	9
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	14.379.044.240	3	9	24	15.043.449.696	3	9	24	15.098.449.696	3	9	25

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	7.01 KECAMATAN	64.694.510.946	6	16	57	69.204.920.284	6	16	54	69.388.838.284	6	16	56
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	68.444.915.607	6	12	26	51.146.346.577	6	12	26	46.213.346.577	6	12	26
Jumlah		2.045.228.865.821	155	423	1.057	2.591.966.355.377	156	423	1.040	2.773.809.001.491	156	425	1.089

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2024 (SIPD-RI)



Berdasarkan perbandingan antara target dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama, ada beberapa indikator yang tingkat capaiannya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti capaian rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 9,14 dari yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 6,96 dan RKPD sebesar 9,69. Pada indikator persentase penduduk miskin, program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong masih belum optimal untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 5,60 dan pada RKPD 2023 sebesar 5,4-5,6 dan hanya mampu menurunkan sebesar 0,10 dari capaian tahun sebelumnya.

Pada sektor pertanian dan perdagangan kontribusinya terhadap PDRB, upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan peran kedua sektor tersebut juga masih belum bisa dilakukan secara optimal. Tingkat capaian kedua sektor tersebut pada tahun 2023 masih jauh dari target yang dicanangkan pada RPJMD dan RKPD. Akan tetapi, hal ini bisa juga dimungkinkan karena adanya peningkatan peran secara signifikan sektor lain yang mengakibatkan penurunan peran kedua sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Tabalong.

Dari sektor Pemerintahan, capaian SAKIP Kabupaten Tabalong belum memenuhi target yang dicanangkan pada RPJMD dan RKPD yakni sebesar 70-80 point (BB), dimana pada tahun 2023 Kabupaten Tabalong mendapatkan nilai 67,48 (B). Dari sektor Kemandirian Daerah, capaian tahun 2023 masih jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD dan RKPD. Akan tetapi bukan berarti tidak adanya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai unsur pendukung tingkat kemandirian daerah, akan tetapi terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dipengaruhi dari aturan terbaru tentang dana bagi hasil dari sektor pertambangan. Disamping adanya target kinerja yang belum tercapai, ada beberapa indikator yang sudah mencapai atau bahkan melebihi dari target kinerja

tahun berkenaan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mencapai angka 75,43 capaian ini lebih tinggi sebesar 1,10 point dari target yang dicanangkan pada dokumen perencanaan baik tahunan maupun lima tahunan sebesar 74,33.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, capaian Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mencapai 4,90. Capaian itu lebih tinggi dari target RKPD sebesar 4,00 dan RPJMD berkisar antara 2,2 – 3,0. Selain itu, indikator yang terkait dengan pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan atau bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan seperti Persentase Desa yang dapat diakses dengan mudah dengan capaian 98,35 kemudian Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan capaian 80,59 serta Persentase penduduk berakses air minum dengan capaian 82,41. Hal ini menandakan Pemerintah Kabupaten Tabalong sangat serius dalam pengembangan infrastruktur yang berkualitas. Indeks Desa Membangun Kabupaten Tabalong juga memiliki capaian lebih tinggi dari target yang telah dicanangkan yakni mencapai 0,78 dari yang ditargetkan sebesar 0,69. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tabalong Tahun 2023

No	Indikator	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi
		2023	2023	2023
1	Indeks kerukunan umat beragama			
2	Angka Kriminalitas	10,5	10,5	10,05
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,33	74,33	75,43
4	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,60	70,60	74,63
5	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,96	9,69	9,14

No	Indikator	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi
		2023	2023	2023
6	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,11	14,11	12,91
7	Persentase penduduk miskin (%)	5,60	5,4-5,6	5,77
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,0-4,0	3,0-3,4	3,60
9	Persentase PPKS yang dilayani (%)	100	100	96,3
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,25	76,33	72,54
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,91	88,00	86,47
12	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,2-3,0	4,00	4,90
13	Indeks gini	0,28-0,31	0,288-0,280	0,284
14	Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	11,08	11,08	7,71
16	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (%)	13,89	13,89	7,51
18	Indeks Ketahanan Pangan	84,03	84,03	79,79
19	Persentase UKM Aktif (%)	79	79	79
20	Persentase koperasi aktif (%)	82	82	59
21	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah (%)	96,60	79,3	98,35
22	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	79,5	79,3	80,59
23	Persentase penduduk berakses air minum (%)	67,96	73,45	82,41
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,98	71,98	71,56
26	Indeks desa membangun	0,69	0,69	0,78
28	Indeks Reformasi Birokrasi	80	80	77,53
29	Nilai SAKIP (predikat)	BB	BB	B
30	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP
31	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	85	85	84,47
32	Tingkat Kemandirian Daerah	16,58	16,58	11,13

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2024 dan hasil analisis

Berdasarkan perbandingan antara capaian dengan target pada Indikator Kinerja Daerah, ada beberapa capaian kinerja yang sudah memenuhi dari apa yang diharapkan atau direncanakan didalam dokumen perencanaan. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Tabalong mencapai 4,90 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan angka PDRB Kabupaten Tabalong dari tahun 2022 sebesar 15,74 triliun rupiah menjadi sebesar 16,51 triliun rupiah pada tahun 2023.

Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi pada banyak lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mencapai 117.750 juta rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 263,40 ribu jiwa. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 112,26 juta rupiah dengan jumlah penduduk 259,84 ribu jiwa. Peningkatan ini terjadi karena membaiknya aktivitas perekonomian pada hampir seluruh sektor di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023. Berdasarkan nilai ini, Kabupaten Tabalong masuk ke dalam kategori daerah berpendapatan menengah tinggi. Capaian ini jauh melebihi dari target yang dicanangkan sebesar 80.683 juta rupiah.

Disamping hal tersebut, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong juga patut mendapatkan apresiasi. Pada tahun 2023 , Kabupaten Tabalong mendapatkan angka 75,43. Capaian ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 75,07. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Kabupaten Tabalong memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan yang didasarkan atas 3 aspek yakni : Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Akan tetapi, selain capaian positif diatas. Ada beberapa juga capaian yang belum memenuhi target yang sudah termuat dalam dokumen perencanaan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong pada capaian tahun 2023 sebesar 5,77% masih lebih

besar dari yang ditargetkan sebesar 5,55 %. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong karena dari berbagai program yang sudah dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan hanya mampu menurunkan 0,10 % dari tahun sebelumnya 2022.

Pada indikator penunjang pendidikan, Kabupaten Tabalong rata-rata lama sekolah sebesar 9,14 dan harapan lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu memberikan perhatian ekstra terkait perkembangannya. Capaian Kabupaten Tabalong terkait dua indikator pendidikan tersebut belum memenuhi dari apa yang sudah ditargetkan, akan tetapi masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada indikator yang menunjang sektor kesehatan angka kematian bayi/angka kelangsungan hidup bayi sebesar 11/1000 penduduk masih belum mencapai sesuai dengan target yang dicanangkan pada dokumen perencanaan sebesar 9/1000 penduduk. Perlu adanya terobosan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan penanganan kesehatan bagi bayi sehingga bisa menurunkan resiko kematian bayi. Demikian juga dengan indikator persentase balita gizi buruk, capaian Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mencapai 0,93 dari yang ditargetkan 0,00 persen. Hal ini menandakan pemberian fasilitas kesehatan bagi bayi dan balita masih belum optimal sehingga belum mencapai sesuai target yang diharapkan.

Pada aspek pelayanan umum dari sektor pendidikan, capaian persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik tahun 2023 sebesar 40,76 % masih jauh dari harapan. Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka peningkatan kualitas pendidik menargetkan angka 85,87 terkait dengan sertifikasi tenaga pendidik. Perlu adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tabalong.

Dari sektor kesehatan, capaian standar pelayanan minimal kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2023 sebesar 83

persen masih belum memenuhi target yang telah dicanangkan sebesar 100 persen. Hal ini turut berimplikasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2023 sebesar 3,39 dari yang ditargetkan 3,53. Perlu adanya terobosan khusus untuk dapat meningkatkan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong.

Dari sektor perumahan dan kawasan permukiman, capaian Kabupaten Tabalong terkait rasio rumah layak huni tahun 2023 sebesar 1:3,78 masih belum memenuhi dari target yang dicanangkan sebesar 1:1,73. Hal ini menandakan masih banyak masyarakat Kabupaten Tabalong yang memiliki kualifikasi rumah yang memiliki kualifikasi tingkat keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta dari segi kesehatan penghuni. Demikian juga dengan persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani dengan capaian tahun 2023 sebesar 48,58% masih jauh dari target sebesar 85%, termasuk persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU dengan capaian berbanding target sebesar 52,57/100. Hal ini menandakan perlu adanya peningkatan dalam upaya pencapaian target kinerja dari sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dari sektor ketenagakerjaan perlu ditingkatkan lagi program pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan dalam negeri, hal ini bisa dilihat dari capaian target kinerja yang terlihat cukup jauh dengan capaian berbanding target tahun 2023 sebesar 384/93. Demikian juga terkait penerapan regulasi terkait ketenagakerjaan yang tingkat capaian berbanding targetnya masih lebih rendah dari terget pada tahun 2023 sebesar 76,14/87,9.

Pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, capaian kabupaten layak anak masih belum memenuhi target akan tetapi sudah menunjukkan kemajuan yang lumayan signifikan. Hal ini terlihat dari capaian berbanding target kinerja tahun 2023 nindya/utama. Demikian juga terkait persentase ARG pada belanja APBD yang capaiannya berbanding target kinerja tahun 2023 masih cukup signifikan sebesar 18/30 persen. Persentase

ARG dalam APBD bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Pada sektor pangan, capaian skor pola pangan harapan sudah cukup menjanjikan walaupun masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan capaian dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 86,6/89,9. Hal ini menandakan capaian konsumsi pangan di Kabupaten Tabalong sudah mengarah pada konsumsi pangan yang beragam dan berkualitas, bergizi, seimbang dan aman. Demikian juga dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan masih cukup menjanjikan apabila dibandingkan dengan target sebesar 79,79/84,72. Hal ini menandakan pemenuhan pangan di Kabupaten Tabalong terpenuhi sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Akan tetapi perlu adanya usaha khusus agar target kinerja yang diharapkan bisa tercapai.

Dari sektor pertanian, capaian Kabupaten Tabalong terkait persentase luas lahan bersertifikat (tanah aset Pemda) jika dibandingkan antara target dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 58,3/100. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena masih banyak tanah aset Pemda yang belum memiliki sertifikat sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap hal ini.

Dari sektor lingkungan hidup capaian Indeks Kualitas udara dan air di Kabupaten Tabalong masih jauh dari harapan. Hal ini dimungkinkan karena posisi Kabupaten Tabalong sebagai daerah penghasil tambang batu bara yang lumayan besar, sehingga berpengaruh terhadap kualitas air dan udara di Kabupaten Tabalong.

Pada sektor penanaman modal, persentase peningkatan penanaman modal di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mencapai -20. Hal ini menandakan kurangnya minat investor dalam menanamkan modal di

Kabupaten Tabalong. Perlu adanya usaha ekstra dalam upaya menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tabalong.

Di sektor pariwisata, kontribusi sektor wisata terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong masih sangat minim. Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target sebesar 0,65/4. Diperlukan inovasi yang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata agar bisa berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam PDRB Kabupaten Tabalong.

Demikian juga di sektor perdagangan, peran sektor ini terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong sudah lumayan signifikan, akan tetapi masih belum bisa mencapai target sesuai yang diharapkan. Perbandingan antara capaian dengan target kinerja sebesar 7,51/9,21 bukan berarti tidak ada perkembangan terhadap sektor perdagangan di Kabupaten Tabalong. Akan tetapi peningkatan sektor ini dibarengi dengan sektor lain yang juga meningkat secara signifikan sehingga menggerus peran sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga terjadi pada sektor perindustrian yang perbandingan antara capaian dan target sebesar 5,91/11,23. Menguatnya peran sektor pertambangan secara signifikan mengakibatkan perkembangan sektor lain terpinggirkan sehingga seakan-akan sektor lain tidak mengalami peningkatan.

Pada aspek daya saing daerah perkembangan pengeluaran konsumsi pangan per kapita dan non pangan per kapita lebih rendah dari apa yang ditargetkan. Hal ini menandakan perputaran keuangan masyarakat di Kabupaten Tabalong masih sangat minim. Perlu adanya program khusus yang dapat menarik minat masyarakat di Kabupaten Tabalong untuk dapat membelanjakan uangnya di wilayah Kabupaten Tabalong yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.4

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	2,5-3,5	2,5-3,5	4,9
2	Inflasi	Persen	1,14	3,86	2,39
3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	80.683	80.683	117.75
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	62.538	62.538	62.706,01
5	Indeks Gini	Indeks	0,28-0,31	0,30	0,284
6	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	75,07	75,07	75,43
7	Persentase penduduk miskin	Persen	5,55	5,55	5,77
8	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	90
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	75,12	75,12	72,54
10	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Point	86,10	86,10	86,47
11	Status Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya
12	Angka Melek Huruf	Persen	100	100	99,52

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
13	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,93	9,93	9,14
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46	14,46	12,91
15	APK SD	Persen	110,72	110,71	108,66
16	APK SMP/MTs	Persen	100	100	94,92
17	APK SMA/SMK/MA	Persen	89,60	100	88,75
18	Angka pendidikan yang ditamatkan:	Persen			
	- SD	Persen	26,10	26,10	17,62
	- SMP/MTs	Persen	17,15	17,15	49,7
	- SMA/SMK/MA	Persen	19,58	19,58	108
19	APM SD/SDLB/MI	Persen	100	100	99,52
20	APM SMP	Persen	100	100	85,7
21	Angka Kematian Bayi/Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	4/1000	9/1000	11/1000
22	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,73	70,73	71,28
23	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0,00	0,00	0,93

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
24	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	97,25	97,25	96,4
25	Jumlah Grup Kesenian	Buah	42	45	40
26	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	1	1	1
27	Jumlah klub olahraga	Buah	80	80	128
28	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	36	36	36
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				
1.1	Pendidikan				
1.1.1	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1	Persen	100	93,90	87,9
1.1.2	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertikat pendidik	Persen	100	85,87	40,76
1.1.3	Persentase APK PAUD, SD, SMP dan DIKMAS	Persen	106,03	106,03	81,43
1.1.4	Persentase APM PAUD, SD, SMP dan DIKMAS	Persen	99,48	99,48	98,76
1.1.5	Jumlah Penyelenggaraan Even Tradisi dan Adat Budaya Daerah	Jumlah	10	3	5
1.1.6	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	9	9	10

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
1.2	Kesehatan				
	Dinas Kesehatan				
1.2.1	AKI	Rasio	130/100.000 Kelahiran Hidup	130/100.000 Kelahiran Hidup	87/100.000
1.2.2	AKB	Rasio	8/1000 Kelahiran Hidup	9/1000 Kelahiran Hidup	11/1000
1.2.3	UHC	Persen	100	100	99,7
1.2.4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	9,5	9,5	7,45
1.2.5	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:2500	1:2500	Belum rilis
1.2.6	Persentase Faskes dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	100	100	97,5
	Rumah Sakit				
1.2.7	IKM	Indeks	3,53	3,53	3,39
1.2.8	Akreditasi	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna
1.2.9	SPM	Persen	100	100	83

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.3.1	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen	74,99	74,99	82,41
1.3.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	96,43	96,43	94,58
1.3.3	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	Persen	65	65	100
1.3.4	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	Persen	100	100	100
1.3.5	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	6,36	6,36	6,39
1.3.6	Persentase irigasi Kabupaten dengan kondisi baik	Persen	75	75	74,61
1.3.7	Persentase kawasan terbangun	Persen	2,07	2,07	1,99
1.3.8	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	100	100
1.3.9	Persentase Bangunan Fasilitas Publik yang terpelihara	Jumlah	100	100	100
1.3.10	Persentase Desa yang dapat di akses dengan mudah	Persen	79,8	79,8	98,35
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.4.1	Rasio rumah layak huni	Rasio	1:1,46	1:1,73	1:3,78

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
1.4.2	Persentase pemukiman yang tertata	Hektar	100	100	82,99
1.4.3	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	85	85	48,58
1.4.4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100	100	52,57
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1.5.1	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	95
1.5.2	Persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100	100	90
1.5.3	Persentase pencegahan penanggulangan kebakaran	Persen	100	100	87
1.5.4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	Unit	5	5	5
1.5.5	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	Persen	100	100	96
1.6	Sosial				
1.6.1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
1.6.2	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Persen	100	100	100
1.6.3	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Jaminan Sosial	Persen	100	100	100
1.6.4	Persentase Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Sosial	Persen	100	100	100
1.6.5	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
2.1	Tenaga Kerja				
2.1.1	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	Dokumen	1	1	1
2.1.2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri	Orang	320	384	93
2.1.3	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	140	70	90
2.1.4	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Orang	500	500	3400
2.1.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.	Persen	86,76	87,9	76,14

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.2.1	IPG	Point	86,10	86,10	86,06
2.2.2	IDG	Point	75,12	75,12	74,6
2.2.3	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	Nindya
2.2.4	Prosentase SKPD yang responsif gender	Persen	100	100	100
2.2.5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100
2.2.6	Persentase SKPD yang memiliki Data terpilah gender	Persen	100	100	100
2.2.7	Prosentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100
2.2.8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	30	30	18

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.3	Pangan				
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,9	89,9	86,6
2.3.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah (IKP)	Indeks	84,72	84,72	79,79
2.3.3	Meningkatnya diversifikasi dan cadangan pangan masyarakat	Ton	50	60	215.515
2.3.4	Meningkatnya Desa Tahan Pangan	Persen	100	100	97,71
2.3.5	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	90	90	100
2.4	Pertanahan				
2.4.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (Tanah Aset Pemda)	Persen	100	100	58,3
2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (aset Pemda)	Jumlah	4	8	12
2.4.3	Jumlah kasus sengketa lahan yang tertangani	Kasus	5	5	3
2.4.4	Luas Tanah Kosong terkelola	Dokumen	1	1	6,5
2.5	Lingkungan Hidup				
2.5.1	Persentase pengurangan sampah	Persen	30	30	22,35

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.5.2	Persentase Penanganan Sampah	Persen	70	70	94,6
2.5.3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	67,5	67,5	69,85
2.5.4	Persentase pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	Persen	100	100	100
2.5.5	Indeks kualitas air	Indeks	55,50	61	55,19
2.5.6	Dokumen Perencanaan LH yang Updating	Dokumen	2	1	2
2.5.7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,5	89,5	70,79
2.5.8	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan yang di tindaklanjuti	Persen	90	100	100
2.5.9	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	100	100	90
2.5.10	Penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	Perda/ Perbup	1	1	1
2.5.11	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Persen	80	80	86,8
2.5.12	Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B 3	Persen	70	70	60

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.6.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Puas	Sangat Puas (92,00)	Sangat Puas
2.6.2	Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	Persen	100	100	22,22
2.6.3	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	100	100	99,28
2.6.4	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100	100	100
2.6.5	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	75	100	50
2.6.6	Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	60	70	61,89
2.6.7	Persentase kepemilikan akte kelahiran anak 0 - 18	Persen	100	100	98,67
2.6.8	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akte perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.6.9	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan	Persen	100	100	100
2.6.10	Persentase kepemilikan akte kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100
2.6.11	Persentase validitas database kependudukan	Persen	100	100	100
2.6.12	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan database kependudukan	Persen	10	10	22,22
2.6.13	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Status	Ada	Ada	Ada
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.7.1	Jumlah Desa yang ditetapkan batas wilayahnya	Desa	121	121	114
2.7.2	Jumlah Sarana Transportasi Desa yang dibangun	Jumlah	2	2	2
2.7.3	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100	100
2.7.4	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	Jumlah	1	1	1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.7.5	Jumlah kerjasama antar desa	Persen	2	2	12
2.7.6	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	Persen	80	80	70
2.7.7	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persen	80	80	70
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.8.1	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Persen	20	20	13,5
2.8.2	Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	Persen	80	80	78,65
2.8.3	Cakupan anggota UPPKS yang ber KB	Persen	92	92	91,89
2.8.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,44	1,44	1,37
2.8.5	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,12	2,12	2,23
2.8.6	Cakupan Peserta KB yang aktif	Persen	82,28	82,28	79,3
2.8.7	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,55	60,55	66,24
2.8.8	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (<i>Age Spesific Fertility Rate / ASFR</i> 15-19)	Angka	29	29	29,37

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.8.9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) Per WUS usia 15-49 Tahun.	Angka	2,12	2,12	2,23
2.8.10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>modern Contraceptive (mCPR)</i>	Angka	82,28	82,28	79,26
2.8.11	Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	Persen	7,57	7,57	7,58
2.9	Perhubungan				
2.9.1	Meningkatnya Kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi di Jalan Raya	Angka	4.900 KBWU	4.900 KBWU	4.097 KBWU
2.9.2	Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana fasilitas keselamatan Perhubungan	Persen	90	90	57
2.9.3	Meningkatnya pergerakan Orang dan Barang yang melalui Bandara Warukin	Jumlah	1.500 Orang/ 40.000 Barang/Kuli	1.500 Orang/ 40.000 Barang/Kuli	200 orang/ 1.400 barang
2.9.4	Menurunnya Angka Kecelakaan dan Pelanggaran	Angka	20 Laka 930 Tilang 6 lokasi	20 Laka 930 Tilang 6 lokasi	54 Laka 1.063 Tilang
2.9.5	Persentase Layanan Angkutan Multimoda	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.10	Komunikasi dan Informatika				
2.10.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100
2.10.2	Terlaksananya <i>E-Government</i>	Persen	100	100	100
2.11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
2.11.1	Pertumbuhan UMK	Persen	0,27	0,27	0,26
2.11.2	Jumlah Koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai	Persen	80	55	59
2.11.3	Jumlah anggota koperasi yang dilatih	Jumlah	360	150	272
2.11.4	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persen	3	3	3
2.11.5	Terlaksananya pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah	30	30	30
2.11.6	Jumlah pelaku usaha yang dilatih Wirausaha	Jumlah	90	40	90
2.12	Penanaman Modal				
2.12.1	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	1,01 Triliun	1,01 Triliun	2.296.276.937.481
2.12.2	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal	Investor	20	20	20

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.12.3	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	Skor	90	90	91,06
2.12.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Informasi PM	Persen	84	84	161
2.12.5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	20	20	-28
2.13	Kepemudaan dan Olahraga				
2.13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100	100	96
2.13.2	Jumlah atlet berprestasi	Orang	50	50	98
2.13.3	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	Persen	100	100	96
2.14	Statistik				
2.14.1	Persentase penyelenggaraan Statistik sektoral lingkup Kabupaten	Persen	100	100	100
2.15	Persandian				
2.15.1	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	100	100
2.16	Kebudayaan				
2.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	Festival	5	5	5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
2.16.2	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Situs	9	9	10
2.17	Perpustakaan				
2.17.1	Persentase Jumlah Pengunjung	Persen	20,16	20,16	21,81
2.17.2	Rasio ketersediaan koleksi bahan pustaka	Rasio	0,25	0,25	0,28
2.17.3	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen	53	53	40
2.18	Kearsipan				
2.18.1	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	Persen	45	45	45
2.18.2	Jumlah Perlindungan, Penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip statis dan Alih Media	Jumlah	300	300	1385
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				
3.1	Kelautan dan Perikanan				
3.1.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.053,2	1.8053,2	17.124,22
3.1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang ramah Lingkungan	Ton	2.163,41	2.163,41	2.041,03
3.1.3	Jumlah Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Kegiatan	0 kali	0 kali	7

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
3.1.4	Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton	32	32	33,4
3.2	Pariwisata				
3.2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1.020.000	1.020.000	953. 000
3.2.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Persen	4	4	0,65
3.3	Pertanian				
3.3.1	Produktivitas Pertanian per hektar pertahun - Padi - Jagung - Kedelai - Bawang Merah - Cabai Rawit - Cabai Besar - Karet (sheet) - Lada (biji kering)	Hektar/ tahun	4,8 ton/ha 4,05 ton/ha 1,15 ton/ha 7,3 ton/ha 5 8,8 1,1 ton/ha 220 kg/ha	4,8 ton/ha 4,05 ton/ha 1,15 ton/ha 7,3 ton/ha 5 8,8 1,1 ton/ha 220 kg/ha	4,75 ton/ha 4,02 ton/ha 1,12 ton/ha 7,20 ton/ha 4,90 ton/ha 8,70 ton/ha 1,04 ton/ha 633 kg/ha
3.3.2	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	Persen	70	72,5	53,33
3.3.3	Persentase angka mortalitas hewan strategis	Persen	≤3%	≤3%	0,01
3.3.4	Persentase penyediaan daging asuh	Persen	75%	75%	74,2

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
3.3.5	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	Persen	40	40	68,65
3.3.6	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	Persen	35	35	35
3.3.7	Jumlah UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) yang di fasilitasi	UPPB	46	56	52
3.4	Perdagangan				
3.4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,21	9,21	7,51
3.4.2	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	Persen	1,14	1,14	2,93
3.4.3	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	86	86	85
3.4.4	Persentase Pemenuhan Indikator pasar Tipe A Kriteria SNI 8152:2015	Persen	100	85,15	84,17
3.4.5	Jumlah Produk unggulan daerah yang siap ekspor	Persen	75	60	60
3.4.6	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang di tera / tera ulang	Persen	80	69	70
3.5	Perindustrian				
3.5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,51	11,23	5,91
3.5.2	Pertambahan Industri baru	WUB	37	37	35

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
3.5.3	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait secara elektronik	Persen	66	66	60
3.5.4	Tersedianya Informasi Industri	Persen	100	100	100
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan				
4.1	Sekretariat Daerah				
4.1.1	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100
4.1.2	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	100	100
4.1.3	Persentase Pembentukan Produk Hukum	Persen	100	100	100
4.1.4	Persentase Tingkat Sinkronisasi dan Penyelarasan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100	100
4.1.5	Persentase Tingkat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
4.2	Sekretariat DPRD				
4.2.1	Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD	Persen	100	100	100
4.2.2	Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/Reses	Persen	100	100	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5.1	Perencanaan				
5.1.1	Persentase Indikator Kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	Persen	100	100	100
5.1.2	Persentase keselarasan program pada dokumen perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	100	100	100
5.2	Keuangan				
5.2.1	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD	Persen	100	100	100
5.2.2	Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
	dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu				
5.2.3	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
5.2.4	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan neraca keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
5.2.5	Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	43,54	43,54	40,02
5.2.6	Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5,1	5,1	2,68
5.2.7	Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	Persen	14	14	61,53
5.3	Kepegawaian				
5.3.1	Persentase kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	92	92	90,74
5.3.2	Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persen	100	100	100
5.3.3	Persentase penempatan ASN sesuai analisis jabatan	Persen	90	90	90
5.3.4	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
5.4	Pendidikan dan Pelatihan				
5.4.1	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100	100	100
5.5	Penelitian dan Pengembangan				
5.5.1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persen	20	20	17
6	Administrasi Pemerintahan Umum				
6.1.1	Persentase tingkat pelayanan anggaran	Persen	100	100	100
6.1.2	Persentase perda yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
6.1.3	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	43,54	43,54	6,85
6.1.4	Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5.1	5.1	35,85
6.1.5	Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target	Persen	14	14	11,13
6.1.6	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100
6.1.7	Nilai AKIP: Indeks Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	73,90	73,90	87,9
6.1.8	Persentase tingkat pelayanan Protokol dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
6.1.9	Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat BB	Persen	50	50	70,73
7	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
7.1.1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Persen	0	80%	70
7.1.2	Jumlah Perangkat Daerah dengan predikat WBK	Jumlah	3 PD	5 PD	1
8	Kewilayahan				
8.1.1	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	73,96	73,96	83
8.1.2	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Persen	75,80	75,80	79
8.1.3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan)	Persen	97,64	97,64	95
8.1.4	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen	82,23	82,23	84
8.1.5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	84,59	84,59	81

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
9	Unsur Pemerintahan Umum				
9.1.1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	100	100	0
9.1.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah	12	12	24
9.1.3	Persentase penganganan konflik dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	100	100	100
9.1.4	Meningkatnya ketahanan sosial, budaya, agama, kemasyarakatan dan Ekonomi	Persen	100	100	97
9.1.5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	10	10	14
9.1.6	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi Wawasan Kebangsaan	Persen	80	80	100
9.1.7	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Persen	78	78	100
9.1.8	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	Persen	80	80	100
9.1.9	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	Persen	80	80	97

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023 RPJMD	Target Tahun 2023	Capaian tahun 2023
9.1.10	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	80	80	100
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran Konsumsi Pangan per Kapita	ribu rupiah	1.541.054/1 2.613	1.541.054/1 2.613	8.716.029
2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	ribu rupiah	55,08	55,08	51,99
3	Ketaatan Terhadap RTRW	persen	100	100	100
4	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	24	24	11
5	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jumlah	4	4	20
6	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	21	21	37
7	Angka kriminalitas	Jumlah	10	10	6,23
8	Jumlah demo	Kali	0	0	0
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	5	5	5
10	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	15,45	15,45	13.535
11	Rasio Ketergantungan	persen	45,00	45,00	46,64

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2024 dan hasil analisis

Berdasarkan jenisnya, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD ada 155 program, 423 kegiatan dan 1.057 sub kegiatan, sedangkan pada APBD terdapat 156 program, 423 kegiatan, dan 1.040 sub kegiatan. Selanjutnya, sampai triwulan II pelaksanaan APBD, dilakukan perubahan terhadap APBD sebanyak 2 kali. Kegiatan pada APBD yang semula 423 menjadi 425 dan jumlah sub-kegiatan yang semula 1.040 menjadi 1.089 dengan jumlah program yang tidak berubah, yakni 156 program. Dalam hal ini, terdapat sejumlah sub kegiatan pada RKPD yang tidak digunakan di APBD, juga sejumlah sub kegiatan yang tidak ada di RKPD namun ditambahkan di APBD seiring dengan proses penganggaran yang berjalan. Adapun sub kegiatan dimaksud secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Sub Kegiatan pada RKPD yang Tidak Digunakan di APBD

No	Sub Kegiatan
1	2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2	2.08.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
3	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4	2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6	2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7	2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
8	2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9	2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10	2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

No	Sub Kegiatan
11	2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12	2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
13	2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
14	2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
15	2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16	2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17	5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6	2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2024 dan hasil analisis

Tabel 2.6
Sub Kegiatan yang Ditambahkan di APBD

No	Sub Kegiatan
1	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2024 dan hasil analisis

2.2. Ketercapaian Kinerja dan Permasalahan Pembangunan sampai Triwulan II

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan RKPD menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan.

Informasi mengenai anggaran dan realisasinya dapat diperoleh melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sedangkan informasi mengenai tingkat capaian kinerja, permasalahan dan rencana tindaklanjutnya diolah melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SI MOLEK Pe-De) yang konsepnya disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Tingkat capaian anggaran dihitung dengan membandingkan realisasi keuangan sampai akhir triwulan II tahun 2024 dan tingkat capaian kinerja dihitung dengan rata-rata capaian program yang telah dilakukan pembobotan secara relatif terhadap anggaran pada setiap perangkat Daerah.

Pada tabel yang diuraikan dalam capaian realisasi anggaran dan kinerja dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja pada beberapa perangkat Daerah bernilai sangat minim. Sedikitnya ada 2 permasalahan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Pertama, perangkat Daerah tersebut memang belum melakukan penginputan dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kedua, pengisian data dalam sistem tidak tepat sehingga nilainya tidak bisa dihitung dan secara otomatis dianggap 0 (nol).

Kesalahan dalam pengisian realisasi kinerja antara lain 1) tidak konsisten antara indikator dan target 5 tahunan dengan indikator dan target tahunan; 2) isian realisasi kinerja tidak relevan dengan indikator kinerja, misalnya satuan indikator menyatakan jumlah sedangkan isiannya menggambarkan persentase. Hal ini selain menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pengukuran kinerja juga

mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengukuran kinerja.

Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat Daerah dan permasalahan pembangunan sampai triwulan II tahun 2024;



Tabel 2.7
Rekapitulasi hasil Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja sampai triwulan II tahun 2024
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	493.954.369.697	164.100.705.422	33,22	43,54	Beberapa kegiatan besar rencana dilaksanakan pada triwulan ke tiga, sehingga kinerja yang diharapkan belum terpenuhi	Sebagai evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	258.776.030.248	63.388.218.019	24,5	30,68	1. Penambahan silpa BLUD 2. Pembayaran iuran BPJS 3. Pembayaran Inakes daerah	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
3	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	140.008.716.777	53.149.224.797	37,96	25,69	1. Penambahan silpa BLUD	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
4	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	533.672.590.043	52.342.022.803	9,81	16,11	Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang sehingga kinerja yang diharapkan masih belum tercapai	Sinergitas antar Instansi terkait yang mendukung pencapaian kinerja agar lebih solid, sehingga kinerja yang diharapkan bisa tercapai
5	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	194.949.064.309	39.697.029.138	20,36	14,95	Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang sehingga kinerja yang diharapkan masih belum tercapai	Sinergitas antar Instansi terkait yang mendukung pencapaian kinerja agar lebih solid, sehingga kinerja yang diharapkan bisa tercapai
6	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	19.156.836.725	6.563.337.885	34,26	50,25	1. Pembelian perlengkapan/peralatan rescue 2. Kontribusi kursus/pelatihan/sosialisasi 3. Belanja perjalanan dinas	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.519.481.321	4.183.152.720	39,77	21,7	Anggaran perjalanan dinas, kebutuhan pengadaan sarana untuk evakuasi saat banjir/ musibah orang tenggelam masih belum mencukupi	Diusulkan pada APBD Perubahan.
8	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	45.997.230.033	18.546.826.881	40,32	66,79		
9	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	17.003.731.662	4.490.022.375	26,41	43,79	Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya Kerjasama dengan Instansi vertikal baru bisa dilaksanakan pada triwulan ketiga sehingga kinerja yang diharapkan belum bisa tercapai	Sebagai evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya
10	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.035.103.488	4.500.866.436	26,42	59,21	Pergeseran dilakukan untuk belanja perjalanan dinas dan belanja pada beberapa sub kegiatan	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
11	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	63.515.464.199	14.421.749.589	22,71	22,69	Belanja hibah yang merupakan belanja yang memiliki porsi yang cukup besar dalam APBD DKPPTPH tahun 2022 kepada masyarakat banyak yang belum dilaksanakan karena masih proses pengadaan dan penetapan calon penerima / calon lokasi	Pada triwulan III realisasi belanja hibah akan meningkat diiringi dengan realisasi keuangan APBD DKPPTPH. Berapa belanja hibah pada triwulan II masih dalam proses penetapan CP / CL maupun menunggu saat musim yang tepat untuk direalisasikan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	66.270.385.423	17.379.057.550	26,22	59,63	* Adanya kebutuhan penambahan anggaran untuk bonus bagi petugas kebersihan atas keberhasilan dalam memperoleh ADIPURA * Adanya penambahan untuk operasional RTH	Disesuaikan pada anggaran perubahan
13	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.946.573.868	4.681.757.732	31,32	43,20		
14	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.535.122.221	8.516.309.759	39,55	51,02	1. Penyesuaian besaran dana desa akibat adanya peningkatan jumlah Belanja Daerah 2. Kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	16.975.772.233	10.486.824.459	61,78	46,99	1. Pengadaan untuk kebutuhan rambu lalu lintas pada ruas jalan yang sudah masuk dalam database kebutuhan rambu jalan 2. Pendataan kembali terkait kebutuhan ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	
16	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.768.252.719	7.477.271.033	34,35	50,09	1. Penyesuaian terhadap kebutuhan untuk mendukung kegiatan statistik sektoral di daerah 2. Penyesuaian untuk kebutuhan untuk peningkatan Indeks SPBE 3. Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana pendukung	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
17	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	48.202.512.415	9.895.850.753	20,53	16,59	1. Anggaran kas yang tidak tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda dilaksanakan.	1. Kerjasama internal di bidang-bidang

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					<ul style="list-style-type: none"> 2. Anggaran Kas dalam satu kegiatan yang terpecah-pecah sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan 3. Data kontribusi sektor industri dan sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh dari BPS Kab. Tabalong di akhir tahun. 4. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan tergantung dari usulan perizinan yang masuk 5. Aturan baru terkait perpanjangan SBU Penyedia dari Permen PUPR sehingga banyak penyedia yang belum bisa mengikuti kegiatan pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyesuaian anggaran kas kegiatan pada saat perubahan anggaran 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral 4. Sosialisasi secara terbuka untuk mendorong pelaku usaha melakukan pendaftaran ijin 5. Memberi informasi terbaru terkait proses pengadaan
18	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.763.680.035	1.220.164.664	10,37	26,15		
19	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	22.711.974.730	9.202.914.363	40,52	51,12	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sarana prasarana olah raga yang yang sebelumnya pengelolaannya pada Sekretariat Daerah dialihkan ke Disporapar 2. Hibah KONI 	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
20	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.926.981.390	4.046.944.765	37,04	71,80		Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
21	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	48.452.434.306	14.188.192.233	29,28	29,28	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kegiatan yang angkasnya ada di triwulan III & IV 2. Terdapat kegiatan yang mengalami peningkatan harga akibat inflasi 3. Terdapat kegiatan yang merupakan indikator output Instansi lain 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sesuai rencana 2. Pengusulan SSH sesuai harga update pada masa perubahan anggaran

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						sebagai konsekuensi dari satu urusan tetapi diampu oleh dua Instansi yakni Urusan Pertanian	3. Sebagai evaluasi dalam penyusunan organisasi perangkat daerah 4. Perlu dilakukan sinergitas antara Disbunnak dengan DKP2TP yang sama-sama pengampu urusan pertanian sebagai upaya peningkatan kinerja urusan sesuai kewenangannya
22	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	83.058.171.783	39.086.074.324	47,06	48,90		
23	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	81.492.417.853	21.767.191.946	26,71	34,96		
24	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.224.611.503	6.174.469.512	32,12	65,80	Banyaknya kegiatan dengan anggaran yang lumayan besar dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun berjalan sehingga kinerja yang diharapkan masih belum tercapai	Sebagai evaluasi untuk perencanaan pada tahun berikutnya
25	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	348.703.386.763	116.471.386.214	33,34	57,41		
26	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.314.832.658	5.017.305.692	28,98	50,60	Penambahan untuk pembelian sarana pendukung (kendaraan roda 4 yang masa penggunaannya melebihi masa pakai)	
27	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN	15.172.638.532	4.603.072.213	30,34	44,13	Penambahan untuk pengelolaan mutasi ASN, pengelolaan kenaikan	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					pangkat, fasilitasi lembaga profesi ASN, pemberian penghargaan bagi ASN, pembinaan disiplin ASN, dan bantuan biaya pendidikan S2 bagi jabatan peneliti	
28	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	15.098.449.696	6.589.366.556	43,64	43,11	Perjalanan dinas dalam daerah untuk keperluan pengawasan masih belum memadai dibandingkan dengan tugas pengawasan yang dilaksanakan selama satu tahun	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
29	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG	13.640.373.672	5.152.643.417	37,77	29,98	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM, pembayaran rekening listrik, pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan. Untuk sarpras kelurahan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
30	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK	16.121.216.786	5.561.384.005	34,50	48,41	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun. Pemeliharaan gedung kantor seperti pengecatan dan perbaikan pagar harus segera dilakukan.	Diusulkan pada APBD Perubahan. Untuk sarpras kelurahan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
31	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA	4.629.915.000	2.004.496.924	43,29	79,53	Anggaran perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran rekening listrik belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
32	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS	3.647.416.269	1.622.413.987	44,48	49,98	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
33	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS	4.036.792.800	1.849.781.547	45,82	60	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi	Diusulkan pada APBD Perubahan.

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	
34	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA	5.869.332.318	3.511.208.648	59,82	44,21	Anggaran penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun	Diusulkan pada APBD Perubahan.
35	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN	3.822.532.000	1.725.479.836	45,14	46,38	Anggaran perjalanan dinas, belanja cetak, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
36	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO	3.617.182.000	1.827.094.257	50,51	60,81	Anggaran perjalanan dinas, pembayaran rekening air dan makan minum harian belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
37	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA	3.925.674.043	1.633.179.246	41,60	67,93	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
38	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI	3.323.951.281	1.509.704.607	45,42	51,67	Anggaran perjalanan dinas dan makan minum harian belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
39	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU	3.274.053.000	1.296.545.822	39,60	35,63	Anggaran perjalanan dinas dan penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
40	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA	3.480.399.115	1.517.680.435	43,61	80,76	Anggaran perjalanan dinas, belanja cetak, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49.693.745.692	29.597.483.474	64,05	64,04		
Total		2.773.809.001.491	770.996.406.038	27,8	36,37		

Sumber: Simolek Pede 2024.dan hasil analisis



BAB III

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

*PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2024, di mana dalam perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Rasio).
2. Perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu perubahan prediksi pendapatan daerah, perubahan prediksi belanja daerah, dan perubahan prediksi pembiayaan.
3. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD yang sifatnya sangat *urgent* dan disesuaikan dengan skala prioritas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah.

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

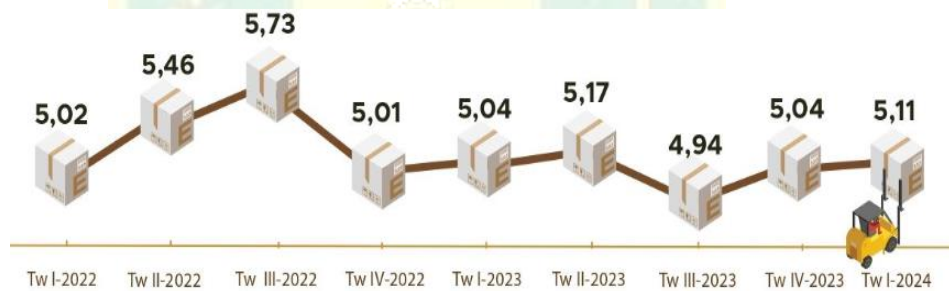
3.1.1. Perubahan Ekonomi Makro Daerah

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di daerah tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat Provinsi dan Nasional. Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Sasaran indikator ekonomi makro Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0% - 4,5%
2. Inflasi sebesar 3,86
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,55%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,07
5. Gini Rasio sebesar 0,30
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,05%
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.



Gambar 3.1.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan Nasional
(%, y-on-y)

Sumber: BPS Indonesia

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan

yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2024, dengan pertumbuhan (y-on-y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami perlambatan pertumbuhan (y-on-y) masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,24 persen.

Sementara di Kalimantan Selatan, ekonomi pada triwulan I 2024 tumbuh 4,96% (y-on-y), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,69% (y-on-y). Hal ini sejalan dengan masih tingginya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik. Selain itu, kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi, sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan I 2024 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Secara y-on-y, realisasi belanja pemerintah APBD dan APBN mengalami kenaikan terutama pada jenis Belanja Pegawai, seiring dengan kenaikan gaji dan THR yang sebagian telah terealisasi di triwulan I-2024. Kemudian berdasarkan data APBD, kenaikan terjadi pada jenis Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.



Gambar 3.2.
Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Triwulanan (% , y-on-y)

Sumber: BPS Provinsi Kalsel

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.

Tabel 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Regional Kalimantan
Triwulan I 2024 (%)

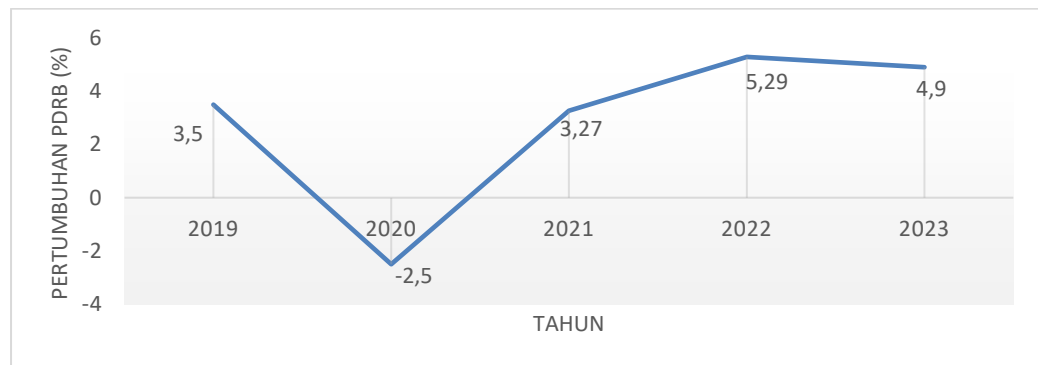
No.	Provinsi	Pertumbuhan PDRB	
		Quarter to Quarter (%)	Year on Year (%)
1	Kalimantan Timur	0,16	7,26
2	Kalimantan Tengah	-6,23	5,01
3	Kalimantan Barat	-0,51	4,98
4	Kalimantan Selatan	-5,21	4,96
5	Kalimantan Utara	-2,48	4,78
Kalimantan		-1,63	6,17

Sumber: Bank Indonesia Tahun 2024

Bank Indonesia memprakirakan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. LU Pertambangan yang diperkirakan melambat sejalan dengan target produksi batu bara tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2023. Sementara itu, LU Perdagangan diperkirakan melambat sejalan dengan kenaikan UMP yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya diprediksi memengaruhi daya beli masyarakat. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Ekspor luar negeri diperkirakan melambat didorong oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dan moderasi permintaan negara mitra dagang utama sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang masih berkontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat namun sedikit melambat sejalan dengan perilaku wait and see di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlanjut sehingga berdampak terhadap aliran investasi asing (PMA).

Perekonomian Kabupaten Tabalong sendiri selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh positif, sedangkan pada tahun 2020, perekonomian dunia mengalami *shock* akibat adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pertumbuhan Kabupaten Tabalong tahun 2023 sebesar 4,90 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Tabalong dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

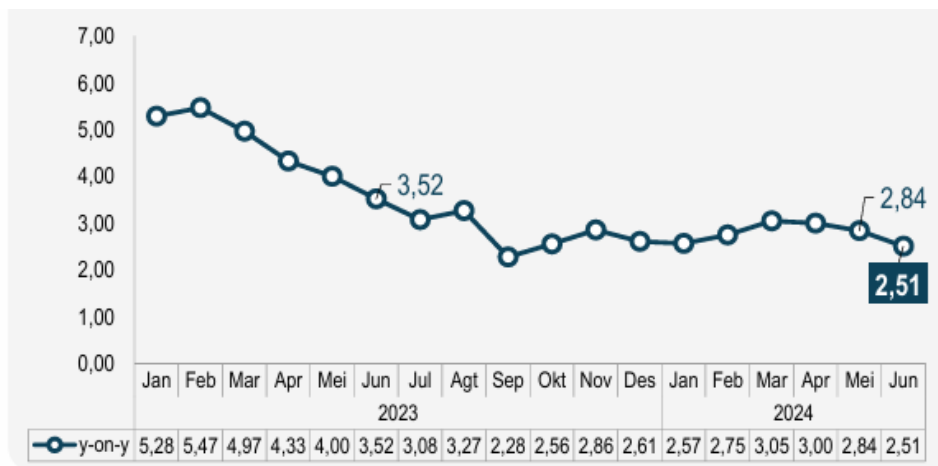


Gambar 3.3.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023

3.1.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Secara nasional, pada Juni 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,28.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok transportasi sebesar 1,61 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,50 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.



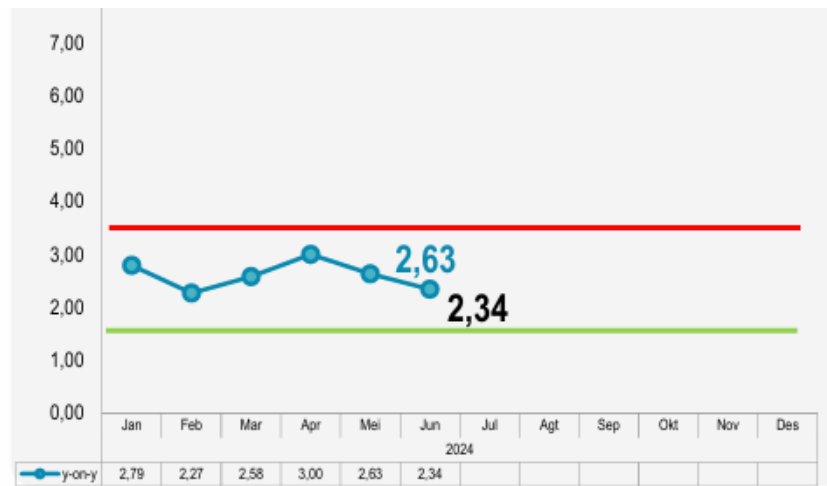
Gambar 3.4.
Inflasi Nasional Bulanan (% , y-on-y)

Sumber: BPS Provinsi Kalsel

Inflasi yang terjadi ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di

berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024 dan 2025.

Sementara di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,73. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,53 persen dengan IHK sebesar 109,47 dan terendah terjadi di Tanah Laut sebesar 1,36 persen dengan IHK sebesar 105,61.



Gambar 3.5.
Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (% , y-on-y)

Sumber: BPS Provinsi Kalsel

Bank Indonesia memperkirakan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (y-on-y). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sisi penawaran, sejalan dengan kondisi cuaca ekstrim yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Perkiraan yang lebih tinggi juga ditopang oleh peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Inflasi Kota Tanjung sendiri pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar 1,96% (y-on-y), mengalami deflasi sebesar 0,23% (m-to-m). Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: emas perhiasan, ikan nila, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bensin, kontrak rumah, sewa rumah, beras, Sigaret Putih Mesin (SPM), gula pasir, baju muslim wanita, udang basah, jeruk, kol putih/kubis, buku tulis bergaris, daun seledri, kangkung, tomat, ikan mas, daun bawang, dan bubur.

Kondisi perkembangan ekonomi baik secara global, nasional, regional maupun lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi pertimbangan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap target-target kinerja dalam lingkup yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024. Selain itu, realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 juga turut menjadi pertimbangan sehingga target kinerja khususnya yang terkait dengan makro ekonomi daerah perlu dilakukan penyesuaian. Berikut adalah perubahan target makro ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2024.

Tabel 3.2.
Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Perubahan Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9	4,0 – 4,5	5,0 – 5,3
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,77	5,55	5,55
3	Indeks Pembangunan Manusia	75,43	75,07	76,13
4	Gini Rasio	0,284	0,30	0,27-0,30
5	Tingkat Pengangguran (%)	3,60	3,05	3,05
6	Inflasi (%)	2,39	3,86	2,2 – 3,9
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,56	72	72

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Tabalong di tengah situasi nasional dan global yang saat ini dalam keadaan kekurangan rantai pasok (*supply chain*) khususnya pangan dan energi yang mengakibatkan terjadinya inflasi dan resesi di beberapa negara.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut, maka tantangan sekaligus prospek yang dihadapi pada tahun 2024 adalah:

1. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan atau perkebunan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan.
3. Tumbuhnya ekonomi melalui peningkatan daya saing sektor sekunder dan tersier yang mempunyai prospek besar dan sebagai mesin penggerak ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi, yang berdampak manfaat luas dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Besarnya jumlah angkatan kerja yang berpeluang terserap sebagai tenaga kerja lokal.
5. Letak wilayah yang strategis sebagai daerah penyangga IKN yang didukung penguatan dan optimalisasi infrastruktur beserta jaringannya untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.
6. Membangun kelembagaan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan.

3.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Makro Daerah

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro tahun 2024 maka perlu ditindaklanjuti melalui strategi dan arah kebijakan perekonomian daerah untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam situasi yang masih penuh ketidakpastian. Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM dari sisi kesehatan dan pendidikan agar terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mendorong peningkatan ketersediaan cadangan pangan dan peningkatan produksi sektor pertanian serta stimulus atau insentif ekonomi bagi dunia usaha.
3. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan transformasi struktural sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan inovasi pangan, revitalisasi sektor industri pengolahan, transformasi sektor perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui desain program yang tepat agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter yang sesuai dengan permintaan pasar.
5. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendorong pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dalam memperluas akses ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah.
6. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah melalui penguatan (*reinforcement*) implementasi tata kelola pemerintahan.
7. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengendalikan inflasi.

3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Dibandingkan dengan target dalam RKPD 2024, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 31,9 persen, dengan peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,3 persen, Pendapatan Transfer 38,9 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan masih sama sebagaimana yang ditargetkan dalam RKPD 2024.

Dari sisi belanja, secara umum pada tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dibanding dengan belanja pada APBD induk. Selain hal tersebut, belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang wajib dan mengikat, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas dan strategis, dengan memperhatikan target-target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagai *guidance* pencapaian visi dan misi Bupati Tabalong.

Kebutuhan belanja pembangunan akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah (APBD) sebagai salah satu penopang strategi dalam implementasi RKPD yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, kemitraan swasta dan swadaya masyarakat sehingga kebutuhan fiskal daerah diharapkan akan terjaga dan digunakan secara efektif, efisien dan menerapkan asas akuntabilitas.

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Tahun 2024

Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 didasarkan pada perubahan asumsi pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. **1.247.651.262.377,24** dari target APBD

(Pergeseran) Rp. **2.630.289.777.084,00** atau terealisasi sebesar 47,43 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD 2024 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.006.626.571.084,00	2.630.289.777.084,00	1.247.651.262.377,24	47,43%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.976.640.084,00	241.976.640.084,00	126.691.162.279,24	52,36%
4.1.01	Pajak Daerah	81.886.370.000,00	81.886.370.000,00	41.260.217.461,00	50,39%
4.1.02	Retribusi Daerah	6.030.426.800,00	6.030.426.800,00	3.202.244.312,00	53,10%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644,00	19.800.883.644,00	14.735.829.206,00	74,42%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.258.959.640,00	134.258.959.640,00	67.492.871.300,24	50,27%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.629.649.931.000,00	2.248.313.137.000,00	1.120.960.100.098,00	49,86%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.442.216.565.000,00	2.032.507.079.000,00	996.901.276.541,00	49,05%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.433.366.000,00	215.806.058.000,00	124.058.823.557,00	57,49%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0,00	0,00%

Sumber : SIPD, 2024

3.2.1.2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap

kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan pendapatan daerah dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2024.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4.
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2024 (Rp)	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN DARI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.006.626.571.084,00	2.630.289.777.084,00	2.654.070.043.436,00	647.443.472.352,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.976.640.084,00	241.976.640.084,00	247.404.526.277,00	10.427.886.193,00
4.1.01	Pajak Daerah	81.886.370.000,00	81.886.370.000,00	85.313.474.000,00	3.427.104.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.030.426.800,00	6.030.426.800,00	93.740.676.140,00	87.710.249.340,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644,00	19.800.883.644,00	19.800.883.644,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.258.959.640,00	134.258.959.640,00	48.549.492.493,00	-80.709.467.147,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.629.649.931.000,00	2.248.313.137.000,00	2.266.665.517.159,00	637.015.586.159,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.442.216.565.000,00	2.032.507.079.000,00	2.034.907.079.000,00	592.690.514.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.433.366.000,00	215.806.058.000,00	231.758.438.159,00	44.325.072.159,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0,00

Sumber : SIPD, 2024

Berdasarkan data diatas, Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 32,3 persen dibandingkan dengan yang ditargetkan sebelumnya pada RKPD 2024, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 4,4 persen, Retribusi Daerah meningkat sebesar 1454,5 persen, sementara komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan tetap dan komponen Lain-Lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 62,4 persen. Adapun peningkatan sebesar 1454,5 persen pada komponen Retribusi daerah disebabkan karena adanya perubahan dalam struktur pendapatan APBD, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD yang semula dikategorikan ke dalam komponen Lain-Lain PAD yang sah, sekarang dikelompokkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD. Selain itu, pada komponen Lain-Lain PAD yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dikelompokkan dalam retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sektor ini ditargetkan meningkat karena adanya objek retribusi baru yaitu laboratorim pengujian material dan adanya peningkatan penjualan hasil usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, adanya pungutan retribusi baru pada retribusi pemanfaatan aset daerah juga turut berpengaruh sehingga aset-aset milik daerah dapat lebih dioptimalkan penerimaannya.
2. Pendapatan Transfer diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 39,1 persen yang terdiri dari peningkatan pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat sebesar 41,1 persen dan peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar 23,6 persen.

3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.

Pendapatan Daerah Tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan akan ditempuh beberapa kebijakan untuk mengoptimisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terutama dalam perluasan dan penguatan basis data pajak daerah seperti pendataan wajib pajak baru, peningkatan penyebarluasan informasi perpajakan terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pembaharuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah. Selain hal tersebut juga, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah juga melalui perluasan sistem pembayaran, pemberlakuan sanksi administratif, dan kebijakan relaksasi untuk memicu kesadaran masyarakat membayar pajak daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus.
3. Untuk pendapatan transfer antar daerah, optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut dengan menggali potensi Kabupaten Tabalong dengan mendukung pemungutan pajak provinsi yang bersumber dari Kabupaten Tabalong dan perluasan basis datanya.
4. Perluasan basis pajak daerah yang akurat dan akuntabel dengan langkah awal melakukan *cleansing* data piutang pajak daerah dan sensus piutang pajak daerah.
5. Perbaikan sistem dan sumberdaya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berorientasi pada kepentingan publik secara langsung. Terutama untuk pemulihan ekonomi daerah, Belanja Daerah mengacu tema pembangunan tahun 2024 dan diarahkan pada kegiatan prioritas dan strategis yang memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat serta reformasi struktural seperti dukungan pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, sektor infrastruktur dan sektor pendukung lainnya.

3.2.2.1. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 864.267.810.154,27** dari target APBD (Pergeseran) Rp. **2.773.809.001.491,00** atau terealisasi sebesar **31,16** persen.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD 2024 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	Persentase Realisasi (dibanding Pergeseran APBD)
5	BELANJA DAERAH	2.045.254.065.821,00	2.773.809.001.491,00	864.267.810.154,27	31,16%
5.1	Belanja Operasi	1.409.930.690.390,00	1.624.627.950.790,00	631.850.558.697,27	38,89%
5.1.01	Belanja Pegawai	752.328.399.299,00	820.812.636.377,00	350.118.994.404,33	42,66%

No	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD 2024 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	Persentase Realisasi (dibanding Pergeseran APBD)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.538.681.091,00	702.242.745.213,00	220.927.726.418,94	31,46%
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	2.446.307.404,00	38,53%
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	723.370.000,00	0,00	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	71.292.030.000,00	63.374.369.200,00	45.352.470.470,00	71,56%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.422.000.000,00	31.125.250.000,00	13.005.060.000,00	41,78%
5.2	Belanja Modal	397.284.640.642,00	852.430.116.414,00	71.346.763.182,00	8,37%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.083.877.000,00	35.418.002.000,00	3.525.885.318,00	9,96%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.717.391.402,00	84.773.045.906,00	7.356.006.179,00	8,68%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.424.632.588,00	231.835.060.396,00	6.001.591.674,00	2,59%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	272.601.836.711,00	495.259.618.790,00	54.363.280.011,00	10,98%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.922.941,00	4.193.249.322,00	100.000.000,00	2,38%
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	965.980.000,00	951.140.000,00	0,00	0,00%
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.787.247.789,00	10.139.641.487,00	441.500.000,00	4,35%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.787.247.789,00	10.139.641.487,00	441.500.000,00	4,35%
5.4	Belanja Transfer	221.251.487.000,00	286.611.292.800,00	160.628.988.275,00	56,04%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.709.000.000,00	8.809.000.000,00	5.213.097.000,00	59,18%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.542.487.000,00	277.802.292.800,00	155.415.891.275,00	55,94%

Sumber : SIPD, 2024

3.2.2.2. Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Perubahan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Kenaikan belanja diutamakan pada perangkat daerah yang terkait langsung *major project* pemulihan ekonomi dan sosial.
2. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menambah ruang gerak prioritas.
5. Belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator dan target kinerjanya.
6. Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat serta mengupayakan peningkatan proporsi Belanja Modal.
7. Belanja Daerah diarahkan untuk pemenuhan sarana pendukung aparatur untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik (rehab kantor dan peremajaan kendaraan dinas).
8. Belanja Pengadaan Pakaian bagi ASN (PDH, Batik dan Olahraga) hanya dianggarkan untuk 1 (satu) jenis kecuali yang bersifat khusus.

Adapun rincian perubahan belanja daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	PERGESERAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN DARI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	2.045.254.065.821,00	2.773.809.001.491,00	3.171.660.520.768,00	1.126.406.454.947,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.409.930.690.390,00	1.624.627.950.790,00	1.782.691.037.752,00	372.760.347.362,00
5.1.01	Belanja Pegawai	752.328.399.299,00	820.812.636.377,00	823.971.438.096,00	71.643.038.797,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.538.681.091,00	702.242.745.213,00	848.490.460.151,00	291.951.779.060,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	723.370.000,00	723.370.000,00	723.370.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.292.030.000,00	63.374.369.200,00	73.430.739.505,00	2.138.709.505,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.422.000.000,00	31.125.250.000,00	29.725.450.000,00	6.303.450.000,00
5.2	BELANJA MODAL	397.284.640.642,00	852.430.116.414,00	1.063.443.248.729,00	666.158.608.087,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.083.877.000,00	35.418.002.000,00	47.613.839.222,00	26.529.962.222,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.717.391.402,00	84.773.045.906,00	126.487.376.378,00	71.769.984.976,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.424.632.588,00	231.835.060.396,00	249.815.103.109,00	202.390.470.521,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	272.601.836.711,00	495.259.618.790,00	632.250.501.879,00	359.648.665.168,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.922.941,00	4.193.249.322,00	4.561.028.141,00	4.070.105.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	965.980.000,00	951.140.000,00	2.715.400.000,00	1.749.420.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.787.247.789,00	10.139.641.487,00	10.139.641.487,00	-6.647.606.302,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.787.247.789,00	10.139.641.487,00	10.139.641.487,00	-6.647.606.302,00
5.4	BELANJA TRANSFER	221.251.487.000,00	286.611.292.800,00	315.386.592.800,00	94.135.105.800,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.709.000.000,00	8.809.000.000,00	20.968.300.000,00	12.259.300.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.542.487.000,00	277.802.292.800,00	294.418.292.800,00	81.875.805.800,00

Sumber : SIPD, 2024

3.2.3. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah

3.2.3.1 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Realisasi pembiayaan Kabupaten Tabalong Tahun sampai dengan triwulan II Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	PERGESERAN APBD 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	Persentase Realisasi Pembiayaan (dibanding)
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.018.499.659,00	228.910.229.329,00	27.438.701.860,00	12%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.322.997.198,00	186.214.726.868,00	-	0%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.322.997.198,00	186.214.726.868,00	-	0%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.695.502.461,00	42.695.502.461,00	27.438.701.860,00	64%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.540.987.145,00	16.540.987.145,00	16.540.987.145,00	100%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	10.897.714.715,00	42%
	Pembiayaan Netto	38.627.494.737,00	143.519.224.407,00	27.438.701.860,00	-19%

Sumber : SIPD, 2024

3.2.3.2 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan mengalami perubahan dari rencana kerja pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	PERGESERAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.018.499.659	228.910.229.329,00	602.981.482.254	478.962.982.595
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.322.997.198,00	186.214.726.868,00	560.285.979.793	478.962.982.595
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.322.997.198,00	186.214.726.868,00	560.285.979.793,00	478.962.982.595,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.695.502.461,00	42.695.502.461,00	42.695.502.461,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.540.987.145,00	16.540.987.145,00	16.540.987.145,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	-
	Pembiayaan Netto	38.627.494.737,00	143.519.224.407,00	517.590.477.332,00	478.962.982.595,00

Sumber : BPKAD (SIPD), 2024

Secara lengkap struktur Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9.
Ringkasan Pendanaan Perubahan RKPD
Kabupaten Tabalong Tahun 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.006.626.571.084	2.654.070.043.436	647.443.472.352
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.976.640.084	247.404.526.277	10.427.886.193
4.1.01	Pajak Daerah	81.886.370.000	85.313.474.000	3.427.104.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.030.426.800	93.740.676.140	87.710.249.340
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644	19.800.883.644	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.258.959.640	48.549.492.493	- 80.709.467.147
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.629.649.931.000	2.266.665.517.159	637.015.586.159
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.442.216.565.000	2.034.907.079.000	592.690.514.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.433.366.000	231.758.438.159	44.325.072.159
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000	140.000.000.000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000	140.000.000.000	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.045.254.065.821	3.171.660.520.768	1.126.406.454.947
5.1	BELANJA OPERASI	1.409.930.690.390	1.782.691.037.752	372.760.347.362
5.1.01	Belanja Pegawai	752.328.399.299	823.971.438.096	71.643.038.797
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.538.681.091	848.490.460.151	291.951.779.060
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000	6.349.580.000	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	723.370.000	723.370.000,
5.1.05	Belanja Hibah	71.292.030.000	73.430.739.505	2.138.709.505
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.422.000.000	29.725.450.000	6.303.450.000
5.2	BELANJA MODAL	397.284.640.642	1.063.443.248.729	666.158.608.087
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.083.877.000	47.613.839.222	26.529.962.222
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.717.391.402	126.487.376.378	71.769.984.976
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.424.632.588	249.815.103.109	202.390.470.521

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	272.601.836.711	632.250.501.879	359.648.665.168
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.922.941	4.561.028.141	4.070.105.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	965.980.000	2.715.400.000	1.749.420.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.787.247.789	10.139.641.487	-6.647.606.302
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.787.247.789	10.139.641.487	-6.647.606.302
5.4	BELANJA TRANSFER	221.251.487.000	315.386.592.800	94.135.105.800
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.709.000.000	20.968.300.000	12.259.300.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.542.487.000	294.418.292.800	81.875.805.800
	Total Surplus/(Defisit)	-38.627.494.737	-517.590.477.332	-478.962.982.595
6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.018.499.659,00	602.981.482.254,00	478.962.982.595,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.322.997.198	560.285.979.793	478.962.982.595
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.322.997.198	560.285.979.793	478.962.982.595

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.695.502.461	42.695.502.461	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.540.987.145	16.540.987.145	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316	26.154.515.316	-
	Pembiayaan Netto	38.627.494.737	517.590.477.332	478.962.982.595
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
	TOTAL APBD	2.087.949.568.282	3.214.356.023.229	1.126.406.454.947

Sumber : BPKAD dan Bapenda (SIPD) Tahun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

*PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabalong pada Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan yang diimplementasikan dalam kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia sebagai motor penggerakannya. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 bahwa visi pembangunan jangka menengah adalah menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamais, sejahtera dan mandiri yang didukung oleh misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamais, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan upaya yang optimal, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan mempertimbangkan hasil kinerja pada tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026, rekapitulasi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tabalong dan kebijakan *top down* maupun *bottom up* dari hasil musrenbang tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi pembangunan sebagai arah

pembangunan Kabupaten Tabalong lima tahun, yaitu **“Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri”**

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif.

Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

Indikator : Angka kriminalitas

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 2 : Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan.

Indikator : Kontribusi pertanian terhadap PDRB

2. Meningkatkan akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten.

Indikator : - Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah
- Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Indikator : Indeks Ketahanan Pangan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum.

Indikator : Persentase penduduk berakses air minum

5. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

Indikator : Indeks Desa Membangun

6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

7. Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi.

Indikator : - Persentase UKM aktif

- Persentase koperasi aktif

- Kontribusi industri terhadap PDRB

8. Terkendalinya ketimpangan pendapatan.

Indikator : - Kontribusi perdagangan terhadap PDRB

- Indeks Gini

Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.

Indikator :

- Angka Harapan Hidup

- Rata-Rata Lama Sekolah

- Harapan Lama Sekolah

2. Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal.

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.

Indikator : Persentase PPKS yang dilayani

4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Indikator : - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

5. Menurunnya tingkat kemiskinan.

Indikator : Persentase penduduk miskin

Tujuan 4 : Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.

- Indikator* :
- Nilai SAKIP (predikat)
 - Opini BPK (predikat)
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
 - Tingkat Kemandirian Daerah

Adapun hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong

VISI Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang lebih Agamais	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan
		Meningkatkan akses, mobilitas, dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
		Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi

VISI Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		Terkendalinya ketimpangan pendapatan
Mewujudkan kemandirian Daerah	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan dan sosial budaya serta penerapan IPTEK secara optimal
		Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Menurunnya tingkat kemiskinan
	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Tabalong Tahun 2019-2024

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional (PN). Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 terdiri dari

- (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Proyek Prioritas Strategis/*Major Project (MP)* yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN pada RKP Tahun 2023 tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP Tahun 2024. Penajaman MP dilakukan dengan tetap menggunakan mekanisme *Clearing House*, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020–2024. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta. Upaya penguatan dilakukan agar kontribusi sumber daya dari BUMN dan Swasta dapat teridentifikasi, terpetakan, dan tersinkronisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

1. Sasaran Ekonomi Makro

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*)

menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 4.2
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

Uraian	2022	2023 Prakiraan	2024	
			RPJM	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% , yoy)	5,3	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
Laju inflansi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	5,5	3,6	2,7	1,5-3,5
Neraca Pembayaran				
	137,2	144,2-145,3	159,5	149,1-150,2
- dalam bulan impor	6,0	6,1-6,0	6,9	6,0-5,8
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,0	0,5-0,5	-1,7	0,5-0,4
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	9,6	10,7-12,3	9,9-10,2
Keseimbangan Primer (% PDB)	-0,4	-0,7	0,2-0,0	(0,0)-(0,4)
Surplus / Defisit APBN (%PDB)	-2,4	-2,8	(1,5)-(1,7)	(2,2)-(2,6)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,5	39,4	28,5-29,2	38,1-39,0
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	6,1-6,3	8,0-8,4	6,2-7,0
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,20	1.200-1.300	1.500	1.450-1.650 a
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	497,7	396-420	782	662,7-731,1
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5-9,0	6,0-7,0	6,5-7,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	72,91	73,36-73,37	75,54	73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,3	27,27
Inikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	105-107	105	105-108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	107-108	107	107-110

Sumber: RKPD 2024 dan hasil analisis

(2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun

selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

(3) Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024

- i. Percepatan Transformasi Ekonomi. Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
- ii. Pembangunan Inklusif. Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- iii. Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
- iv. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi. Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

(4) Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk;

1. mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi;
2. memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional;
3. mempertahankan peran sebagai paru-paru dunia; dan
4. mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian utara.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan sebagai berikut;

- a. membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya;
- b. meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KI Surya Borneo, KI Ketapang, KI Tanah Kuning, KI Batanjung, KI Jorong, KI Batulicin, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan SambasSingkawang;
- c. mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu karet, kelapa, lada, kopi, dan kakao dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahannya;
- d. mengembangkan hilirisasi komoditas batu bara serta hilirisasi berbasis komoditas kelapa sawit, dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa, air, dan matahari;
- e. mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin, kota besar yang menjadi Daerah Mitra IKN yakni Balikpapan dan Samarinda, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar Pontianak, kota sedang Singkawang, kota sedang Palangkaraya, dan kota sedang Tarakan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;
- f. mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dengan didukung korporasi petani;

- g. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan;
- h. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
- i. mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah

Strategi pemerataan intrawilayah Kalimantan sebagai berikut;

- a. memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan jalan Trans Kalimantan;
- b. mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal; (3) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- c. memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, kesehatan, dan trantibumlinmas;
- d. meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan;
- e. peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
- f. mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;

- g. meningkatkan akses masyarakat, khususnya di daerah 3T, terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan BLK;
- h. meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

a. Tema Pembangunan

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi pra-pandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui:

- i. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
- ii. pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan
- iii. perluasan akses dan kesempatan.

b. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator;

- a. pertumbuhan ekonomi,
 - b. tingkat pengangguran terbuka,
 - c. rasio gini, dan
 - d. penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator;
- a. indeks pembangunan manusia, dan
 - b. tingkat kemiskinan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. penguatan daya saing usaha,
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7. percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta
8. pelaksanaan pemilu 2024.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan, jumlah MP juga mengalami penyesuaian. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP, kemudian bertambah menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Pada RKP Tahun 2022 kembali bertambah menjadi 45 MP dan menjadi 44 MP pada RKP Tahun 2024. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 44 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024.

Oleh karena itu, dari 44 MP pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni:

- i. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter,
- ii. Pengelolaan Terpadu UMKM,
- iii. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi,
- iv. *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
- v. Destinasi Pariwisata Prioritas,
- vi. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay,
- vii. Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
- viii. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
- ix. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
- x. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0,
- xi. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting,
- xii. Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah), dan
- xiii. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)
- xiv. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu,
- xv. Transformasi Digital, dan
- xvi. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

4. Prioritas Nasional Tahun 2024

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project (MP)*. Penyusunan kebijakan dan target pada masing-masing PN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan-kegiatan terkait, dan didukung

oleh kerangka implementasi. Pada subbab ini dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan prioritas terkait untuk tiap PN. Kerangka implementasi meliputi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung pelaksanaan PN, yang difokuskan pada program-program prioritas pembangunan.

A. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi; dan ekonomi hijau.

B. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Pembangunan Wilayah Kalimantan Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada :
 - a. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat;

- c. KI Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. KI Surya Borneo dan KI Batanjung yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah; serta
 - e. KI Jorong dan KI Batulicin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas, lada, karet, kelapa, kopi, serta kakao;
 - 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi Daerah Mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);
 - 4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada
 - (a) pengentasan 1.460 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri;
 - (b) pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 37 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan;
 - (c) pembangunan 11 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Banjar, KPPN Barito Kuala, KPPN Bengkayang, KPPN Berau, KPPN Bulungan, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kubu Raya, KPPN Kutai Timur, KPPN Mempawah, KPPN Nunukan, KPPN Sambas; serta
 - (d) kawasan transmigrasi yang direvitalisasi meliputi 3 (tiga) kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 (satu) kawasan transmigrasi di Provinsi

Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 (satu) kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 (dua) kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 (dua) kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 (satu) kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate* yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; dan

- 5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
 - a. peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas);
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan;
 - c. penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota;
 - d. peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah;
 - e. penataan dan harmonisasi regulasi; serta
 - f. percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR IKN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

C. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

D. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

E. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

F. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

G. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan bidang politik, hukum,

pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Pendanaan Prioritas Nasional

Pendanaan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 diarahkan pada pencapaian sasaran dan penuntasan Prioritas Pembangunan periode tahun 2020–2024, dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penekanan pada pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional atau *Major Project* tahun 2024. Tahun 2024 merupakan periode yang sangat menentukan penyelesaian target RPJMN Tahun 2020–2024. Untuk itu, dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, pemerintah berupaya seoptimal mungkin menargetkan sasaran PN dalam RKP Tahun 2024 dengan fokus pada penyelesaian prioritas.

Prioritas yang dilaksanakan termasuk juga pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dengan anggaran yang cukup signifikan. Tahun 2024 juga menjadi tahun politik, dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan, maka penentuan kegiatan/proyek prioritas harus lebih tajam dan selektif, dan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas pelaksanaan, serta memastikan daya ungkit dan fungsionalitas dari pelaksanaan kegiatan/proyek. Pencapaian tersebut menjadi barometer penting untuk memastikan sasaran utama pembangunan dapat menjadi basis pembangunan pada periode berikutnya. Pendanaan PN pada RKP Tahun 2024 difokuskan dalam delapan arah kebijakan, yakni percepatan

pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; pembangunan rendah karbon dan transisi energi; pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; penguatan daya saing usaha; percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, kebijakan pendanaan diarahkan untuk mendukung infrastruktur dasar seperti pembangunan perumahan layak huni, penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi, pembangunan akses sanitasi serta akses air minum. Sementara itu, untuk percepatan peningkatan konektivitas akan diarahkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan, peningkatan kemantapan jalan nasional, pembangunan pelabuhan, pembangunan/peningkatan bandara, serta pembangunan jalur kereta api. Selain itu, pendanaan juga akan ditekankan untuk mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berfokus pada pembangunan hunian, gedung, serta penataan kawasan.

Pembangunan berkelanjutan didukung dengan pendanaan PN yang mencakup kebutuhan pembangunan rendah karbon dan transisi energi dalam merespons perubahan iklim. Dukungan pembangunan rendah karbon akan dilakukan antara lain melalui pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan, restorasi lahan gambut serta rehabilitasi kawasan mangrove. Sedangkan salah satu dukungan dalam pelaksanaan transisi energi akan dilakukan melalui konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Alokasi pendanaan PN Tahun 2024 juga difokuskan pada pencapaian target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain untuk bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, bantuan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan pemberian dukungan antara lain meliputi paket penyediaan vaksin imunisasi rutin dasar dan lanjutan, kampanye percepatan penurunan

stunting dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi semua jenjang pendidikan juga menjadi ruang lingkup dari kebijakan pendanaan PN Tahun 2024.

Untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pendanaan PN akan berfokus pada kegiatan yang mendukung revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, antara lain terkait restrukturisasi mesin/peralatan industri perusahaan dan revitalisasi kluster kawasan tambak. Sedangkan untuk mendorong penguatan daya saing usaha, dukungan pendanaan akan difokuskan pada transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), pengembangan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, serta peningkatan kapasitas SDM Pariwisata. Pemilu dan Pilkada serentak merupakan salah satu kegiatan penting di tahun 2024, sehingga kegiatan ini juga akan menjadi prioritas pada kebijakan pendanaan pada RKP. Dukungan yang perlu dipenuhi antara lain pemenuhan kebutuhan pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan logistik, dan pengamanan. Fokus prioritas RKP Tahun 2024 dilaksanakan melalui penyelesaian dan keberlanjutan pembangunan 16 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* pendukung PN yang menjadi penekanan pada RKP tahun 2024, yaitu:

- 1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- 2) Pengelolaan Terpadu UMKM;
- 3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
- 4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- 5) Destinasi Pariwisata Prioritas;
- 6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
- 7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- 9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- 10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
- 11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
- 12) Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah);

- 13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
- 14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
- 15) Transformasi Digital; dan
- 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3. Selain melakukan perkuatan pada proses penentuan proyek, perlu dipastikan efisiensi dan efektivitas pendanaan PN Tahun 2024 dengan mengintegrasikan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari APBN, seperti belanja K/L, belanja non-K/L (subsidi/*Public Service Obligation*), dan Transfer ke Daerah (TKD), maupun sumber pendanaan nonpemerintah seperti swasta dan BUMN. Dengan kondisi APBN yang terbatas, keterlibatan BUMN dan swasta menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berjalan lebih optimal.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Efek *scars* krisis Covid- 19 sebagian besar mengenai sisi produksi di mana menyebabkan penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan produktivitas modal/kapital. Sebelum Covid- 19, produktivitas Indonesia menurun selama periode 2010-2019 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 %. Kini pekerjaan rumah yang menjadi fokus pemerintah adalah menaikkan output potensial di mana pertumbuhan tinggi tidak hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi diharapkan terus dinamis dalam jangka panjang.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 **”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
- b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

- MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian: Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
 - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - Didukung oleh proyek-proyek prioritas

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, adapun tema pembangunan pada Tahun 2024 adalah “*Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional*”. Dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka perlu penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi:

“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.

Berdasarkan tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan

aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.

Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hubungan Daya Saing Daerah dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Daya Saing Daerah	Pembangunan Ekonomi Inklusif
1. Kemampuan Ekonomi Daerah	Pilar I : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja untuk mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Pilar II : Pemerataan pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan. Pembangunan Ekonomi Inklusif harus memastikan pemerataan ekonomi ke semua lapisan masyarakat, ketimpangan sisi pendapatan dan wilayah dan gender Pilar III : Perluasan akses dan kesempatan kerja. Seluruh masyarakat harus mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas SDM yang adil dan berkualitas
2. Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	
3. Iklim Berinvestasi	
4. Sumber Daya Manusia	

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 maka fokus utamanya diarahkan pada 2 komponen, yaitu :

1. *Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah.*

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*

Merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Sedangkan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dititikberatkan pada:

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja.
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM.
4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025.

Berdasarkan hal tersebut, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata

1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
3. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
4. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
5. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN

PD 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
4. Pengendalian Prevalensi Stunting
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak
6. Peningkatan Prestasi Olahraga
7. Pengembangan Budaya Daerah

PD 3: Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah

1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik

1. Penguatan Reformasi Birokrasi
2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik

4. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
6. Pelaksanaan Pilkada Serentak
7. Revitalisasi BLUD

Berdasarkan tema, isu strategis dan fokus pembangunan, sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang ingin dicapai digambarkan melalui indikator makro daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,61 – 5,01%.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,0 – 4,22%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,05 – 4,59%.
4. Rasio Gini sebesar 0,324.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,65.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 71,22.

Arah Kebijakan Kabupaten Kota (Kabupaten Tabalong)

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Seradang-Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin;

2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkaran barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN;
 3. Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan dan perkebunan.
- d) Aspek Pengembangan Investasi : stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

4.2.3 Prioritas dan Sasaran RKPD Perubahan Kabupaten Tabalong

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong disusun dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *money follow program*. Prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2024 pada dasarnya merupakan prioritas pembangunan tahun rencana yang dianalisis dari:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun berjalan dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024
2. Analisis Kebijakan Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan

3. Telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tabalong
4. Analisis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan
5. Analisis prioritas dan sasaran pembangunan daerah
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tujuan pembangunan tahun 2024 dilaksanakan dengan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi melalui diversifikasi ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan Pelayanan Dasar;
4. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan Ketahanan bencana;
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan hasil capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Kabupaten Tabalong menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut :

- PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.
- PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.

PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.

PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

PD 5 : Peningkatan Kualitas lingkungan hidup.

RKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang bertujuan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah, di-*breakdown* dalam arah kebijakan prioritas daerah dan akan diterjemahkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024. Berikut adalah arah kebijakan prioritas daerah tahun 2024 :

PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.

- Pengembangan pariwisata lokal beserta ekonomi kreatifnya.
- Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM.
- Peningkatan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.
- Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
- Peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Pengendalian prevalensi stunting.

PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN.

PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima

- Penguatan reformasi birokrasi.
- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
- Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian
- Pengembangan satu data Tabalong.

PD 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup

- Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup.
- Penataan kota dan lingkungan permukiman.

2. Major Projects Prioritas Daerah

Terdapat kegiatan multisektor yang menjadi *major projects* prioritas daerah tahun 2024 baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan tata kelola bencana, sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut *major projects* prioritas daerah tahun 2024:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata dan peningkatan promosi destinasi wisata unggulan.
2. Pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas petani, produksi dan pengolahan hasil serta pemasaran.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan distribusi dan kualitas SDM kesehatan.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendorong kreativitas dan sekolah penggerak.
5. Pengembangan pendidikan yang berbasis vokasi sesuai potensi keunggulan daerah untuk mendukung industri 4.0.
6. Pengembangan UMKM melalui kemitraan dan peningkatan skala usaha.
7. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.

8. Peningkatan infrastruktur dasar untuk mewujudkan konektivitas daerah terpencil.
9. Perluasan akses air minum perpipaan.
10. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) serta *Stunting*.
11. Peningkatan sarana dan prasarana/utilitas umum.
12. Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau serta penguatan tata kelola resiko bencana.
13. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

3. Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2024 terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ditengah pertumbuhan perekonomian yang terus menanjak, dimana pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong menjadi salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 diwilayah Kalimantan Selatan. Kendati demikian, situasi isu keamanan global bisa berpengaruh terhadap rantai pasok (*supply chain*) beberapa komoditas yang berdampak pada naiknya harga komoditas tersebut sehingga mempengaruhi keseimbangan pasokan ditingkat internasional yang secara sistemik akan mengganggu pasokan di dalam negeri yang tentu juga akan berpengaruh sampai ke daerah.

Berdasarkan isu strategis di atas, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berkualitas melalui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang produktif dengan memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan stabil dalam jangka panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing. Akselerasi kinerja ekonomi daerah dilakukan secara simultan antar sektor terutama dalam meningkatkan kualitas SDM

yang dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat), harus sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, sampai dengan layanan publik yang baik.

Keterpaduan pembangunan antar pusat dan daerah merupakan kunci utama bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi. Dengan mengacu dan mempertimbangkan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, berbagai isu strategis, tema RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Tahun 2024 disusun sebagai respon kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yakni pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong sehingga tema pembangunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang akan ditetapkan adalah **“Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”**.

Daya saing daerah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan untuk mewujudkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun fokus pembangunan tahun 2024 adalah :

1. Struktur ekonomi yang produktif, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
2. Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, penurunan stunting dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
4. Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Tata kelola lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang akan dicapai melalui indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 - 5,3 %.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,55%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,05 %.
4. Rasio Gini sebesar 0,27-0,30.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,13.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,00.
7. Inflasi sebesar 2,2 – 3,9 %.

Tabel 4.4 Perubahan Indikator sasaran pada RKPD Perubahan Tahun 2024

No	Indikator	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,0-4,5%	5,0-5,3%
2	Tingkat Kemiskinan	5,55%	5,55%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,05	3,05
4	Rasio Gini	0,3	0,27-0,30
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,07	76,13
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
7	Inflasi	3,86%	2,2-3,9%

Untuk perubahan terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan dikarenakan terdapat perubahan total pagu anggaran yang mengakibatkan perubahan indikator , selain itu atas saran hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2024 dengan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan supaya indikator dilakukan penyesuaian.

4.2.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah melalui proses atau tahapan yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RKP Tahun 2024 yang menjadi panduan bagi daerah dalam menyeleraskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan, diharapkan terjadi gerak langkah yang seirama, sehingga pencapaian tujuan pembangunan benar-benar berdampak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata.

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pusat dengan daerah dilakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dalam mendukung Prioritas Nasional terutama yang berkaitan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proses atau tahapan untuk menjaring usulan

dari Kabupaten/Kota yang mendukung proyek prioritas hasil rapat koordinasi Gubernur dilakukan pada tahap rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan, di mana pada tahapan sebelumnya di tingkat provinsi telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan melalui rapat koordinasi teknis antar instansi/lembaga yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjaring isu strategis, tema, strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Tahun 2024 melalui Musrenbang Provinsi.

Sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah sehingga dapat mempercepat target pencapaian pembangunan.

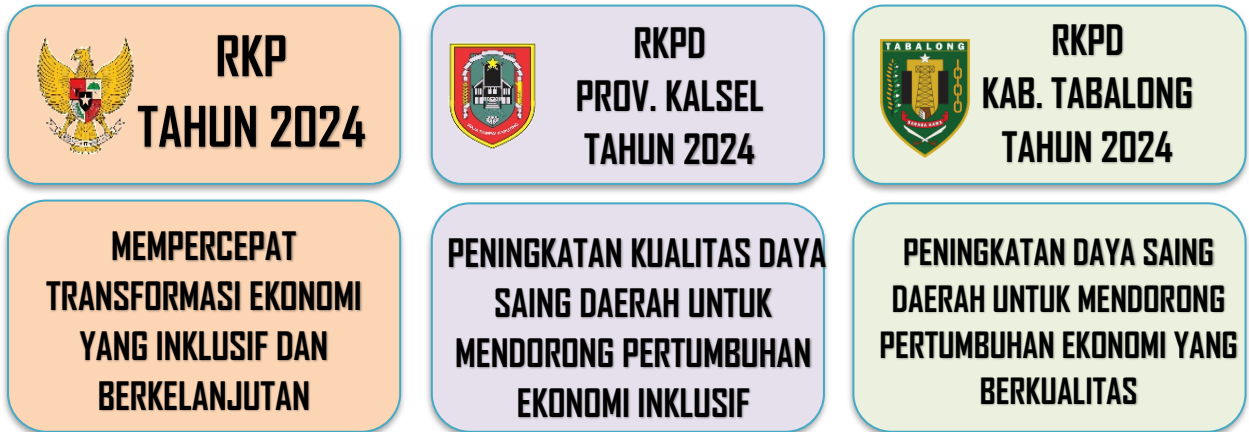
Berdasarkan hal tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024, serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 melalui harmonisasi pada tahapan penyusunan perencanaan sehingga sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan pusat dan daerah.

Pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana sudah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah sekitar serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa.

Kabupaten Tabalong yang secara geografis berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota negara baru tentunya akan menerima berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Terkait hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Tabalong harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi, diantaranya dengan memperkuat prasarana infrastruktur untuk mendukung konektivitas,

meningkatkan kualitas SDM yang inovatif dan berdaya saing serta mengantisipasi berbagai dampak negatifnya secara lebih dini.

Keterkaitan Tema RKP 2024 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan Tema RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai berikut :



Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Tabalong dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Sinergitas Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Tabalong

PRIORITAS NASIONAL 2024	PRIORITAS PROVINSI KALSEL 2024	PRIORITAS TABALONG 2024	Jumlah Program	Jumlah SKPD Pelaksana	Jumlah Dana
1	2	3	4	5	6
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.	30	5	28.943.739.811
PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 3: Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.	7	2	136.575.488.374

PRIORITAS NASIONAL 2024	PRIORITAS PROVINSI KALSEL 2024	PRIORITAS TABALONG 2024	Jumlah Program	Jumlah SKPD Pelaksana	Jumlah Dana
1	2	3	4	5	6
PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.	15	7	142.988.331.288
PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.	18	9	42.730.605.100
PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 3: Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.	6	4	227.813.283.014
PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PD 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	PD 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup.	14	5	66.387.620.490
PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.	39	Semua SKPD	1.399.814.997.744
Jumlah			129	41	2.045.254.065.821

Sumber : Bappedalitbang - Analisa, 2023

Sedangkan keterkaitan target dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Perbandingan Target dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian	Target		
		Nasional	Prov. Kalsel	Kab. Tabalong
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,7	4,6 - 5,0	5,0-5,3
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	4,40 - 4,22	5,55

No	Uraian	Target		
		Nasional	Prov. Kalsel	Kab. Tabalong
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	4,05	3,05
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,374-0,377	0,324	0,27-0,30
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,99 – 74,02	72,65	76,13
6.	Inflasi (%)	2,5	2,0 - 4,0	2,2-3,9
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	n/a	71,22	72,00
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Indeks)	27,27	24,6	n/a

Sumber : Rancangan RKP 2024, Rancangan RKPD Prov. Kalsel 2024



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

*PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat :

1. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai kebijakan baru
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Adapun rekapitulasi jumlah program/kegiatan dan pagu berdasarkan urusan pemerintahan pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Berdasarkan Urusan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

No	Urusan	RKPD 2024			APBD dan PERGESERAN 2024			PERUBAHAN RKPD 2024			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	RKPD 2024	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	12	60	3	12	71	3	13	71	379.994.489.447,00	490.449.265.744,00	500.664.437.739,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	20	71	5	21	78	5	21	81	148.711.873.574,00	258.776.030.248,00	270.856.064.224,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
											114.819.508.577,00	140.008.716.777,00	171.221.820.925,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	19	45	9	19	45	9	19	45	249.485.544.024,00	533.672.590.043,00	627.856.320.183,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	10	19	5	10	19	5	10	21	112.876.415.413,00	166.960.619.309,00	241.898.232.309,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	13	38	4	13	39	4	13	40	18.491.053.960,00	19.156.836.725,00	20.237.523.875,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
											9.400.865.049,00	10.519.481.321,00	12.159.838.321,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	14	32	6	15	33	6	15	33	38.927.687.380,00	45.997.230.033,00	49.143.693.591,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

No	Urusan	RKPD 2024			APBD dan PERGESERAN 2024			PERUBAHAN RKPD 2024			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2024	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	15	26	5	15	26	5	16	30	11.258.720.422,00	17.003.731.662,00	25.366.078.662,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	19	29	7	20	32	7	21	33	8.515.180.831,00	9.430.367.088,00	10.929.843.453,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	12	20	6	13	20	6	13	19	30.921.999.498,00	32.558.269.048,00	39.675.975.162,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21.723.609.000,00	27.988.445.000,00	33.400.509.000,00	1.04.2.10.1.05.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	15	24	10	16	25	10	16	25	60.189.005.659,00	66.270.385.423,00	76.890.438.423,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	16	36	5	16	36	5	16	34	12.705.921.818,00	14.946.573.868,00	17.357.479.824,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	9	27	5	9	27	5	8	25	15.443.424.779,00	21.535.122.221,00	32.846.972.338,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Urusan	RKPD 2024			APBD dan PERGESERAN 2024			PERUBAHAN RKPD 2024			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	RKPD 2024	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	12	3	8	26	3	8	26	1.933.313.400,00	7.604.736.400,00	8.230.648.400,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	16	30	2	16	30	2	16	25	15.563.482.024,00	16.975.772.233,00	23.603.705.813,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	10	23	3	10	23	3	10	22	18.867.744.811,00	20.959.993.870,00	22.718.385.531,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	10	17	6	10	17	6	10	17	15.807.198.090,00	16.685.160.770,00	18.761.105.466,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	13	25	6	13	25	6	13	25	11.164.872.501,00	11.763.680.035,00	14.531.035.290,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	15	36	4	15	36	4	15	35	16.944.100.554,00	20.493.431.726,00	22.485.179.800,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	4	1	1	4	1	1	4	482.499.020,00	612.498.420,00	546.878.832,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	3	1	1	3	1	1	3	244.523.000,00	195.760.429,00	361.308.364,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Urusan	RKPD 2024			APBD dan PERGESERAN 2024			PERUBAHAN RKPD 2024			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	RKPD 2024	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3.505.921.953,00	3.505.103.953,00	4.214.992.845,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	9	38	2	9	38	2	9	38	8.069.231.990,00	9.817.098.373,00	11.904.454.768,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	9	2	6	10	2	6	9	1.136.362.540,00	1.109.883.017,00	1.022.525.605,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	5	5	4	5	5	4	5	5	7.788.764.207,00	8.665.334.289,00	11.138.450.091,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2.102.493.284,00	2.218.543.004,00	3.837.556.930,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	18	37	6	18	40	6	20	36	20.564.177.781,00	22.291.860.862,00	33.208.698.749,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
											25.811.466.806,00	48.452.434.306,00	50.214.456.810,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	10	15	5	10	15	5	10	15	6.962.327.169,00	29.840.734.145,00	32.151.627.752,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	5	3	3	5	3	3	5	1.675.000.000,00	1.676.617.500,00	2.679.212.197,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Urusan	RKPD 2024			APBD dan PERGESERAN 2024			PERUBAHAN RKPD 2024			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	Prog - ram	Kegiat - an	Sub Kegiat - an	RKPD 2024	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	3	19	53	3	19	53	3	20	52	75.638.381.263,00	83.058.171.783,00	103.926.053.978,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	2	16	41	2	16	41	2	16	41	58.698.610.822,00	81.492.417.853,00	87.864.853.450,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
32	5.01 PERENCANAAN	3	15	52	3	15	52	3	15	52	15.201.303.465,00	16.039.271.667,00	19.179.663.627,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
33	5.02 KEUANGAN	4	13	63	4	13	71	4	13	65	322.996.106.042,00	348.703.386.763,00	375.722.794.398,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											15.987.282.500,00	17.314.832.658,00	22.867.126.916,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
34	5.03 KEPEGAWAIAN	2	9	30	2	9	30	2	10	35	10.638.791.013,00	11.586.117.006,00	14.347.828.770,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	2	1	2	2	1	2	2	3.351.001.526,00	3.586.521.526,00	2.893.519.762,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	9	1	4	17	1	4	11	3.135.339.836,00	3.185.339.836,00	3.799.289.836,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	3	9	24	3	10	25	3	10	26	14.379.044.240,00	15.098.449.696,00	19.183.386.898,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
38	7.01 KECAMATAN	6	16	57	6	16	56	6	17	56	13.168.285.132,00	13.640.373.672,00	14.834.390.672,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG
											15.887.483.001,00	16.121.216.786,00	17.565.501.786,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

No	Urusan	RKPD 2024			APBD dan PERGESERAN 2024			PERUBAHAN RKPD 2024			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2024	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											3.980.715.226,00	4.629.915.000,00	5.296.008.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA
											3.166.577.054,00	3.647.416.269,00	4.342.968.269,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS
											3.723.045.944,00	4.036.792.800,00	4.811.771.800,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS
											5.237.586.107,00	5.869.332.318,00	6.651.522.318,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA
											3.487.452.183,00	3.822.532.000,00	4.487.224.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN
											3.372.478.742,00	3.617.182.000,00	4.310.758.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO
											3.751.046.639,00	3.925.674.043,00	5.364.386.043,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA
											2.931.599.151,00	3.323.951.281,00	4.029.677.281,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI
											2.957.930.767,00	3.274.053.000,00	3.915.619.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU
											3.030.311.000,00	3.480.399.115,00	4.125.480.115,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	26	6	12	26	6	12	26	68.444.915.607,00	46.213.346.577,00	50.025.244.577,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH	155	421	1.054	156	428	1.112	156	435	1.099	2.045.254.065.821,00	2.773.809.001.491,00	3.171.660.520.768,00	

Adapun rekapitulasi program/kegiatan dan pagu berdasarkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan
Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP: Nilai IKM:	a. A b. 100	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	a. A b. 100	317.943.705.721,00	362.258.730.181,00	364.532.175.438,00	
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	9 Laporan	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	12 Laporan	12.231.839,00	12.231.839,00	554.703.185,00	Menambahkan Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Tabalong, Menambah Pengetahuan dan Wawasan kepada Guru Inovator

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2505 Orang	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2448 orang	314.469.050.453,00	358.783.877.000,00	358.783.877.000,00	1. Penyediaan Insentif bagi Bendahara Penerimaan terkait Penerimaan Rumah Dinas Pendidikan 2. Pembayaran BPJS 4% yang masih belum bisa terbayarkan 3. Silpa Aneka Tunjangan Dak Non Fisik Tahun 2023
		1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	84.490.356,00	84.490.356,00	71.935.356,00	-
		1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	2 Dokumen	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	3 Dokumen	199.957.200,00	199.957.200,00	155.270.304,00	Ada penambahan anggaran untuk biaya kontribusi
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan, Perlengkapan, Barang cetakan dan penggandaan Kantor yang disediakan.	13 Paket	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan, Perlengkapan, Barang cetakan dan penggandaan Kantor yang disediakan.	13 Paket	1.304.659.813,00	1.307.877.726,00	2.592.984.323,00	Ada penambahan untuk pembelian alat transportasi dan peralatan serta perlengkapan kantor, Ada penambahan untuk kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan, Perlengkapan, Barang cetakan dan penggandaan Kantor yang disediakan.	1 Unit	0,00	0,00	280.441.207,00	1. Memberikan Pelayanan Inklusi bagi Guru Pendamping maupun Siswa Inklusi yang ada pada Kabupaten Tabalong. 2. Memberikan Fasilitas kepada Sekolah terkait Perpustakaan Digital yang diharapkan dapat menambah minat Literasi dan Numerasi dari Siswa baik jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan
		1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100,00%	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	1.429.640.000,00	1.426.620.000,00	1.536.695.000,00	Ada penambahan untuk biaya iklan, Ada penambahan untuk kegiatan hari jadi kab.tabalong
		1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	100,00%	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	100%	443.676.060,00	443.676.060,00	556.269.063,00	Ada penambahan untuk perbaikan gedung kantor dan pembuatan taman kantor

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK dan APM SD b. APK dan APM SMP	a. 100,71% 100% b. 100% 100%	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK dan APM SD b. APK dan APM SMP	a. 100,71% 100% b. 100% 100%	53.731.911.245,00	119.900.001.582,00	126.959.984.382,00	
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK dan APM SD	110.71%100.00%	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK dan APM SD	110.71%100.00%	22.325.068.171,00	61.627.905.508,00	63.019.476.980,00	Kebutuhan Program Kandidat Sekolah Rujukan Google dalam percepatan Transformasi Digital di sekolah, meningkatkan kualitas kelembagaan sekolah dasar dan peningkatan kualitas pembinaan prestasi olahraga Atletik dan Beladiri, Mengakomodir BOSP Kinerja 2024, meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS melalui pengawasan dan pembinaan, melakukan perawatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											perpustakaan sebagai sarana utama pengembangan literasi dan numerasi siswa
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK dan APM SMP	100.00% 100.00%	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK dan APM SMP	100.00% 100.00%	14.383.364.192,00	29.973.213.832,00	34.256.721.200,00	melakukan perawatan perpustakaan sebagai sarana utama pengembangan literasi dan numerasi siswa, lahan sekolah untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, rehab perpustakaan untuk menunjang peningkatan literasi sekolah dalam pengembangan minat baca satuan pendidikan serta agar kerusakan tidak bertambah berat, pengadaan mebel untuk ruang kerja kepala sekolah
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	100%	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	100,00%	15.778.787.309,00	25.123.180.669,00	26.518.084.629,00	masih kurangnya dana untuk proses rehab 5 gedung paud sehingga dananya harus ditambah di perubahan serta

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											usulan dari poroposal,pokir dan musrenbang, pembangunan toilet dan sarana lainnya agar proses pembelajaran di paud dapat berjalan dengan baik
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH)	99,65%	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH)	99,65%	1.244.691.573,00	3.175.701.573,00	3.165.701.573,00	Kegiatan Hari Aksara Nasional tidak dilaksanakan dan Mengakomodir BOSP Kinerja 2024
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Persentasi Pendidik yang berkualifikasi S1/D.IV b. Persentasi Pendidik yang bersertifikasi Pendidik.	a. 89,00% b. 48,97 %	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Persentasi Pendidik yang berkualifikasi S1/D.IV b. Persentasi Pendidik yang bersertifikasi Pendidik.	a. 89,00% b. 48,97 %	8.318.872.481,00	8.290.533.981,00	9.172.277.919,00	
		1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan serta Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,00%	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan serta Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,00%	8.318.872.481,00	8.290.533.981,00	9.172.277.919,00	Terdapat pengurangan jumlah peserta PPG Guru PAI yg disesuaikan dengan Surat Usulan dari Kemenag, Menambah Pengetahuan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nonformal/Kesetaraan	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan					dan Wawasan Kepada Kepala Sekolah, Pengawas tidak terakomodir pada waktu anggaran induk 2024
3	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan even tradisi dan adat budaya daerah.	9 Event	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	17 Objek	2.802.416.760,00	2.801.600.760,00	3.345.289.652,00	
		2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan daerah	9 Even	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	17 Objek	1.985.829.122,00	1.985.819.122,00	2.239.613.014,00	1. untuk peningkatan wawasan pemajuan kebudayaan 2. Peningkatan SDM untuk pemajuan kebudayaan daerah 3. Hari jadi Tabalong
		2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan even tradisi dan adat budaya daerah.	9 Even	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan even tradisi dan adat budaya daerah.	9 Even	816.587.638,00	815.781.638,00	1.105.676.638,00	1. Pemutakhiran dan pendataan ulang PPKD (pokok pikiran kebudayaan daerah) 2. Pembuatan baju adat daerah (sesuai pakem) 3. Pergeseran tujuan pengiriman tim kebudayaan keluar provinsi

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan.	9 Buah	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	703.505.193,00	703.503.193,00	869.703.193,00	
		2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10 Buah	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	703.505.193,00	703.503.193,00	869.703.193,00	1. Melaksanakan penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Tabalong yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang bersertifikat 2. Pemberian upah kebersihan Juru Pelihara (JUPEL) cagar budaya yang tidak terakomodir pada waktu anggaran sebelum perubahan
JUMLAH								383.500.411.400,00	493.954.369.697,00	504.879.430.584,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	94.935.117.574,00	120.346.656.006,00	126.723.233.267,00	
		1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	14 dokumen	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan	100%	384.014.000,00	384.014.000,00	396.022.000,00	Penyelarasan sesuai dengan Instruksi ITDA

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya penatausahaan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan	100%	72.469.008.699,00	98.209.497.000,00	99.375.946.000,00	Penyelarasan sesuai dengan Instruksi ITDA
			Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	127.800.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00	
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan	100%	74.062.000,00	74.062.000,00	199.584.000,00	Penyelarasan sesuai dengan Instruksi ITDA
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	1.648.680.763,00	1.500.185.347,00	1.601.033.347,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	538.754.479,00	643.754.479,00	744.077.576,00	Penyelarasan sesuai dengan Instruksi ITDA
		1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	2.142.046.180,00	2.142.046.180,00	2.220.046.180,00	
		1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	3 poin	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	3 poin	1.128.316.000,00	836.220.000,00	729.460.000,00	
		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	1 laporan	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	1 laporan	16.422.435.453,00	16.429.077.000,00	21.329.264.164,00	
2	1.02 URUSAN PEMERINTAH	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	a. AKI b. AKB c. UHC	a. 130 b. 8 c. 95%	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	a. AKI b. AKB c. UHC	a. 130 b. 8 c. 95%	49.799.740.657,00	127.949.545.879,00	133.657.722.487,00	Penyelarasan sesuai dengan kondisi real

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AN BIDANG KESEHATAN	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	d. 8,5	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	d. 9,5				
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar (Obat dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasilitas Fisik)	4 kategori	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar (Obat dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasilitas Fisik)	4 kategori	7.745.602.908,00	68.228.787.788,00	68.086.503.980,00	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	41.244.041.749,00	57.787.388.184,00	63.621.568.520,00	
		1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	72.408.000,00	1.212.281.907,00	1.212.278.907,00	
		1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaan	100%	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaan	100%	737.688.000,00	721.088.000,00	737.371.080,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 2500	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 5.000	3.755.705.000,00	9.256.611.020,00	9.353.154.420,00	Standar Kapitasi BPJS
		1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	100%	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	100%	14.812.000,00	14.812.000,00	14.812.000,00	
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi	100%	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	89%	3.384.352.000,00	7.521.079.000,00	7.617.954.400,00	Penyelarasan sesuai dengan kondisi real
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100%	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	90%	356.541.000,00	1.720.720.020,00	1.720.388.020,00	Penyelarasan sesuai dengan kondisi real
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	95,00%	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	100%	179.686.393,00	609.517.393,00	520.262.100,00	Peningkatan Target

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MAKANAN MINUMAN			MAKANAN MINUMAN						
		1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	60%	32.300.743,00	96.030.743,00	90.530.000,00	Penyelarasan sesuai dengan kondisi real
		1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi alkes dan makanan minuman sesuai standart	100%	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi alkes dan makanan minuman sesuai standart	100%	78.171.400,00	270.558.400,00	237.036.100,00	
		1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	90%	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	90%	69.214.250,00	242.928.250,00	192.696.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100%	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	87%	41.623.950,00	613.699.950,00	601.691.950,00	Penyelarasan sesuai dengan Instruksi ITDA
		1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	100%	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	41.623.950,00	73.731.950,00	61.723.950,00	
					1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	539.968.000,00	539.968.000,00	Dana BOK
JUMLAH								148.711.873.574,00	258.776.030.248,00	270.856.064.224,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM											
1	X.XX. NON URUSAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel (Nilai AKIP) :	B	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel (Nilai AKIP) :	B	108.775.420.000,00	133.964.628.200,00	159.724.072.164,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administaraai pelaksanaan tugas ASN	14 bulan	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administaraai pelaksanaan tugas ASN	263 Orang	35.269.270.000,00	45.385.395.000,00	46.606.465.000,00	Penambahan anggaran pada tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK
					1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan & Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100%	0,00	0,00	1.044.991.000,00	Pelatihan e-RM, Training Komunikasi Efektif Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dan Komunikasi Efektif Bagi SDM Penunjang Pelayanan Kesehatan & Pelatihan BTCLS
					1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0,00	0,00	501.348.964,00	Pembangunan mushola
		1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	36 orang	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	894.510.000,00	1.626.571.200,00	1.626.571.200,00	Penambahan daya listrik RSUD APBD pada pergeseran
		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya Kegiatan Pelayanan BLUD	100%	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya Kegiatan Pelayanan BLUD	100%	72.611.640.000,00	86.952.662.000,00	109.944.696.000,00	Penambahan silpa BLUD

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. IKM b. Persentase Capaian SPM c. Akreditasi	(3,59) B 100% Paripurna	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. IKM b. Persentase Capaian SPM c. Akreditasi	(3,53) B 100% Paripurna	6.044.088.577,00	6.044.088.577,00	11.497.748.761,00	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan	7 Paket	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan & terpeliharanya alat kesehatan/alat penunjang medik yang sesuai standar	9 Paket	6.044.088.577,00	6.044.088.577,00	11.497.748.761,00	Penambahan anggaran pada belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan dan kalibrasi
JUMLAH								114.819.508.577,00	140.008.716.777,00	171.221.820.925,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	X.XX. NON URUSAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :		1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	14.639.732.477,00	14.982.401.586,00	15.890.294.306,00	
		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	100%	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	100%	131.501.560,00	131.501.560,00	113.673.560,00	
		1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	10.758.284.304,00	10.901.602.000,00	11.363.157.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	156.976.000,00	156.976.000,00	169.784.000,00	
		1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	100%	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	100%	803.576.475,00	1.056.454.759,00	1.382.192.399,00	
		1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan kantor Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan kantor Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.602.154.200,00	1.566.034.200,00	1.691.654.280,00	
		1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.187.239.938,00	1.169.833.067,00	1.169.833.067,00	
2	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6,36% 75%	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6,42% 75%	12.232.406.870,00	13.232.406.870,00	13.734.721.870,00	Penyesuaian terhadap Realisasi Tahun 2023
		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai di Kabupaten Tabalong	100%	3.750.958.750,00	3.750.958.750,00	3.963.946.750,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Tabalong	100%	8.481.448.120,00	9.481.448.120,00	9.770.775.120,00	
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	74,99%	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	83,00%	18.166.154.514,00	36.585.578.487,00	39.888.746.864,00	Penyesuaian terhadap Realisasi Tahun 2023
		1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengembangan dan pengelolaan sistem Pengelolaan Air minum di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengembangan dan pengelolaan sistem Pengelolaan Air minum di Kabupaten Tabalong	100%	18.166.154.514,00	36.585.578.487,00	39.888.746.864,00	
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,43%	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,43%	1.400.909.621,00	7.088.018.606,00	7.590.670.606,00	
		1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kab. Tabalong	100%	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kab. Tabalong	100%	1.400.909.621,00	7.088.018.606,00	7.590.670.606,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	80%	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	80%	477.503.906,00	477.503.906,00	598.471.906,00	
		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Tabalong	100%	477.503.906,00	477.503.906,00	598.471.906,00	
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara	65,00%	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara	65,00%	9.568.718.946,00	105.779.674.255,00	122.668.904.681,00	
		1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten Tabalong	100%	9.568.718.946,00	105.779.674.255,00	122.668.904.681,00	
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	a. Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	a. 100% b. 79,80%	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	a. Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	a. 100% b. 80,80%	189.299.632.175,00	352.588.327.281,00	424.477.173.782,00	Penyesuaian terhadap Realisasi Tahun 2023

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Tabalong	100%	189.299.632.175,00	352.588.327.281,00	424.477.173.782,00	
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	100%	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	100%	725.698.840,00	646.174.455,00	610.222.671,00	
		1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	567.045.000,00	511.528.661,00	475.576.877,00	
		1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Tabalong	100%	107.353.840,00	83.345.794,00	83.345.794,00	
		1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan terbangun Ketaatan terhadap RTRW	2% 100%	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan terbangun Ketaatan terhadap RTRW	2,07% 100%	2.974.786.675,00	2.292.504.597,00	2.397.113.497,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tabalong	100%	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tabalong	100%	2.154.433.572,00	1.632.751.072,00	1.632.751.072,00	
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	145.838.100,00	145.838.100,00	250.447.200,00	
		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	674.515.003,00	513.915.425,00	513.915.225,00	
JUMLAH								249.485.544.024,00	533.672.590.043,00	627.856.320.183,00	
1.04.2.10.1.05.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB (80)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB (84)	9.674.275.098,00	10.562.577.106,00	13.543.311.586,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	88.306.913,00	88.306.913,00	259.817.913,00	
		1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.001.206.215,00	5.535.321.000,00	5.884.998.000,00	
		1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	943.550.559,00	956.350.559,00	1.747.492.107,00	
		1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	155.604.000,00	155.604.000,00	498.594.000,00	
		1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	2.205.493.411,00	2.185.793.411,00	2.518.932.343,00	
		1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.280.114.000,00	1.641.201.223,00	2.633.477.223,00	
2	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah	100%	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah	100%	2.532.798.000,00	2.487.898.000,00	2.515.098.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	56 Unit	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	56 Unit	2.532.798.000,00	2.487.898.000,00	2.515.098.000,00		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	85,00%	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	85,00%	12.845.627.600,00	15.874.426.100,00	16.216.619.605,00		
	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	10 Ha	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	10 Ha	12.845.627.600,00	15.874.426.100,00	16.216.619.605,00		
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase permukiman yang tertata	100%	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase permukiman yang tertata	100%	7.507.800.000,00	8.499.120.000,00	8.545.616.000,00		
	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan RTLH dan PSU diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan RTLH dan PSU diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	7.507.800.000,00	8.499.120.000,00	8.545.616.000,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	100%	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	100%	80.315.914.715,00	129.536.598.103,00	201.077.587.118,00		

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Kualitas PSU di Perumahan dan Permukiman	100%	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Kualitas PSU di Perumahan dan Permukiman	100%	80.315.914.715,00	129.536.598.103,00	201.077.587.118,00	
3	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus tanah tertangani	100%	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus tanah tertangani	100%	70.074.000,00	70.074.000,00	70.074.000,00	
		2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus sengketa tahan tertangani	3 Kasus	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus sengketa tahan tertangani	3 Kasus	70.074.000,00	70.074.000,00	70.074.000,00	
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat	100%	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat	100%	21.443.405.000,00	27.699.613.000,00	33.069.677.000,00	
		2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tanah terbayar.	100%	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tanah terbayar.	100%	21.443.405.000,00	27.699.613.000,00	33.069.677.000,00	
		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase bidang tanah yang terdistribusi	100%	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase bidang tanah yang terdistribusi	100%	210.130.000,00	218.758.000,00	260.758.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah bidang tanah yang terdistribusi	350 bidang	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah bidang tanah yang terdistribusi	350 bidang	210.130.000,00	218.758.000,00	260.758.000,00	
JUMLAH								134.600.024.413,00	194.949.064.309,00	275.298.741.309,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	9.353.801.706,00	10.214.182.178,00	11.185.667.822,00	
			Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	37.836.089,00	37.836.089,00	54.248.460,00	penyesuaian honorarium pptk dan peningkatan koordinasi perencanaan
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.804.186.035,00	7.454.244.000,00	7.865.302.000,00	Penyesuaian gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan arahan dari BPKAD

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	113.965.000,00	113.965.000,00	135.041.000,00	Penambahan Belanja Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	832.251.487,00	1.023.099.194,00	1.004.928.794,00	Penambahan peralatan dan perlengkapan dan pendukung penyelenggaraan hari jadi kabupaten tabalong
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	796.625.000,00	816.099.800,00	882.479.800,00	Penambahan penunjang penyelenggaraan hari jadi kabupaten tabalong
		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	768.938.095,00	768.938.095,00	1.243.667.768,00	Penambahan Pemeliharaan gedung dan halaman kantor
2	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	a. 100%	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	a. 100%	5.229.097.200,00	5.033.490.833,00	5.132.942.339,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AN MASYARAKAT		b. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	b. 100%		b. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	b. 100%				
		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100%	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100%	4.631.961.134,00	4.440.680.973,00	4.543.556.423,00	Penambahan dukungan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan belanja pendukung penyelenggaraan hari jadi kabupaten tabalong
		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	597.136.066,00	592.809.860,00	589.385.916,00	Pergeseran ke Sekretariat
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA	a. Cakupan pencegahan penanggulangan kebakaran	a. 100%	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG	a. Cakupan pencegahan penanggulangan kebakaran	a. 100%	3.908.155.054,00	3.909.163.714,00	3.918.913.714,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	b. 5 unit	AN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	b. 6 unit				
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.908.155.054,00	3.909.163.714,00	3.918.913.714,00	Penambahan belanja jasa evakuasi dan penyelamatan
JUMLAH								18.491.053.960,00	19.156.836.725,00	20.237.523.875,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	4.562.715.728,00	4.514.261.462,00	5.586.513.706,00	
		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	49.374.000,00	49.374.000,00	49.374.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	2.185.637.728,00	2.577.414.000,00	2.717.771.000,00	Penambahan Pajak TPP
		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	625.664.369,00	626.533.031,00	1.204.785.961,00	Penambahan Meubelair Untuk Persiapan Kenaikan Tipologi dan Untuk Basarnas
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	960.670.000,00	511.910.431,00	665.632.745,00	Penambahan Untuk Kegiatan Pameran
		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	686.369.631,00	694.030.000,00	893.950.000,00	Penambahan Untuk Rehab Gedung Kantor Persiapan Kenaikan Tipologi
2	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	100%	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	100%	4.838.149.321,00	6.005.219.859,00	6.573.324.615,00	
		1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	100%	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	100%	154.757.030,00	154.757.030,00	154.757.030,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MASYARAKAT	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	3.656.119.204,00	4.616.959.204,00	5.521.328.286,00	Penambahan Alat Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban bencana	100%	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban bencana	100%	854.836.712,00	1.058.824.100,00	722.559.774,00	Pengurangan Upah Petugas Karhutla
		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	172.436.375,00	174.679.525,00	174.679.525,00	
JUMLAH								9.400.865.049,00	10.519.481.321,00	12.159.838.321,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL											
1	X.XX. NON URUSAN	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akip Persentase Penatausahaan Keuangan	BB 100%	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akip Persentase Penatausahaan Keuangan	BB 100%	7.097.494.016,00 4.251.225.356,00	7.710.639.414,00 4.856.588.000,00	9.070.409.111,00 5.183.861.000,00	
					1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 Paket	0,00	0,00	22.200.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	662.273.387,00	643.081.291,00	854.304.894,00	
		1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	264.223.211,00	296.008.061,00	426.695.395,00	Menyesuaikan kebutuhan pegawai
		1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	997.584.735,00	1.011.184.735,00	1.437.016.760,00	Penambahan belanja yang tidak tercover di induk, seperti keg.pameran, dekorasi, doorprice dll
		1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100%	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100%	922.187.327,00	903.777.327,00	1.146.331.062,00	Adanya penambahan sarana prasarana kantor
2	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	3.194.354.000,00	3.216.434.000,00	4.209.365.917,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	2 Kegiatan	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Ijin PUB dan UGB	30 Orang	80.213.000,00	80.213.000,00	80.365.000,00	Mengurangi Perjalanan Dinas dalam daerah
		1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	341 orang	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Workshop PSKS se Kabupaten Tabalong dan Kemah Bakti Karang Taruna Tingkat Kab. Tabalong	480 Orang	3.114.141.000,00	3.136.221.000,00	4.129.000.917,00	Penambahan belanja paket meeting tidak tercover untuk Workshop PSKS se Kabupaten Tabalong dan Kemah Bakti Karang taruna Tingkat Kab. Tabalong
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100%	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100%	3.900.612.610,00	4.670.661.220,00	4.083.912.610,00	
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	2871 orang	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	2871 orang	3.063.927.801,00	3.456.777.801,00	3.409.920.125,00	Adanya pengurangan jumlah alat bantu penyandang disabilitas dan tidak terlaksananya rehab.rumah singgah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Lanjutan	78 orang	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Lanjutan	78 orang	836.684.809,00	1.213.883.419,00	673.992.485,00	Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Tuna Sosial (TS) dan pengurangan paket stimulan untuk alumni klien yang berkembang
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	23.514.684.743,00	28.793.503.373,00	29.316.120.105,00	
		1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan bantuan	650 anak	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan bantuan	610 Anak	4.526.850.000,00	5.640.100.000,00	5.566.250.000,00	penghapusan perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan ini
		1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	4700 KPM	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	4700 KPM	18.987.834.743,00	23.153.403.373,00	23.749.870.105,00	penambahan pada harga beras dan telur

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100%	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial		597.813.332,00	815.263.347,00	1.075.866.847,00	
		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Baperstok untuk Keluarga Korban Bencana	5000 jiwa	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Baperstok untuk Keluarga Korban Bencana	5000 jiwa	163.578.200,00	163.578.200,00	435.137.600,00	penambahan bufferstock pada gudang untuk bencana alam dan sosial
		1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana Banjir)	5000 jiwa	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana Banjir)	5000 jiwa	434.235.132,00	651.685.147,00	640.729.247,00	penambahan bufferstock pada gudang untuk bencana alam dan sosial
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik	100%	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik		622.728.679,00	790.728.679,00	1.388.019.001,00	
		1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara, Peringatan Hari Hari Besar Nasional dan Bantuan/ Santuan bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran pada Peringatan Hari Pahlawan	2 Buah TMP dan 47 orang	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara, Peringatan Hari Hari Besar Nasional dan Bantuan/ Santuan bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran pada Peringatan Hari Pahlawan	2 Buah TMP dan 38 orang	622.728.679,00	790.728.679,00	1.388.019.001,00	Belum teranggarkan Peningkatan kapasitas wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama bagi keluarga Penuntut Kabupaten tabalong
JUMLAH								38.927.687.380,00	45.997.230.033,00	49.143.693.591,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75	7.700.172.048,00	8.097.912.264,00	15.508.308.281,00	
		2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	10 Dokumen	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	10 Dokumen	26.698.100,00	26.698.100,00	26.698.100,00	
		2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	6.092.099.784,00	6.525.960.000,00	6.788.307.000,00	
		2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
		2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	402.071.163,00	402.567.163,00	841.869.301,00	Penambahan anggaran untuk keperluan Rapat Koordinasi dan penyediaan peralatan kantor
		2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	41.902.725,00	41.902.725,00	5.986.089.952,00	penambahan anggaran untuk pembelian alat berat sebagai sarana pelatihan dan mobil untuk MTU

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	798.174.276,00	762.054.276,00	1.147.623.928,00	Penambahan anggaran untuk keperluan Rapat Koordinasi
		2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	299.226.000,00	298.730.000,00	677.720.000,00	Penambahan untuk rehab gedung
2	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	154.113.702,00	142.794.726,00	147.610.726,00	
		2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	154.113.702,00	142.794.726,00	147.610.726,00	
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri b. Jumlah Pekerja yang meningkatkan produktivitasnya	384 orang 70 orang	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri b. Jumlah Pekerja yang meningkatkan produktivitasnya	154 orang 34 orang	2.514.453.148,00	6.642.613.148,00	6.842.064.383,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	2.260.725.693,00	6.388.885.693,00	6.470.961.393,00	
		2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 Lembaga	2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30 Lembaga	87.100.000,00	87.100.000,00	87.100.000,00	
		2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	20 Perusahaan	2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	36 Lembaga	166.627.455,00	166.627.455,00	284.002.990,00	
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	500 Orang	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	750 orang	780.623.524,00	1.805.923.524,00	2.506.127.272,00	
		2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	457.688.192,00	1.461.195.604,00	2.149.552.848,00	
		2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	44%	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	44%	322.935.332,00	344.727.920,00	266.233.205,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	100%	0,00	0,00	90.341.219,00	Karena adanya TPPO pada tahun 2023 yang lalu sehingga saran dari BP3MI untuk melakukan sosialisasi terakit TPPO yang perlu di anggarkan untuk Tahun 2024
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layakPP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	87,90%	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layakPP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	87,90%	109.358.000,00	314.488.000,00	361.968.000,00	
		2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100%	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100%	62.809.000,00	267.939.000,00	267.939.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten/ Kota	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	46.549.000,00	46.549.000,00	94.029.000,00	
JUMLAH								11.258.720.422,00	17.003.731.662,00	25.366.078.662,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Kategori SAKIP b. Nilai SAKIP	a. A b. 80	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Kategori SAKIP b. Nilai SAKIP	a. A b. 80	6.746.925.471,00	7.139.611.728,00	7.790.318.623,00	-
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	14 Dokumen	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	14 Dokumen	10.580.433,00	10.580.433,00	10.580.433,00	-
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	5.134.123.743,00	5.556.910.000,00	5.708.229.000,00	Kekurangan Tunjangan Fungsional ASN
		2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	0,00	0,00	13.320.000,00	Penambahan Belanja Kain Batik untuk Hari Jadi Tabalong

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	368.704.138,00	370.674.875,00	557.409.939,00	Adanya Pergeseran Anggaran dari Sub Kegiatan Mebel dan Sub Kegiatan UPTD PPA , Pengurangan Belanja Cetak untuk dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena Banyaknya Pertemuan/Rapat/ Bimtek yang Mengharuskan ke Luar Daerah/ Provinsi sementara Perjalanan Dinas Keluar Provinsi untuk Esselon II, III dan IV sudah Habis sehingga Perlu Penambahan Dana

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%%	60.383.693,00	58.422.156,00	295.590.181,00	Penambahan Belanja Laptop, Printer, Kipas Angin, Kulkas, Lemari Arsip, dan lain-lain untuk Pembelian Sarana Prasarana Mendukung Kegiatan PUSPAGA dan UPTD PPA dan Dinas P3AP2KB
		2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan dan Aparatur terhadap Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	90%	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan dan Aparatur terhadap Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	100%	692.115.000,00	722.825.769,00	789.535.769,00	Penambahan Belanja Tagihan Listrik dan Penambahan Belanja untuk Menambah Daya Listrik (KWH Listrik)
		2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	100%	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	1	481.018.464,00	420.198.495,00	415.653.301,00	Pergeseran Anggaran dialihkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Pembelian Laptop, Meja Kantor, dll

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2.08 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase ARG pada Belanja APBD b. Persentase SKPD yang responsif gender c. IDG	a. 30% b. 100% c. 75,12	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase ARG pada Belanja APBD b. Persentase SKPD yang responsif gender c. IDG	a. 20% b. 100% c. 75,12	500.104.000,00	500.104.000,00	723.171.500,00	
		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	42 SKPD	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SKPD yang Responsive Gender		143.537.578,00	143.537.578,00	321.509.578,00	Peningkatan Kapasitas Tim teknis ARG
		2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	a. Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif b. Jumlah Desa Sadar Hukum c. Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	a. 30% b. 60 Desa c. 100%	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	a. Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif b. Jumlah Desa Sadar Hukum c. Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	a. 30% b. 60 Desa c. 100%	116.502.220,00	116.502.220,00	116.502.220,00	
		2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan	100%	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan	100%	240.064.202,00	240.064.202,00	285.159.702,00	Penambahan Belanja untuk Kegiatan Pameran Gelar Dagang/ Expo untuk Dekorasi Tenda dan Konsumsi dan Penambahan Kelengkapan pelaksanaan kegiatan FORKOMDA PUSPA

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselamatkan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselamatkan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	221.332.408,00	335.905.033,00	342.342.872,00	
		2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian Bersama	100%	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian Bersama	100%	131.400.000,00	140.815.000,00	148.075.000,00	Kaji Tiru dalam Rangka Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten
		2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	24.932.408,00	130.090.033,00	129.267.872,00	Pergeseran Anggaran ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Belanja Modal Keperluan UPTD PPA
		2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Pergeseran didalam Sub Kegiatan untuk Belanja Paket Meeting Kepala Daerah dan Uang Saku Peserta dirubah Menjadi Uang Saku Paket Meeting

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG	86,1	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG	86,1	227.929.000,00	230.429.000,00	431.248.131,00	
		2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100%	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100%	174.205.397,00	176.705.397,00	186.605.397,00	Penambahan Belanja untuk Pengganti Transport dalam Penilaian Akhir Evaluasi Provinsi di Desa Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga serta Penambahan Konsumsi untuk Masyarakat dalam mendukung Penilaian TPK2D Tingkat Provinsi di Desa
		2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	12 Kecamatan	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	12 Kecamatan	53.723.603,00	53.723.603,00	244.642.734,00	Penambahan Kegiatan Sosialisasi PUSPAGA pada 6 Kecamatan Karena Pada Anggaran Induk Tidak Mencukupi untuk Sosialisasi PUSPAGA pada 12 Kecamatan sedangkan Target IKU Sosialisasi untuk 12 Kecamatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase SKPD yang mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase SKPD yang mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%	150.586.000,00	150.586.000,00	180.686.000,00	
		2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SKPD yang Membuat Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	30 SKPD	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SKPD yang Membuat Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	30 SKPD	150.586.000,00	150.586.000,00	180.686.000,00	Penambahan untuk kegiatan Validasi Data Gender dan Anak
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)		559.800.000,00	559.800.000,00	939.899.000,00	
		2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	523.919.000,00	Memberikan Apresiasi atau Penghargaan untuk Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang Memberikan Data KIA
		2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	409.800.000,00	409.800.000,00	415.980.000,00	Memberikan Apresiasi atau Penghargaan untuk PRAP Tingkat Nasional

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Indeks Perlindungan Anak b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	a. 68,03 b. 100%	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Indeks Perlindungan Anak b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	a. 68,03 b. 100%	108.503.952,00	513.931.327,00	522.177.327,00	
		2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	57 Desa/ Kelurahan	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	57 Desa/ Kelurahan	75.000.000,00	195.585.000,00	210.673.000,00	Pengambilan Penghargaan Standarisasi PATBM Tingkat Provinsi
		2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	33.503.952,00	229.946.327,00	223.104.327,00	Dialihkan Ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya untuk Belanja Modal dan Ada Pergeseran dalam Sub Kegiatan
					2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1 Dokumen	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Dana DAK Non Fisik,- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Laju Pertumbuhan Penduduk b. Indeks Pembangunan Keluarga c. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) d. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate /TFR</i>) Per WUS usia 15-49 Tahun	a. 1,44% b. 64,55 c. 29 d. 2,12	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Laju Pertumbuhan Penduduk b. Indeks Pembangunan Keluarga c. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) d. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate /TFR</i>) Per WUS usia 15-49 Tahun	a. 1,44% b. 64,55 c. 29 d. 2,12	188.312.400,00	394.552.400,00	441.148.400,00	
		2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	a. Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk b. Rapat/Pertemuan Program Bangsa Kencana	a. 3 SSK b. 6 Keg	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	a. Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk b. Rapat/Pertemuan Program Bangsa Kencana	a. 3 SSK b. 6 Keg	72.850.352,00	72.850.352,00	107.336.352,00	Branchmarketing TPPS Kabupaten Tabalong ke TPPS dengan Penilaian Konvergensi Terbaik di Indonesia
		2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian	a. Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat	a. 90 Orang	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian	a. Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat	a. 90 Orang	115.462.048,00	321.702.048,00	333.812.048,00	Penambahan Honor PPTK yang belum teranggarkan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendewasaan Usia Perkawinan b. Persentase Pelaporan Tepat Waktu	b. 100%	Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendewasaan Usia Perkawinan b. Persentase Pelaporan Tepat Waktu	b. 100%				pada RKPD Induk
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP b. Cakupan Peserta KB yang Aktif c. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) d. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	a. 20 b. 82,28% c. 82,28 d. 7,57 %	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP b. Cakupan Peserta KB yang Aktif c. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) d. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	a. 20 b. 82,28% c. 82,28 d. 7,57 %	1.610.936.000,00	5.480.119.000,00	6.044.135.000,00	
		2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	216.036.000,00	1.432.036.000,00	1.603.747.000,00	Penambahan Pada Honor PPTK
		2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	a. Persentase PPKBD Aktif b. Persentase Sub PPKBD Aktif	a. 95,4% b. 66,9%	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	a. Persentase PPKBD Aktif b. Persentase Sub PPKBD Aktif	a. 95,4% b. 66,9%	1.109.950.000,00	1.502.950.000,00	1.502.950.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lapangan KB (PKB/PLKB)			Lapangan KB (PKB/PLKB)						
		2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peserta KB Aktif	82%	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peserta KB Aktif	82%	236.450.000,00	2.207.883.000,00	2.588.908.000,00	Penambahan Anggaran Jasa Medis dan Makan Minum Pelayanan KB Karena Anggaran Sebelumnya sudah Habis
		2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Akseptor pada Kampung KB	82%	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Akseptor pada Kampung KB	82%	48.500.000,00	337.250.000,00	348.530.000,00	Penambahan Pada Honor PPTK
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL) b. Cakupan Anggota UPPKS yang ber - KB	a. 80 b. 92%	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL) b. Cakupan Anggota UPPKS yang ber - KB	a. 80 b. 92%	134.065.000,00	1.730.065.000,00	1.745.365.000,00	
		2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui	a. 'Persentase BKB yang Aktif b. Persentase BKR yang Aktif	a. 100% b. 80%	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui	a. 'Persentase BKB yang Aktif b. Persentase BKR yang Aktif	a. 100% b. 80%	92.500.000,00	478.900.000,00	494.200.000,00	Penambahan Belanja untuk Kegiatan Bimbingan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	c. Persentase BKL yang Aktif	c. 80%	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	c. Persentase BKL yang Aktif	c. 80%				Teknis bertempat di Hotel Aston
		2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	41.565.000,00	1.251.165.000,00	1.251.165.000,00	-
JUMLAH								10.448.494.231,00	17.035.103.488,00	19.160.491.853,00	
2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	B (75)	28.399.999.498,00	29.522.834.365,00	33.723.713.758,00	Penambahan anggaran untuk bimtek / sosialisasi perencanaan, penambahan kekurangan belanja TPP ASN, Penambahan anggaran belanja modal peralatan kantor untuk gedung kantor baru

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	455.154.118,00	529.630.932,00	619.361.370,00	Penambahan anggaran untuk bimtek / sosialisasi perencanaan
		2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	21.772.045.579,00	21.835.274.000,00	24.233.771.000,00	Kekurangan belanja TPP ASN
		2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat Pegawai	10 orang	2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat Pegawai	29 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	306.218.951,00	Penyesuaian antara peserta diklat dengan anggaran diklat
		2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	112 unit	1.737.983.582,00	1.841.552.198,00	2.415.245.444,00	Penambahan anggaran belanja modal peralatan kantor untuk gedung kantor baru
		2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	124 unit	2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	202 unit	1.290.849.986,00	704.326.720,00	1.874.805.106,00	Penambahan anggaran belanja modal peralatan kantor untuk gedung kantor baru
		2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa telepon / internet, jasa air dan jasa listrik	12 bulan	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa telepon / internet, jasa air dan jasa listrik	12 bulan	1.383.040.000,00	2.725.442.400,00	2.630.542.400,00	Penambahan anggaran belanja air PDAM
		2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	88 unit	1.610.926.233,00	1.736.608.115,00	1.643.769.487,00	Penambahan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan	B	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan	84,72	1.150.000.000,00	1.098.118.181,00	1.641.530.069,00	Penambahan anggaran rehab gudang CPP, pembuatan lantai jemur
		2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan lumbung pangan yang terbina	4 kelompok	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan lumbung pangan yang terbina	5 kelompok	1.150.000.000,00	1.098.118.181,00	1.641.530.069,00	Penambahan anggaran rehab gudang CPP, pembuatan lantai jemur
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,9	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,9	910.000.000,00	869.833.614,00	1.169.267.049,00	Penambahan anggaran peralatan dan perlengkapan gudang CPP
		2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya kelembagaan PUPM	5 kelompok	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya kelembagaan PUPM	5 kelompok	232.400.000,00	217.433.614,00	360.485.444,00	Penambahan anggaran peralatan dan perlengkapan gudang CPP

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas pangan lokal yang dikembangkan	4 komoditas	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas pangan lokal yang dikembangkan	4 komoditas	677.600.000,00	652.400.000,00	808.781.605,00	Penambahan anggaran pembenahan pekarangan kantor (kebun B2SA,
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa tahan pangan	100 %	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN PANGAN	Persentase Desa tahan pangan	100%	192.000.000,00	166.800.000,00	316.260.679,00	Penambahan anggaran penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan, monev ke Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)
		2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan kerawanan pangan	1 dokumen	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan kerawanan pangan	1 dokumen	192.000.000,00	166.800.000,00	316.260.679,00	Penambahan anggaran penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan, monev ke Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	90%	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	90%	270.000.000,00	269.495.454,00	334.576.197,00	Penambahan anggaran kaji tiru keamanan pangan
		2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas PSAT yang terawasi	8 komoditas	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas PSAT yang terawasi	8 komoditas	270.000.000,00	269.495.454,00	334.576.197,00	Penambahan anggaran kaji tiru keamanan pangan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	2.163,41 ton	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	2.163,4 ton	417.889.000,00	392.689.000,00	444.719.732,00	Penambahan anggaran lomba memancing dalam rangka peringatan Hari Jadi Tabalong
		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan	375 buah / set	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan	392 buah / set	417.889.000,00	392.689.000,00	444.719.732,00	Penambahan anggaran lomba memancing dalam rangka peringatan Hari Jadi Tabalong
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.053,2 ton	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18053,2 ton	4.401.750.000,00	6.507.776.238,00	8.541.151.265,00	Penambahan anggaran paket sarana produksi budidaya ikan, penambahan anggaran belanja pakan ikan, pembangunan gudang pakan ikan, kantor UPTD dan rehab kolam ikan
		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya sarana produksi budidaya pembersaran ikan	8 paket	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya sarana produksi budidaya pembersaran ikan	38 paket	3.251.750.000,00	3.201.350.000,00	4.546.232.911,00	Penambahan anggaran paket sarana produksi budidaya ikan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi bibit ikan UPTD PBAT	700.000 ekor	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi bibit ikan UPTD PBAT	700.000 ekor	1.150.000.000,00	3.306.426.238,00	3.994.918.354,00	Penambahan anggaran belanja pakan ikan, pembangunan gudang pakan ikan, kantor UPTD dan rehab kolam ikan
		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	0 kali	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	0 kali	884.795.460,00	479.680.270,00	599.193.172,00	Penambahan anggaran operasional pengawasan perikanan dan sarana pengawasan
		3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	884.795.460,00	479.680.270,00	599.193.172,00	Penambahan anggaran operasional pengawasan perikanan dan sarana pengawasan
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	32 ton	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	32 ton	2.084.329.747,00	1.285.188.781,00	1.553.385.922,00	Penambahan anggaran bimtek pengolahan hasil perikanan dan bazaar hasil perikanan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	3 kali	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	10 kali	2.084.329.747,00	1.285.188.781,00	1.553.385.922,00	Penambahan anggaran bimtek pengolahan hasil perikanan dan bazaar hasil perikanan
4	3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun: a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Bawang merah e. Cabai rawit f. Cabai besar g. Karet (sheet) h. Lada (biji kering)	a. 4,7 ton/ha b. 3,72 ton/ha c. 1 ton/ha d. 7 ton/ha e. 4,72 ton/ha f. 8,55 ton/ha g. 1 ton/ha h. 210 kg/ha	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun: a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Bawang merah e. Cabai rawit f. Cabai besar g. Karet (sheet) h. Lada (biji kering)	a. 4,80 b. 4,05 c. 1,15 d. 7,30 e. 8,80 f. 5,50 g. 1 ton/ha h. 210 kg/ha	10.601.573.716,00	9.794.085.894,00	16.788.749.779,00	Penambahan anggaran anggaran simprodi bibit padi untuk penanggulangan an bencana, saprodi bawang merah, saprodi cabai rawit tiung tanjung, saprodi padi gogo, saprodi kampung horti, saprodi jagung, alsintan
		3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diberikan kepada masyarakat	5 unit	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diberikan kepada masyarakat	132 unit	8.097.875.000,00	7.864.418.460,00	12.999.642.369,00	Penambahan anggaran saprodi bibit padi untuk penanggulangan bencana, saprodi bawang merah, saprodi cabai rawit tiung tanjung, saprodi padi gogo, saprodi kampung horti, saprodi jagung, alsintan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	12 VUB	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	15 VUB	2.503.698.716,00	1.929.667.434,00	3.789.107.410,00	Penambahan anggaran honor PPTK, anggaran bimtek, studi tiru dan kaji tiru
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	68%	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	70%	7.755.267.265,00	10.767.814.931,00	15.007.254.120,00	Penambahan anggaran pembuatan saluran irigasi dan JUT
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	68%	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6.714 hektar	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	-
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembuatan jalan, jaringan dan irigasi	200 m	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembuatan jalan, jaringan dan irigasi	58 unit	7.755.267.265,00	10.673.314.931,00	14.912.754.120,00	Penambahan anggaran pembuatan saluran irigasi dan JUT
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	100%	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	40%	607.336.800,00	604.795.641,00	853.905.730,00	Penambahan anggaran bahan pengendali organik, anggaran perjadiin biasa, alat laboratorium
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas areal pengendalian bencana pertanian	1.482 ha	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas areal pengendalian bencana pertanian	2500 hektar	607.336.800,00	604.795.641,00	853.905.730,00	Penambahan anggaran bahan pengendali organik, anggaran perjadiin biasa, alat laboratorium

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	35%	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	35%	1.600.000.000,00	1.756.351.830,00	3.049.416.530,00	Penambahan anggaran demplot BPP, bimtek PPS, plang nama BPP, kegiatan Kostrada, honor petugas Simluhtan, drone, personal computer, printer
		3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat nilainya	1 unit (1 BPP)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat nilainya	1 unit	1.600.000.000,00	1.756.351.830,00	3.049.416.530,00	Penambahan anggaran demplot BPP, bimtek PPS, plang nama BPP, kegiatan Kostrada, honor petugas Simluhtan, drone, personal computer, printer
JUMLAH								59.274.941.486,00	63.515.464.199,00	84.023.124.002,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
1	X.XX. NON URUSAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	A (82)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	A (80)	14.115.131.443,00	15.563.217.795,00	15.905.016.893,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	8 dokumen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	8 dokumen	44.651.500,00	44.651.500,00	23.625.000,00	
		2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan tepat waktu	4 laporan	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan tepat waktu	4 laporan	10.679.855.532,00	12.076.135.000,00	11.303.388.000,00	
		2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	587.028.971,00	684.915.855,00	1.471.899.742,00	
		2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan umum	12 bulan	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan umum	12 bulan	2.333.086.520,00	2.287.006.520,00	2.637.835.231,00	
		2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dipelihara	40 unit	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dipelihara	40 unit	470.508.920,00	470.508.920,00	468.268.920,00	
2	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Adanya dokumen perencanaan LH yang updating	2 dokumen	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Adanya dokumen perencanaan LH yang updating	2 dokumen	155.898.020,00	655.898.020,00	755.898.020,00	
		2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH tersedia	1 dokumen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH tersedia	1 dokumen	155.898.020,00	155.898.020,00	155.898.020,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS tersedia		2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS tersedia	1 dokumen	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	Penyusunan KLHS untuk RDTR Kelua
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara	61 89,5	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara	61 89,5	11.692.825.959,00	11.594.939.075,00	11.794.938.609,00	
		2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara	a. 61 b. 89,5	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara	61 89,5	11.527.826.077,00	11.429.939.193,00	11.529.938.955,00	
		2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kampung iklim yang dibina	2 kampung iklim	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kampung iklim yang dibina	2 kampung iklim	164.999.882,00	164.999.882,00	264.999.654,00	
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	67,5	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	67,5	4.463.336.325,00	7.248.836.621,00	15.432.423.203,00	
		2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Adanya dokumen pengelolaan kehati	1 dokumen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Adanya dokumen pengelolaan kehati	1 dokumen	4.463.336.325,00	7.248.836.621,00	15.432.423.203,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	70%	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	70%	457.199.930,00	457.199.930,00	632.199.930,00	
		2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan LB3	24 pelaku usaha kegiatan	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan LB3	24 pelaku usaha kegiatan	457.199.930,00	457.199.930,00	632.199.930,00	
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	194.919.852,00	194.919.852,00	184.319.852,00	
		2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatan terhadap PPLH	82 pelaku usaha	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatan terhadap PPLH	82 pelaku usaha	194.919.852,00	194.919.852,00	184.319.852,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Adanya penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1 kelompok	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Adanya penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1 kelompok	100.015.840,00	100.015.840,00	156.950.840,00	
		2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	1 kelompok	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	1 kelompok	100.015.840,00	100.015.840,00	156.950.840,00	
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	80%	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	80%	347.659.959,00	347.659.959,00	453.125.909,00	
		2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sekolah yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	73 sekolah adiwiyata	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sekolah yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	73 sekolah adiwiyata	347.659.959,00	347.659.959,00	453.125.909,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	90%	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	194.919.684,00	194.919.684,00	134.909.684,00	
		2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	10 kasus	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	10 kasus	194.919.684,00	194.919.684,00	134.909.684,00	
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan sampah	a. 30%	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan sampah	30%	28.467.098.647,00	29.912.778.647,00	31.440.655.483,00	
			b. Persentase Penanganan sampah	b. 70%		b. Persentase Penanganan sampah	70%				
		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah kabupaten	30%	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah kabupaten	70%	28.467.098.647,00	29.912.778.647,00	31.440.655.483,00	
JUMLAH								60.189.005.659,00	66.270.385.423,00	76.890.438.423,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	X.XX. NON URUSAN	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	85/A	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	85/A	8.843.716.558,00	11.087.075.630,00	12.651.987.879,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, Pen ganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok/lap	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, Pen ganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8.990.080,00	8.990.080,00	8.990.080,00	
		2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	12 bulan	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	12 Bulan	5.070.544.590,00	5.590.590.000,00	6.001.495.956,00	
		2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150 Orang	103.750.000,00	103.750.000,00	142.524.364,00	Menyesuaikan penyebutan satuan dengan Renja Disdukcapil Tahun 2024 Perubahan
		2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42 Paket	1.110.619.210,00	2.370.579.025,00	3.043.459.581,00	Menyesuaikan penyebutan satuan dengan Renja Disdukcapil Tahun 2024 Perubahan
		2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223 Unit	247.160.656,00	760.530.406,00	911.621.326,00	Untuk melengkapi kebutuhan kantor

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	12 bulan	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.004.696.119,00	1.969.116.119,00	2.147.216.572,00	
		2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	62 Unit	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	60 Unit	297.955.903,00	283.520.000,00	396.680.000,00	Menyesuaikan kebutuhan dinas
2	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Persentase Cakupan kepemilikan KTP Elektronik b. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga c. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	a. 100% b. 100% c. 100%	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Persentase Cakupan kepemilikan KTP Elektronik b. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga c. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	a. 100% b. 100% c. 78%	356.504.264,00	356.504.264,00	287.444.400,00	
		2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen kependudukan yang terbit	36.500 dokumen dan 2 Laporan	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen kependudukan yang terbit	37.890 Dokumen dan 2 Laporan	348.224.264,00	348.224.264,00	281.414.400,00	
		2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Kecamatan	2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Kecamatan	8.280.000,00	8.280.000,00	6.030.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran b. Persentase cakupan akta kelahiran anak 0-18 tahun c. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan d. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan e. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	a.70% b. 100% c.100% d.100% e.100%	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran b. Persentase cakupan akta kelahiran anak 0-18 tahun c. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan d. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan e. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	a. 70% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%	153.650.000,00	153.650.000,00	77.750.000,00	
		2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	135.680.000,00	135.680.000,00	64.430.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.03.2.02 Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan Kutipan aktanya	100%	2.12.03.2.02 Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan Kutipan aktanya	100%	10.620.000,00	10.620.000,00	7.470.000,00	
		2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Kecamatan	2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Kecamatan	7.350.000,00	7.350.000,00	5.850.000,00	
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase validitas database kependudukan b. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) c. Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	a.100% b. Sangat Puas (92) c. 100%	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase validitas database kependudukan b. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) c. Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	a. 100% b. Sangat Puas (92) c. 100%	3.271.670.996,00	3.285.813.974,00	4.266.063.545,00	
		2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	40 SKPD	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	40 SKPD	44.679.802,00	49.639.802,00	56.508.002,00	
		2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	12 survey 50 peserta 1 Inovasi	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	24 Survey 131 Peserta 1 Inovasi	287.387.897,00	261.404.562,00	434.821.170,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan		Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan					
		2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan SIAK (Jaringan siak kab dan kec dalam kondisi baik dan peralatan siak hard dan soft ware dalam kondisi baik,update data kependudukan 25 desa	100 % 100 % 25 desa	2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan SIAK (Jaringan siak kab dan kec dalam kondisi baik dan peralatan siak hard dan soft ware dalam kondisi baik,update data kependudukan 25 desa	100% 100% 25 Desa	2.939.603.297,00	2.974.769.610,00	3.774.734.373,00	
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	15 laporan	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	15 Laporan	80.380.000,00	63.530.000,00	74.234.000,00	
		2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan data dan profil perkembangan kependudukan	15 Laporan	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan data dan profil perkembangan kependudukan	15 Laporan	80.380.000,00	63.530.000,00	74.234.000,00	
JUMLAH								12.705.921.818,00	14.946.573.868,00	17.357.479.824,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Nilai IKM b. Nilai Lakip	a. B b. BB	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Nilai IKM b. Nilai Lakip	a. B b. BB	6.068.406.203,00	6.734.343.645,00	7.544.166.384,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	21.275.256,00	16.011.256,00	0,00	Anggaran dialihkan ke Sub Kegiatan lain dan Target tetap ada di dukung anggaran dari sub kegiatan Pelayanan Pelayan Umum Kantor
		2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	4.040.152.453,00	4.928.875.000,00	5.307.160.000,00	
		2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	825.604.181,00	825.603.076,00	1.207.206.668,00	
		2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	552.525.396,00	526.005.396,00	501.950.799,00	
		2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	628.848.917,00	437.848.917,00	527.848.917,00	
2	2.13 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	a. Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa	a. 121 desa	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	a. Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa	a. 121 desa	4.522.079.680,00	9.391.639.680,00	18.249.211.680,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MASYARAKAT DAN DESA		b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	b. 2 buah c. 0 kawasan		b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	b. 7 buah c. 0 kawasan				
		2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	a. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya	a. 100% b. 2 buah c. 121 Desa	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	a. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya	a. 100% b. 7 buah c. 121 Desa	4.522.079.680,00	9.391.639.680,00	18.249.211.680,00	
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Kerjasama a	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Kerjasama a	274.999.874,00	424.999.874,00	424.999.719,00	
		2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat	1 Kerjasama	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat	1 Kerjasama	274.999.874,00	424.999.874,00	424.999.719,00	
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	80%	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	80%	2.602.980.118,00	2.859.180.118,00	4.337.734.346,00	
		2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	a. Persentase desa dengan perencanaan yang baik	a. 90%	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	a. Persentase desa dengan perencanaan yang baik	a. 90%	2.602.980.118,00	2.859.180.118,00	4.337.734.346,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Administrasi Pemerintahan Desa	b. Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik c. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik d. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik	b. 90% c. 90% d. 90%	Administrasi Pemerintahan Desa	b. Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik c. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik d. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik	b. 90% c. 90% d. 90%				
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	80%	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	80%	1.974.958.904,00	2.124.958.904,00	2.290.860.209,00	
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	a. Jumlah BUM Desa yang terbentuk b. Persentase BUM Desa yang aktif c. Persentase BUM Desa yang berkembang d. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM e. Persentase LPM aktif	a. 121 Bum Desa b. 75% c. 70% d. 5 kelompok e. 30%	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	a. Jumlah BUM Desa yang terbentuk b. Persentase BUM Desa yang aktif c. Persentase BUM Desa yang berkembang d. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM e. Persentase LPM aktif	a. 121 Bum Desa b. 75% c. 70% d. 5 kelompok e. 30%	1.974.958.904,00	2.124.958.904,00	2.290.860.209,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	f. Persentase LPM berprestasi g. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK h. Persentase PKK aktif i. Persentase Posyandu aktif j. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat k. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	f. 1 Kelompok g. 4 Kelompok h. 100% i. 100% j. 45% k. 45%	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	f. Persentase LPM berprestasi g. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK h. Persentase PKK aktif i. Persentase Posyandu aktif j. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat k. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	f. 1 Kelompok g. 4 Kelompok h. 100% i. 100% j. 45% k. 45%				
JUMLAH								15.443.424.779,00	21.535.122.221,00	32.846.972.338,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN											
1	X.XX. NON URUSAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	78 BB	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	78 BB	11.335.623.897,00	12.244.110.124,00	13.932.775.870,00	
		2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	21 Dok	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	21 Dok	65.000.000,00	80.754.445,00	130.754.445,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	5.737.016.433,00	6.587.667.000,00	7.593.878.000,00	
		2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	76.314.000,00	76.314.000,00	115.900.000,00	
		2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan. b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. d. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didalam dan diluar Daerah.	a. 79 BB b. 82 item c. 9 item d. 180 orang	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan. b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. d. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didalam dan diluar Daerah.	a. 79 BB b. 82 item c. 9 item d. 180 orang	712.006.659,00	717.339.301,00	1.024.531.455,00	
		2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	a. 30 item/tahun b. 12 bln	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	a. 30 item/tahun b. 12 bln	4.190.461.797,00	4.227.210.370,00	4.536.561.644,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah.	36 Unit, 27 item	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah.	36 Unit, 27 item	554.825.008,00	554.825.008,00	531.150.326,00	
2	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Perhubungan b. Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi Di Jalan Raya c. Persentase Layanan Angkutan dan Multimoda d. Meningkatnya Pergerakan Orang dan Barang yang melalui bandara Warukin	100% 4.400 KBWU 100% 2.500 / 42.000	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Perhubungan b. Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi Di Jalan Raya c. Persentase Layanan Angkutan dan Multimoda d. Meningkatnya Pergerakan Orang dan Barang yang melalui bandara Warukin	100% 4.400 KBWU 100% 2.500 / 42.000	4.227.858.127,00	4.731.662.109,00	9.670.929.943,00	
		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	a. Terpenuhinya Rambu Standar. b. Terpenuhinya Cermin Tikung. c. Terpenuhinya Water Barrier.	a. 500 buah b. 5 buah c. 20 buah	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	a. Terpenuhinya Rambu Standar. b. Terpenuhinya Cermin Tikung. c. Terpenuhinya Water Barrier.	a. 500 buah b. 5 buah c. 20 buah	539.999.868,00	1.139.999.835,00	1.139.999.835,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			d. Terpenuhinya Guadrill e. Terpenuhinya Traficon. f. Terpenuhinya Marka Tikungan g. Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan.	d. 0 buah e. 10 buah f. 40 M2 g. 510 buah		d. Terpenuhinya Guadrill e. Terpenuhinya Traficon. f. Terpenuhinya Marka Tikungan g. Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan.	d. 0 buah e. 10 buah f. 40 M2 g. 510 buah				
		2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	a. Kontribusi PAD sektor retribusi pengguna jasa/fasilitas terminal. b. Persentase terhadap 3 terminal yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	a. 73810000 b. 100%	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	a. Kontribusi PAD sektor retribusi pengguna jasa/fasilitas terminal. b. Persentase terhadap 3 terminal yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	a. 73810000 b. 100%	30.000.000,00	24.584.109,00	24.584.109,00	
		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	a. Terlaksananya peningkatan, pengelolaan dan penataan titik (lokasi) parkir b. Kontribusi PAD sektor Retribusi Parkir.	a. 15 Titik Parkir b. 490.654.516	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	a. Terlaksananya peningkatan, pengelolaan dan penataan titik (lokasi) parkir b. Kontribusi PAD sektor Retribusi Parkir.	a. 15 Titik Parkir b. 490.654.516	75.000.000,00	75.083.249,00	75.083.249,00	
		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	a. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah melakukan pengujian.	a. 4.500 KBWU	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	a. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah melakukan pengujian.	a. 4.500 KBWU	791.604.982,00	1.050.000.000,00	1.190.160.245,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Kontribusi PAD Sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	b. 953.900.000		b. Kontribusi PAD Sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	b. 953.900.000				
		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	a. Tersedianya Rambu. b. Tersedianya Marka. c. Terpeliharanya Peralatan <i>Out Door Area Traffic Control System / RHK</i>	a. 52 buah b. 1.583 M2 c. 2 lokasi	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	a. Tersedianya Rambu. b. Tersedianya Marka. c. Terpeliharanya Peralatan <i>Out Door Area Traffic Control System / RHK</i>	a. 52 buah b. 1.583 M2 c. 2 lokasi	634.854.513,00	545.759.662,00	5.002.425.015,00	
		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Andalalin	1 Dokumen	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Andalalin	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
		2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	a. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal. b. Tersedianya data laporan hasil Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan	a. 3 Dokumen b. 3 Dokumen / Lembaga	2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	a. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal. b. Tersedianya data laporan hasil Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan	a. 3 Dokumen b. 3 Dokumen / Lembaga	259.970.356,00	333.314.880,00	400.762.880,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bermotor Kabupaten/Kota. c. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	b. 3 Dokumen / Lembaga		Bermotor Kabupaten/Kota. c. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	b. 3 Dokumen / Lembaga				
		2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Unit Angkutan.	43 Unit	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Unit Angkutan.	43 Unit	1.753.483.007,00	1.419.974.973,00	1.694.977.209,00	
		2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Draf Raperda dan/atau Raperbup..	36 Dokumen	2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Draf Raperda dan/atau Raperbup..	36 Dokumen	37.945.410,00	37.945.410,00	37.945.410,00	
		2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi PAD sektor Retribusi Perizinan Angkutan / Trayek.	25.000.000	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1 Laporan	59.999.991,00	59.999.991,00	59.991.991,00	karena Tidak diPungut Lagi Retribusi Izin Trayek (Gratis)

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota					
JUMLAH								15.563.482.024,00	16.975.772.233,00	23.603.705.813,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	A	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	A	8.449.277.671,00	8.505.932.402,00	9.669.299.171,00	
		2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	83.575.000,00	73.575.000,00	73.575.000,00	
		2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	6.227.626.724,00	6.264.483.000,00	6.660.095.000,00	Arahan dari Bidang Anggaran BPKAD untuk Penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan Keuangan, Arahan dari Bidang Anggaran BPKAD
		2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	115.000.000,00	155.000.000,00	303.500.000,00	Pengadaan Barang dan Jasa menyesuaikan dengan indikator Sub Kegiatan, pergeseran dari bidang

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	657.341.593,00	586.904.659,00	826.440.282,00	Pengadaan Barang dan Jasa menyesuaikan dengan Indikator Sub Kegiatan, pergeseran dari bidang
		2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	7 Unit	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	15 Unit	201.625.000,00	123.295.776,00	342.002.781,00	Pengadaan Barang dan Jasa menyesuaikan dengan Indikator Sub Kegiatan, pergeseran dari bidang
		2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	1 Tahun	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	1 Tahun	644.523.500,00	782.611.200,00	796.623.341,00	Pengadaan Barang dan Jasa menyesuaikan dengan Indikator Sub Kegiatan dan sebagian kegiatan tidak teranggarkan pada Induk
		2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	519.585.854,00	520.062.767,00	667.062.767,00	Pengadaan Barang dan Jasa menyesuaikan dengan Indikator Sub Kegiatan dan sebagian kegiatan tidak teranggarkan pada Induk

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2.16 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase, Jumlah Informasi dan Berita yang ditangani	100%	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase, Jumlah Informasi dan Berita yang ditangani	100%	5.610.480.496,00	6.976.722.496,00	7.356.722.496,00	
		2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	5.610.480.496,00	6.976.722.496,00	7.356.722.496,00	Penambahan Anggaran Kontrak kerjasama dengan Media Cetak dan Media Online Lokal, Regional dan Nasional serta penambahan anggaran dalam rangka dukungan hari jadi Kabupaten Tabalong tahun 2024.
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase terlaksananya Program Aplikasi Informatika	100%	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase terlaksananya Program Aplikasi Informatika	100%	4.807.986.644,00	5.477.338.972,00	5.692.363.864,00	penambahan pembelian perangkat peralatan jaringan dan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.875.955.568,00	3.412.755.568,00	4.045.402.026,00	perangkat firewall server, serta terdapat pergeseran anggaran dari sub keg. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik ke sub keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yaitu perjalanan Dinas untuk peningkatan kompetensi SDM yaitu pelatihan Firewall

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.932.031.076,00	2.064.583.404,00	1.646.961.838,00	1. terdapat pengurangan anggaran dikarenakan digeser ke sub kegiatan lain, yaitu pada sub keg. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik ke sub keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yaitu perjalanan Dinas untuk peningkatan kompetensi SDM yaitu pelatihan <i>Firewall</i> dan ke Sekretariat untuk biaya kontribusi Pelatihan <i>Firewall</i> dan Pengurangan sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas ada beberapa item di pindahkan ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	482.499.020,00	612.498.420,00	546.878.832,00	
		2.20.02.201 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik	100%	2.20.02.201 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik	100%	482.499.020,00	612.498.420,00	546.878.832,00	Penyesuaian bimtek statistik dengan agenda pertemuan forum satu data ke-2 tahun 2024
4	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandian di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandian di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	244.523.000,00	195.760.429,00	361.308.364,00	
		2.21.02.201 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen yang diterima dan diamankan	50 Dokumen	2.21.02.201 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen yang diterima dan diamankan	50 Dokumen	244.523.000,00	195.760.429,00	361.308.364,00	Penambahan jasa konsultasi untuk analisis/assessment keamanan informasi
JUMLAH								19.594.766.831,00	21.768.252.719,00	23.626.572.727,00	
2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
1	X.XX. NON URUSAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	14.488.262.130,00	15.379.504.810,00	16.569.089.506,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	67.540.000,00	71.620.000,00	195.673.042,00	
		2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai	12 bulan	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai	12 bulan	11.314.627.070,00	12.104.478.000,00	12.493.911.000,00	
		2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	912.352.334,00	911.822.184,00	1.444.782.819,00	
		2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.477.271.879,00	1.559.494.379,00	1.478.929.379,00	
		2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	716.470.847,00	732.090.247,00	955.793.266,00	
2	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif	67,16%	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif	67,16%	76.937.000,00	76.937.000,00	103.588.728,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90%	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90%	76.937.000,00	76.937.000,00	103.588.728,00	
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	16 KSP/USP	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	16 KSP/USP	91.400.000,00	91.400.000,00	98.453.923,00	
		2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 KSP/USP	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 KSP/USP	91.400.000,00	91.400.000,00	98.453.923,00	
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	40%	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	40%	139.744.000,00	139.744.000,00	176.038.349,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	139.744.000,00	139.744.000,00	176.038.349,00	
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	100%	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	100%	180.854.960,00	180.854.960,00	164.694.960,00	
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	4 kegiatan	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	4 kegiatan	180.854.960,00	180.854.960,00	164.694.960,00	
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	100 UMKM	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	100 UMKM	830.000.000,00	816.720.000,00	1.649.240.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	830.000.000,00	816.720.000,00	1.649.240.000,00	
3	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	88%	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	88%	57.402.000,00	57.402.000,00	69.666.000,00	
		3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	2	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	2	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
		3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	24.784.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	18.402.000,00	18.402.000,00	22.882.000,00	
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	85%	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	85%	6.266.955.169,00	28.433.592.145,00	30.333.592.145,00	
		3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Melaksanakan pemenuhan kriteria pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	5 Unit	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Melaksanakan pemenuhan kriteria pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	5 Unit	5.488.073.519,00	27.661.350.495,00	29.220.911.249,00	
		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	7 dokumen	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	7 dokumen	778.881.650,00	772.241.650,00	1.112.680.896,00	
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	a. 9,21 %	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	a. 9,21 %	234.413.000,00	957.783.000,00	1.220.977.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	b. Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	b. 1,1%	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	b. Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	b. 1,1%				
		3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	16.913.000,00	16.913.000,00	77.987.000,00	
		3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	197.500.000,00	920.870.000,00	1.122.990.000,00	
		3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%	93.557.000,00	93.557.000,00	86.487.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk yang siap Ekspor	10	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk yang siap Ekspor	10	93.557.000,00	93.557.000,00	86.487.000,00	
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	70%	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	70%	310.000.000,00	298.400.000,00	440.905.607,00	
		3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1725	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1725	310.000.000,00	298.400.000,00	440.905.607,00	
4	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	8,25%	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	8,25%	1.450.000.000,00	1.542.107.500,00	2.544.702.197,00	
		3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Pertambahan industri baru	40 WUB	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Pertambahan industri baru	40 WUB	1.450.000.000,00	1.542.107.500,00	2.544.702.197,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	70%	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	70%	125.000.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00	
		3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan Berusaha Industri yang di Fasilitasi secara Elektronik	70%	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan Berusaha Industri yang di Fasilitasi secara Elektronik	70%	125.000.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00	
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	100%	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	100%	100.000.000,00	65.710.000,00	65.710.000,00	
		3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terbitnya Laporan/Buku Informasi Industri	1 Laporan	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terbitnya Laporan/Buku Informasi Industri	1 Laporan	100.000.000,00	65.710.000,00	65.710.000,00	
JUMLAH								24.444.525.259,00	48.202.512.415,00	53.591.945.415,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
1	X.XX. NON URUSAN	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana	BB	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana	BB	8.389.592.191,00	8.568.289.072,00	10.037.567.948,00	
		2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	23.060.056,00	23.060.056,00	23.060.056,00	
		2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bln	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bln	4.701.835.666,00	4.920.055.000,00	5.471.987.000,00	Penambahan anggaran karena anggaran yang sebelumnya tidak mencukupi untuk pembayaran gaji dan tunjangan selama 1 tahun
		2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancar Pelaksanaan tugas untuk pelayanan kepada masyarakat	1 unit	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancar Pelaksanaan tugas untuk pelayanan kepada masyarakat	1 unit	116.632.000,00	256.632.000,00	266.632.000,00	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas counter MPP dan PTSP

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan	15 orang	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan	15 orang	713.894.967,00	829.363.314,00	1.716.163.656,00	Pergeseran dari kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor lainnya dan penambahan untuk pembelian peralatan dan kelengkapan kantor, kelengkapan kegiatan inovasi dan pembelian peralatan karena hasil penilaian publik serta pembelian ginset
		2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan yang tersedia	5 kegiatan	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan yang tersedia	5 kegiatan	593.240.000,00	0,00	77.802.000,00	
		2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	2 kegiatan	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	2 kegiatan	1.735.380.000,00	1.728.339.200,00	1.813.979.200,00	Penambahan anggaran dari pergeseran anggaran karena kenaikan pembayaran rekening air sehingga tidak mencukupi untuk 1 tahun

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	117 unit	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	117 unit	505.549.502,00	810.839.502,00	667.944.036,00	Penambahan karena pembuatan rumahan ginset
2	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi PMDN dan PMA	1,01 Trilyun	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi	100%	400.000.000,00	316.589.000,00	316.589.000,00	Perubahan menyesuaikan program dan kegiatan yang mengembangkan iklim penanaman modal outcomenya bukan hasil realisasi investasi namun terfasilitasi a kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM serta tersedianya kajian peta potensi dan peluang investasi
		2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas /intensif dan kemudahan	5 kali	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	penanaman modal		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
		2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah jenis potensi investasi daerah yang teridentifikasi sesuai standar	2 kajian	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianyadoku men kajian investasidan pemetaan produkunggulan daerah	2 Kajian	350.000.000,00	266.589.000,00	266.589.000,00	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berminat menanamkan modal	20 Investor	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100%	550.000.000,00	526.620.000,00	1.018.509.999,00	Indikator promosi sebelumnya tidak sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan karena dalam kegiatan yang sifatnya promosi tidak dapat ditentukan jumlah investor yang menanamkan modal
		2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	5 kali	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	4 kali	550.000.000,00	526.620.000,00	1.018.509.999,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	90%	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	90%	761.659.056,00	723.436.810,00	850.630.660,00	
		2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterbitkan	2.500 izin	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterbitkan	2.500 izin	761.659.056,00	723.436.810,00	850.630.660,00	Penambahan anggaran untuk pembelian sarana peralatan (laptop dan PC,rak arsip)untuk penunjang pelayanan perizinan
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	84%	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	84%	297.391.200,00	862.515.099,00	907.515.099,00	Bertambahnya Pelaku Usaha untuk Tahun 2024 setelah perubahan serta adanya Belanja Dana DAK
		2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80 kali	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80 kali	297.391.200,00	862.515.099,00	907.515.099,00	Bertambahnya Pelaku Usaha untuk Tahun 2024 setelah perubahan serta adanya Belanja Dana DAK
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA	100%	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA	100%	766.230.054,00	766.230.054,00	1.400.222.584,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan	100%	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan	100%	766.230.054,00	766.230.054,00	1.400.222.584,00	Belanja untuk uji sistem manajemen keamanan informasi dilakukan oleh Kominfo karena server paliat online berasal dari Kominfo dan anggaran dialihkan untuk pengadaan mobil operasional bidang data dan sistem informasi, belanja vidiotron indoor dilaksanakan karena merubah ukuran dan penambahan kerangka vidiotron
JUMLAH								11.164.872.501,00	11.763.680.035,00	14.531.035.290,00	
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	74 (BB)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	6.215.177.051,00	6.639.407.097,00	7.158.662.349,00	
		2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	8 dokumen	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	8 Dokumen	89.535.466,00	89.535.466,00	89.536.877,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah					
		2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	4.545.496.838,00	5.040.656.000,00	4.651.418.000,00	
		2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 Orang	106.184.000,00	106.184.000,00	581.903.000,00	
		2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 kegiatan	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	653.338.154,00	687.113.838,00	1.016.848.023,00	
		2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Item	130.895.793,00	37.655.793,00	37.655.793,00	
		2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Item	311.646.800,00	300.182.000,00	403.220.656,00	
		2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit	378.080.000,00	378.080.000,00	378.080.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	891.431.956,00	897.613.082,00	982.363.082,00	
		2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	2 kegiatan	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	225 Orang	559.997.519,00	566.173.845,00	637.673.845,00	
		2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	225 Orang	331.434.437,00	331.439.237,00	344.689.237,00	
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	50 org	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	50 Orang	9.132.491.547,00	11.751.411.547,00	13.139.154.369,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	1 kegiatan	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	8 Buah	2.697.999.912,00	5.166.919.912,00	5.824.296.900,00	
		2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	1 Dokumen	864.495.148,00	1.014.495.148,00	1.590.996.068,00	
		2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	2 kegiatan	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 kegiatan	309.997.020,00	309.997.020,00	413.216.020,00	
		2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan organisasi olahraga	2 kegiatan	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan organisasi olahraga	3 dan 22 Organisasi dan Klub	5.109.999.537,00	5.109.999.537,00	5.109.999.537,00	
		2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan olahraga rekreasi	1 kegiatan	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan olahraga rekreasi	4 Cabor	149.999.930,00	149.999.930,00	200.645.844,00	
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	100%	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	100%	705.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	705.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	
3	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	1.020.000 orang	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	1.020.000 Orang	1.397.632.168,00	1.464.711.439,00	1.887.725.095,00	
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	a. 4 lokasi b. 5 Unit	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	a. 5 Lokasi b. 7 Unit	1.397.632.168,00	1.464.711.439,00	1.887.725.095,00	
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	4%	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	4%	704.861.116,00	753.831.565,00	1.949.831.835,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri b. Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	a. 5 lap b. 6 dok	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri b. Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen 4 Dokumen	704.861.116,00	753.831.565,00	1.949.831.835,00	
JUMLAH								19.046.593.838,00	22.711.974.730,00	26.322.736.730,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
1	X.XX. NON URUSAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	7.051.728.244,00	8.169.087.954,00	9.975.457.757,00	
		2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	96.252.227,00	96.252.227,00	96.252.227,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	14 Bulan	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	14 Bulan	4.893.441.190,00	5.439.508.050,00	5.989.613.050,00	Penambahan Gaji PPPK dan TPP ASN
		2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Kegiatan	2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
		2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	581.694.891,00	561.200.321,00	809.996.175,00	untuk memenuhi kegiatan rapat koordinasi karna realisasi smp dengan juli sdh mencapai 80%
		2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 Unit	113.710.323,00	145.495.173,00	145.495.173,00	
		2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	955.745.000,00	960.785.000,00	1.095.479.000,00	untuk dekorasai dan sewa stand pameran, konsumsi selama kegiatan, sovenir kegiatan dan melakukan penambahan daya sekaligus penambahan untuk pembayaran tagihan listrik bulanan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	375.884.613,00	930.847.183,00	1.803.622.132,00	Penambahan mobil dinas rush sekretaris 1 dan 1 buah mobil operasional avanza serta mendapat 2 kendaraan dinas baru
2	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a.. Persentase Jumlah pengunjung b.. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka c. Persentase Perpustakaan yang dibina d. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	a. 20,16% b. 0,25 c. 53% d. 65.188 eks	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a.. Persentase Jumlah pengunjung b.. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka c. Persentase Perpustakaan yang dibina d. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	a. 40,50% b. 35% c. 75 % d, 66,000 eks	1.017.503.746,00	1.648.010.419,00	1.928.997.011,00	Persentase Jumlah Pengunjung, Rasio Ketersediaan Bahan Pustaka, tidak menunjukkan penambahan yang berarti karena dihitung dengan rasio jumlah penduduk Ketersediaan bahan pustaka bertambah melalui penambahan anggaran pembelian pembelian buku digital (E-Books)

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Jumlah Pengunjung	a. 20,16%	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Jumlah Pengunjung	50,00%	509.007.283,00	1.090.220.336,00	1.242.558.336,00	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik kenapa dimasukkan dan dilakukan perubahan adalah agar jangkauan dan keluasaan layanan non fisik bisa dinikmati oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan lebih efisien dan praktis. Pengembangan layanan dilakukan perubahan atas asumsi untuk peningkatan kunjungan dengan melaksanakan beberapa kegiatan tambahan yang terkait promosi, sosialisasi dan gerakan-gerakan literasi lainnya, sebagaimana sesuai dengan hasil asesensi sub bagian perencanaan di kemendagri yang menyarankan agar lebih banyak membuat/memasukkan anggaran kegiatan dalam rangka mendukung hal di maksud. Pengembangan bahan pustaka dilakukan perubahan atas asumsi :1.Ketersediaan bahan pustaka2.Pengembangan literasi dengan keberagaman bahan pustaka3.Ketersediaan dan pengembangan dimaksud adalah sebagai upaya peningkatan IPLM dan TBM

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Persentase Jumlah Anggota Perpustakaan c. Tingkat Kepuasan Masyarakat d. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka, e. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang dilestarikan f. Persentase Perpustakaan yang dibina	b. 11,06% c. 87.00 d. 0,25 e. 7000 eksemplar f. 53%		b. Persentase Jumlah Anggota Perpustakaan c. Tingkat Kepuasan Masyarakat d. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka, e. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang dilestarikan f. Persentase Perpustakaan yang dibina	b. 15.00% c.90 d. 0,50 e. 8000 Eksemplar f.60%				Persentase Jumlah Pengunjung, Rasio Ketersediaan Bahan Pustaka, tidak menunjukkan penambahan yang berarti karena dihitung dengan rasio jumlah penduduk
		2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca	19 Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca	20 Kegiatan	508.496.463,00	557.790.083,00	686.438.675,00	Informasi Kegiatan perlu di tingkatkan dengan menambah kegiatan yang melibatkan khalayak umum seperti Pameran Perpustakaan. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat umum dilakukan dan dimasukkan dalam anggaran perubahan atas asumsi : 1. Sebagai upaya peningkatan wahana lingkungan ramah anak dan daya tarik 2. Agar lebih bervariasi dalam upaya pengembangan dan kemajuan minat baca

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	45%	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	45%	741.928.708,00	715.449.185,00	628.091.773,00	
		2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah SKPD yang dibina dan dilakukan Pengawasan b. Jumlah Kecamatan / Desa / Kelurahan yang dibina c. Peraturan Kearsipan yang tersedia	a. 30 SKPD b. 34 Desa / Kelurahan c. 1 Peraturan	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah SKPD yang dibina dan dilakukan Pengawasan b. Jumlah Kecamatan / Desa / Kelurahan yang dibina c. Peraturan Kearsipan yang tersedia	a. 30 SKPD b. 34 Desa / Kelurahan c. 1 Peraturan	225.226.468,00	198.746.945,00	198.737.393,00	
		2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	74.604.860,00	74.604.860,00	74.604.860,00	
		2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan	100	2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan	100	442.097.380,00	442.097.380,00	354.749.520,00	karena adanya Rasionalisasi anggaran
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Perlindungan, penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip Statis dan Alih Media	300	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Perlindungan, penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip Statis dan Alih Media	300	394.433.832,00	394.433.832,00	394.433.832,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen/Berkas Pemusnahan Arsip	300	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen/Berkas Pemusnahan Arsip	300	116.446.218,00	116.446.218,00	116.446.218,00	
		2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150	2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150	113.994.428,00	113.994.428,00	113.994.428,00	
		2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	300	2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	300	163.993.186,00	163.993.186,00	163.993.186,00	
JUMLAH								9.205.594.530,00	10.926.981.390,00	12.926.980.373,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN											
1	X.XX. NON URUSAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Nilai AKIP	a. BB (Baik)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Nilai AKIP	BB	9.354.371.740,00	18.037.957.902,00	14.020.054.091,00	
			b. Nilai IKM	b. B (Baik)		b. Nilai IKM	B				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	10 Dokumen	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	10 Dokumen	288.201.999,00	288.201.999,00	254.749.954,00	
		3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	3.984.496.375,00	8.819.141.375,00	7.257.890.375,00	
		3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD tepat waktu	12 Bulan	3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD tepat waktu	12 Bulan	30.994.800,00	30.994.800,00	30.994.800,00	
		3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	10 orang	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	10 orang	182.904.000,00	182.904.000,00	182.904.000,00	
		3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	786.153.997,00	843.753.997,00	928.053.907,00	
		3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	560.534.286,00	1.014.116.016,00	932.164.096,00	
		3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara	14 unit	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara (R2 dan R4)	R2 = 27 unit R4 = 11 unit	1.266.600.000,00	1.281.498.095,00	1.334.898.095,00	Sudah ada penambahan R2 dan R4 dari Pemkab Tabalong
		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan BMD	10 unit	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan BMD	38 unit	2.254.486.283,00	5.577.347.620,00	3.098.398.864,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada;biji kering (kg/ha) b. Jumlah populasi sapi yang dikembangkan (ekor)	a.Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha b. 10350 ekor	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada;biji kering (kg/ha) b. Jumlah populasi sapi yang dikembangkan (ekor)	a.Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha b. 10350 ekor	7.418.035.498,00	18.913.065.040,00	19.210.433.276,00	
		3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Jumlah UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) yang difasilitasi b. Dokumen berisi sarana pertanian yang difasilitasi	a. Total 56 unit b. 1 dokumen	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Jumlah UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) yang difasilitasi b. Dokumen berisi sarana pertanian yang difasilitasi	a. Total 56 unit b. 1 dokumen	814.477.078,00	1.032.375.370,00	1.096.824.106,00	
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas:- karet; sheet (ton/ha)- lada;biji kering (kg/ha)- Produksi kopi (ton)	Produktivitas:- 1,1 ton/ha- 220 kg/haProduksi:466 ton	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas:- karet; sheet (ton/ha)- lada;biji kering (kg/ha)- Produksi kopi (ton)	Produktivitas:- 1,1 ton/ha- 220 kg/haProduksi:466 ton	1.042.184.427,00	4.461.305.677,00	4.844.225.177,00	
		3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah populasi ternak yang dikembangkan (ekor) b. Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB (ekor)	a. 10350 ekor b. 469 ekor	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah populasi ternak yang dikembangkan (ekor) b. Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB (ekor)	a. 10350 ekor b. 469 ekor	5.561.373.993,00	13.419.383.993,00	13.269.383.993,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	70%	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	70%	7.307.713.487,00	9.239.869.948,00	14.411.318.121,00	
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan:	1 action plan	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan:	2 Dokumen	207.889.581,00	207.889.581,00	350.483.581,00	Untuk keperluan menyusun dokumen pemetaan dan persiapan pembinaan kelembagaan ekonomi petani
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pendukung kegiatan: - perkebunan - kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan peternakan - penanggulangan dan pengendalian	- 29% - 27% - 12%	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pendukung kegiatan: - perkebunan - kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan peternakan - penanggulangan dan pengendalian	- 29% - 27% - 12%	7.099.823.906,00	9.031.980.367,00	14.060.834.540,00	
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	a. Persentase angka mortalitas hewan strategis b. Persentase Penyediaan Daging ASUH	a. ≤ 3 % b. 75%	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	a. Persentase angka mortalitas hewan strategis b. Persentase Penyediaan Daging ASUH	a. ≤ 3 % b. 75%	965.860.639,00	1.097.962.778,00	1.373.981.685,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka penyakit zoonosis	≤ 0 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka penyakit zoonosis	≤ 0 %	315.382.865,00	461.921.365,00	630.613.565,00	
		3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka mortalitas hewan strategis	≤ 3 %	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka mortalitas hewan strategis	≤ 3 %	158.731.524,00	147.015.163,00	231.762.996,00	
		3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyediaan daging ASUH	70%	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyediaan daging ASUH	70%	491.746.250,00	489.026.250,00	511.605.124,00	
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian (%)	40%	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian (%)	40%	765.485.442,00	1.163.578.638,00	1.198.669.637,00	
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan	a. Persentase fasilitasi pengendalian OPT perkebunan	a. 18% (900 ha/6442,51)	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan	a. Persentase fasilitasi pengendalian OPT perkebunan	a. 18% (900 ha/6442,51)	765.485.442,00	1.163.578.638,00	1.198.669.637,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	b. Luasan pencegahan kebakaran lahan c. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana kesehatan hewan	b. 75 ha c. 22% (650/3039)	Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	b. Luasan pencegahan kebakaran lahan c. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana kesehatan hewan	b. 75 ha c. 22% (650/3039)				
JUMLAH								25.811.466.806,00	48.452.434.306,00	50.214.456.810,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai AKIP b. Indeks Pelayanan Kesekretariatan c. Persentase SAKIP SKPD yang Berpredikat BB d. Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah / wakil kepala daerah	a. 73 b. 90 c. 50% d. 100%	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai AKIP b. Indeks Pelayanan Kesekretariatan c. Persentase SAKIP SKPD yang Berpredikat BB d. Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah / wakil kepala daerah	a. 73 b. 90 c. 50% d. 100%	43.237.275.675,00	42.598.865.708,00	57.239.828.223,00	
		4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	118 Dokumen	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	118 Dokumen	86.735.000,00	77.842.173,00	77.842.173,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1060 Dokumen	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1060 Dokumen	19.797.033.353,00	22.713.971.827,00	24.287.525.169,00	-Perlunya Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dan perlunya tambahan untuk Rapat Koordinasi Internal Setda-Perlunya sarana berupa Printer yang mengakomodir scan kertas F4 oleh Pengurus Barang guna memperlancar keperluan pengarsipan data aset
		4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100 %	4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100 %	262.500.000,00	262.500.000,00	277.200.000,00	Gaji Tenaga Kontrak Kurang 1 Bulan sebanyak 7 orang
		4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	100 %	113.350.000,00	113.350.000,00	190.273.000,00	Persiapan Pengadaan Seragam Hari Jadi Tabalong untuk Setda Kabupaten Tabalong

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	2.121.473.000,00	2.969.943.000,00	8.172.189.981,00	-Perlu tambahan untuk belanja alat listrik -Perlunya tambahan sarana baik untuk keperluan Hari Jadi maupun yang lainnya -Perlunya tambahan anggaran untuk keperluan cetak dan penggandaan -Penambahan Perjalanan Dinas untuk Keperluan sampai dengan Akhir Tahun 2024
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	4.500.000.000,00	0,00	200.000.000,00	Perlunya tambahan sarana kendaraan roda 2 untuk memperlancar operasional kantor
		4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	7.288.699.000,00	6.471.348.600,00	6.485.048.600,00	-Kekurangan anggaran untuk anggaran air dan listrik -Kelebihan anggaran untuk THR Tenaga non ASN

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.045.794.000,00	3.636.211.586,00	10.223.272.453,00	-Kekurangan pencatatan Mobil Dinas -Pemeliharaan AC persiapan Hari Jadi dan kurangnya pemeliharaan laptop / PC -Mengakomodir kekurangan pemeliharaan dan perlengkapan gedung masukan dari anggota DPRD dan intern Setda
		4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	14 bulan	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	14 bulan	777.725.000,00	777.725.000,00	777.725.000,00	
		4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	100 %	3.678.340.000,00	3.563.440.000,00	4.141.755.210,00	-Kekurangan untuk Keperluan Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah -Anggaran tidak digunakan karena jabatan Wakil Kepala Daerah kosong -Kekurangan untuk acara HUT RI dan Hari Jadi

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	100 %	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	100 %	530.097.000,00	743.514.200,00	1.013.839.350,00	-Kekurangan untuk Biaya Rapat dan keperluan Cetak dan penambahan untuk FGD Penyusunan TPP ASN Berdasarkan KEPMEN -Untuk Keperluan Pelatihan/Bimtek Peta Proses Bisnis ke Yogyakarta -Kekurangan untuk Biaya Rapat, Perjalanan Dinas dan PDH
		4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 %	1.035.529.322,00	1.269.019.322,00	1.393.157.287,00	-Perlunya PSL dan PSH untuk keperluan acara, penggantian Laptop yang sudah rusak, serta untuk kekurangan keperluan acara Hari Jadi -Pergeseran untuk menambah kekurangan perjalanan dinas

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4.01 SEKRETARIA T DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu b. Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakata n c. Persentase pembentukan produk hukum	a. 100% b. 100% c. 100%	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu b. Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakata n c. Persentase pembentukan produk hukum	a. 100% b. 100% c. 100%	28.095.898.588,00	36.700.508.648,00	41.760.523.615,00	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	2.659.795.588,00	2.559.135.648,00	2.587.634.572,00	-Efisiensi Anggaran Deskpemilu serta mengakomodir kekurangan untuk acara Hari Jadi -Tambahn biaya untuk keperluan fasilitasi penetapan dan penegasan batas daerah dan toponimi hingga akhir tahun serta keperluan survey lapangan -Mengakomodir fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Bupati

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	24.820.483.000,00	33.521.603.000,00	38.291.603.000,00	-Mengakomodir keperluan Tausiah Akbar untuk Hari Jadi -Mengakomodir Hibah untuk LPTQ Kabupaten dan lain - lain
		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	100 %	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	100 %	561.440.000,00	546.390.000,00	546.390.000,00	
		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	54.180.000,00	73.380.000,00	334.896.043,00	Mengakomodir kekurangan fasilitas Kerjasama Daerah dan TKKSD pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS)
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase tingkat sinkronisasi dan penyalarsan sektor ekonomi dan sumber daya alam b. Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. 100% b. 100%	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase tingkat sinkronisasi dan penyalarsan sektor ekonomi dan sumber daya alam b. Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. 100% b. 100%	4.305.207.000,00	3.758.797.427,00	4.925.702.140,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Sinkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Sinkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	100 %	313.126.000,00	310.773.140,00	580.401.140,00	-Penambahan perjadi ke Provinsi untuk fasilitasi BLUD -Penambahan perjadi untuk Rakor, Undangan, HLM TPID dan TP2DD -Penambahan perjadi untuk Undangan dan Rakor ke Provinsi dan koordinasi industri bumbu paliat instan
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	100 %	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	100 %	718.127.000,00	699.591.871,00	831.975.121,00	-Penambahan untuk mengikuti Bimtek Penyusunan SSH dan pelatihan membaca laporan keuangan -Penambahan untuk rapat koordinasi dan Capacity Building TPAKD yang belum dianggarkan untuk mengikuti TPAKD Award

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.156.211.000,00	2.614.682.987,00	3.203.868.450,00	- Penambahan untuk keperluan kegiatan dan sarana LPSE - Penambahan untuk peningkatan kapasitas Pejabat Pengadaan
		4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Keselarasan dan Sinkronisasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Keselarasan dan Sinkronisasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	117.743.000,00	133.749.429,00	309.457.429,00	-Pergeseran, Penambahan Perjadin dan Fasilitas Forum Pelestarian Orang Utan -Penambahan Perjadin dan fasilitas Dana Bagi Hasil Kawasan Pertambangan -Penambahan Perjadin untuk koordinasi pengendalian banjir
JUMLAH								75.638.381.263,00	83.058.171.783,00	103.926.053.978,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD											
1	X.XX. NON URUSAN	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	37.532.499.801,00	39.547.839.967,00	42.530.056.304,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	251.625.600,00	265.725.600,00	358.376.418,00	
		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	100%	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	100%	5.496.589.302,00	5.678.151.000,00	6.023.164.558,00	
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	2.181.875.005,00	2.176.415.604,00	3.494.535.281,00	
		4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	100%	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	100%	1.782.113.083,00	2.599.562.670,00	3.292.007.576,00	
		4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Set DPRD & DPRD	100%	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Set DPRD & DPRD	100%	2.631.601.040,00	2.647.201.040,00	2.882.800.945,00	
		4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perengkapan kantor	100%	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perengkapan kantor	100%	3.203.866.587,00	3.812.864.149,00	3.687.739.235,00	
		4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	21.263.985.068,00	21.513.985.068,00	21.513.985.068,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya a Administrasi DPRD	100%	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya a Administrasi DPRD	100%	720.844.116,00	853.934.836,00	1.277.447.223,00	
2	4.02 SEKRETARIA T DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD b. Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/ Reses	a. 95% b. 95%	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD b. Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/ Reses	a. 95% b. 95%	21.166.111.021,00	41.944.577.886,00	45.334.797.146,00	
		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	3.006.628.820,00	12.958.541.400,00	9.560.141.400,00	
		4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	755.860.458,00	755.860.458,00	615.066.458,00	
		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	688.540.000,00	688.540.000,00	350.800.000,00	
		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	2.694.724.944,00	2.879.406.029,00	3.526.911.204,00	
		4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	2.751.429.474,00	4.393.529.474,00	4.223.067.284,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik	100%	4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik	100%	110.224.725,00	126.324.725,00	84.100.000,00	
		4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	100%	4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	100%	12.075.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00	
		4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas-tugas DPRD	100%	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas-tugas DPRD	100%	11.146.627.600,00	20.130.300.800,00	26.962.635.800,00	
JUMLAH								58.698.610.822,00	81.492.417.853,00	87.864.853.450,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
1	X.XX. NON URUSAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A	10.519.568.857,00	11.394.640.359,00	13.373.665.125,00	
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	61.829.169,00	61.829.169,00	108.978.061,00	
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	6.925.177.384,00	7.763.548.866,00	8.237.950.268,00	
		5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar	100%	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar	100%	495.000.000,00	495.000.000,00	1.079.903.000,00	
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	986.826.598,00	986.826.598,00	1.094.636.598,00	
		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	506.150.235,00	575.424.295,00	1.211.096.263,00	
		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	846.380.000,00	813.805.960,00	886.001.317,00	
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	690.855.471,00	690.855.471,00	747.749.618,00	
2	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	100%	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	100%	2.344.012.780,00	2.643.894.050,00	2.701.598.644,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	100%	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	100%	1.431.261.160,00	1.689.138.400,00	1.709.875.722,00	
		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan	100%	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan	100%	242.714.740,00	284.718.740,00	511.930.621,00	
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	476.806.880,00	476.806.910,00	444.239.025,00	
		5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	193.230.000,00	193.230.000,00	35.553.276,00	
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah	100%	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah	100%	2.337.721.828,00	2.000.737.258,00	3.104.399.858,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	1.362.115.584,00	1.362.115.584,00	2.185.878.184,00	
		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	206.000.000,00	206.000.000,00	336.300.000,00	
		5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah	100%	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah	100%	769.606.244,00	432.621.674,00	582.221.674,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	20%	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	20%	3.135.339.836,00	3.185.339.836,00	3.799.289.836,00	
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	20%	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	20%	385.339.836,00	385.339.836,00	385.339.836,00	
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	20%	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	20%	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
					5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	20%	0,00	0,00	325.000.000,00	Penyusunan baru bidang Ekobang
		5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	20%	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	20%	1.400.000.000,00	1.450.000.000,00	1.738.950.000,00	
JUMLAH								18.336.643.301,00	19.224.611.503,00	22.978.953.463,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	72.345.635.255,00	39.951.515.998,00	37.421.326.394,00	
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dok	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dok	29.575.670,00	29.575.670,00	31.121.870,00	utk jilid & Fotocopy PK perubahan
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	17 dok	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	17 dok	67.510.505.348,00	29.962.966.100,00	14.908.249.115,00	Penambahan POL
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	175.621.200,00	175.621.200,00	638.643.640,00	penambahan Baju Hari Jadi Tabalong dan kurangnya peserta pelatihan, serta Honor Narasumber dan Pembuatan Sisdur Keuangan dgn Pihak 3
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.152.391.000,00	1.379.181.900,00	2.224.693.938,00	Penambahan Box besar utk membuat perkas serta adanya Penyesuaian Kegiatan berdasarkan kebutuhan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	429.024.336,00	737.852.621,00	16.407.968.348,00	adany Pembelian Kendaraan Dinas Operasional untuk SKPD2 dan Pembeiiian Laptop, printer,PC , Scanner, Dispenser
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.110.687.701,00	1.098.698.101,00	1.439.570.503,00	Kurang bayar utk Listrik,air serta Pameran dan Arsip
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.937.830.000,00	6.567.620.406,00	1.771.078.980,00	
2	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan Penetapan APBD b. Persentase Waktu Penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah	100% 100%	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan Penetapan APBD b. Persentase Waktu Penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah	100% 100%	248.545.042.387,00	306.580.942.365,00	335.132.787.766,00	Pengurangan Honor TAPD Wakil Bupati, Makan minum dan Cetakan serta materai Adanya pergeseran Honor PPTK

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat Waktu c. Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%		dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat Waktu c. Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%				bergeser di dalam sub kegiatan saja untuk penambahan honor PPTK yang tidak sebelumnya
		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah	100 Dok	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah		1.788.660.400,00	1.018.518.046,00	722.059.357,00	Pengurangan Honor TAPD Wakil Bupati, Makan minum dan Cetakan serta materai
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	60 Dok	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	60 Dok	975.554.698,00	1.007.837.532,00	998.967.622,00	Adanya pergeseran Honor PPTK
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	16 Dok	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	16 Dok	1.144.885.500,00	1.144.885.500,00	1.144.885.500,00	bergeser di dalam sub kegiatan saja untuk penambahan honor PPTK yang tidak sebelumnya
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	244.635.941.789,00	303.409.701.287,00	332.266.875.287,00	pembayaran honor kuasa pengguna anggaran di Pemerintahan Desa

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah	100%	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah	100%	2.105.428.400,00	2.170.928.400,00	3.168.680.238,00	
		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik	100%	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik	100%	2.105.428.400,00	2.170.928.400,00	3.168.680.238,00	Penambahan Upgrade Aplikasi BMD Permendagri 47 dan 6 juta utk sewa deposit box serta adanya penambahan narasumber, patok batas Tanah, patok kayu ulin, papan nama
JUMLAH								322.996.106.042,00	348.703.386.763,00	375.722.794.398,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	13.100.410.302,00	14.420.346.950,00	17.041.029.652,00	
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	23 Dokumen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	32 Dokumen	61.160.000,00	43.040.000,00	123.309.000,00	Penambahan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen	8.840.736.722,00	9.820.323.000,00	10.613.227.000,00	Penambahan pagu untuk kekurangan penganggaran gaji, pergeseran belanja insentif non ASN dan insentif KDH/WKDH
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	212.173.320,00	Penambahan penganggaran pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan penambahan jumlah peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	813.632.539,00	1.274.640.919,00	2.239.538.526,00	Penambahan penganggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	52 Unit	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	88 Unit	1.214.701.097,00	391.780.677,00	937.041.096,00	Penambahan belanja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	1.463.627.087,00	1.440.196.287,00	1.473.299.389,00	Penambahan belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	656.552.857,00	1.400.366.067,00	1.442.441.321,00	Penambahan belanja untuk pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	43,54 % 5,1 % 0,14	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	0,3448 0,4519 0,54	2.886.872.198,00	2.894.485.708,00	5.826.097.264,00	
		5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah	104.016.101.486	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah	85.313.474.000	2.886.872.198,00	2.894.485.708,00	5.826.097.264,00	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pajak Daerah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Retribusi Daerah Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	12.187.192.358 4 OPD		Jumlah Retribusi Daerah Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	111.795.793.776,00 7 dari 13 OPD				2. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi 3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 4. Peningkatan Kualitas SDM 5. Inisiatif Promosi dan Edukasi 6. Optimalisasi Potensi Pendapatan
JUMLAH								15.987.282.500,00	17.314.832.658,00	22.867.126.916,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
1	X.XX. NON URUSAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	82	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92	6.432.033.491,00	7.030.007.684,00	8.873.597.777,00	Peningkatan Target untuk mendorong Peningkatan kualitas layanan kesekretariat an
		5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	51.826.564,00	51.826.564,00	101.317.400,00	
		5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100%	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100%	4.579.179.891,00	5.261.698.744,00	5.726.964.830,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	0,00	529.844.848,00	ada beberapa uraian belanja yang tidak mendukung terhadap pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan jadi diperlukan penyesuaian kegiatan
		5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	776.075.430,00	739.650.770,00	1.283.652.043,00	
		5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	726.749.900,00	678.629.900,00	657.754.900,00	
		5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	298.201.706,00	298.201.706,00	574.063.756,00	
2	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Indeks kepuasan Terhadap Layanankepegawaian Kepegawaian daerah (IKM)	8200%	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Indeks kepuasan Terhadap Layanankepegawaian Kepegawaian daerah (IKM)	92	4.206.757.522,00	4.556.109.322,00	5.474.230.993,00	Peningkatan Target untuk mendorong Peningkatan kualitas layanan kepegawaian

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN c. Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100% 100%		b. Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN c. Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100% 100%				
		5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi Kepegawaian	82	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi Kepegawaian	92	1.266.686.635,00	1.330.313.635,00	2.173.646.141,00	Peningkatan Target untuk mendorong Peningkatan kualitas layanan kepegawaian
		5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	82	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	92	654.092.952,00	654.092.752,00	848.644.852,00	Peningkatan Target untuk mendorong Peningkatan kualitas layanan kepegawaian
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%	1.839.544.348,00	2.125.269.348,00	1.956.985.748,00	
		5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	82	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	92	446.433.587,00	446.433.587,00	494.954.252,00	
3	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan kompetensi pegawai	100,0%	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan kompetensi pegawai	100%	3.351.001.526,00	3.586.521.526,00	2.893.519.762,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	100%	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	100%	768.906.000,00	768.906.000,00	891.670.460,00	
		5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	100%	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	100%	2.228.760.974,00	2.228.760.974,00	2.001.849.302,00	
		5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	100%	5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	100%	353.334.552,00	588.854.552,00	0,00	
JUMLAH								13.989.792.539,00	15.172.638.532,00	17.241.348.532,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT											
1	X.XX. NON URUSAN	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP :	BB	11.495.740.416,00	12.220.643.865,00	16.678.667.015,00	
		6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	9 Dokumen	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	9 Dokumen	32.757.500,00	32.757.500,00	32.757.500,00	
		6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	8.582.955.586,00	10.232.134.000,00	11.695.653.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapabilitas APIP	3 Level	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapabilitas APIP	3 Level	558.234.500,00	558.234.500,00	1.821.875.000,00	
		6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Pelayanan Administrasi Umum	74%	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Pelayanan Administrasi Umum	75%	1.089.963.846,00	646.154.166,00	1.390.141.349,00	
					6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yd disediakan	69 unit	0,00	0,00	775.521.867,00	Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4/2 dialihkan ke Bidang Aset BPKAD
		6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	507.006.280,00	470.886.280,00	676.186.280,00	
		6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Macam	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Macam	724.822.704,00	280.477.419,00	286.532.019,00	
2	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Muturitas SPIP Kab. Tabalong	50%	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Muturitas SPIP Kab. Tabalong	50%	2.109.056.770,00	2.106.506.770,00	1.570.424.553,00	
		6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal	100%	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal	100%	1.536.800.619,00	1.534.250.619,00	1.292.230.553,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	572.256.151,00	572.256.151,00	278.194.000,00	
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat WBK	3 PD	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat WBK	3 PD	774.247.054,00	771.299.061,00	934.295.330,00	
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada 8 Area Intervensi	3 PD	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada 8 Area Intervensi	3 PD	774.247.054,00	771.299.061,00	934.295.330,00	
JUMLAH								14.379.044.240,00	15.098.449.696,00	19.183.386.898,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	A	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	A	10.726.904.017,00	11.067.759.558,00	12.029.416.961,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	44.526.020,00	44.526.020,00	49.626.020,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	7.149.121.236,00	7.562.644.776,00	8.157.261.776,00	Penambahan untuk belanja

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	6.900.912,00	6.900.912,00	8.100.912,00	Penambahan perjalanan dinas ke Kabupaten
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.427.678.034,00	1.480.028.262,00	1.701.921.049,00	Penambahan rek belanja tunjangan PPH dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	31.080.000,00	0,00	0,00	karena pengadaan kendaraan dinas (sepeda motor) di anggarkan pada tahun 2025
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.083.577.426,00	1.033.287.000,00	1.067.264.916,00	Penambahan tagihan listrik dan pemasangan PDAM untuk kelurahan
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	984.020.389,00	940.372.588,00	1.045.242.288,00	Penambahan untuk pemeliharaan/r ehab ruangan pelayanan dan rehab ruangan seckam dan camat

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakat an	73,96%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakat an	73,96%	326.306.549,00	422.885.309,00	445.916.859,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100%	133.371.929,00	133.371.929,00	162.033.479,00	Penambahan untuk kegiatan MTQ
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	192.934.620,00	289.513.380,00	283.883.380,00	Pengurangan belanja honorarium PPTK di kelurahan
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	1.763.492.745,00	1.648.742.370,00	1.700.181.992,00	
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	1.398.370.294,00	1.237.170.294,00	1.237.170.294,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Bulan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Bulan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Perangkat Daerah	12 Bulan	365.122.451,00	411.572.076,00	463.011.698,00	Penambahan anggaran kegiatan penanganan stunting baduta
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,64%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,64%	26.639.000,00	76.639.000,00	91.856.224,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	12 Bulan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	12 Bulan	26.639.000,00	76.639.000,00	91.856.224,00	Penambahan anggaran untuk kegiatan pilkada
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82,23%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82,23%	217.473.849,00	267.473.849,00	476.390.636,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum	100%	217.473.849,00	267.473.849,00	476.390.636,00	Penambahan anggaran untuk kegiatan Hari jadi kabupaten Tabalong (stand pameran dll)

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	75,8%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	75,8%	107.468.972,00	156.873.586,00	90.628.000,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	107.468.972,00	156.873.586,00	90.628.000,00	Pengurangan belanja perjalanan dinas
JUMLAH								13.168.285.132,00	13.640.373.672,00	14.834.390.672,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Evaluasi Nilai AKIP	B Nilai	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Evaluasi Nilai AKIP	B Nilai	10.997.628.191,00	11.105.202.021,00	13.149.202.972,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	9.661.000,00	9.661.000,00	9.661.000,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	7.430.256.215,00	7.504.170.000,00	8.323.455.000,00	Penambahan Pagu Gaji dan Tunjangan ASN

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	850.684,00	850.684,00	850.684,00	-
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	725.050.405,00	772.299.814,00	1.283.252.955,00	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas Luar daerah di 5 Kelurahan
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	1.018.679.379,00	1.024.421.105,00	1.212.530.215,00	Penambahan Anggaran pada sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya di 5 Kelurahan
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.278.507.800,00	1.257.965.800,00	1.346.374.245,00	Penambahan Anggaran pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Pembayaran Listrik Kecamatan dan 5 Kelurahan
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	101 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	101 Unit	534.622.708,00	535.833.618,00	973.078.873,00	Penambahan Anggaran Pemeliharaan Mobil Dinas dan kendaraan Dinas di 5 Kelurahan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Masyarakat an	100%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Masyarakat an	100%	636.015.601,00	864.609.556,00	937.518.996,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	10 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	10 Laporan	131.278.304,00	131.278.304,00	204.519.944,00	Penambahan Makan minum Rapat MTQ , sewa rumah MTQ , Fotocopy spanduk dan baju batik
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	354.737.297,00	583.331.252,00	596.989.252,00	Penambahan Anggaran Pada sub kegiatan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	136.009.800,00	Pengurangan Anggaran pada sub Kegiatan
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	100%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	100%	4.077.002.440,00	3.824.568.440,00	3.091.739.393,00	Pengurangan Anggaran

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Desa	31.950.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	3.596.334.072,00	3.293.896.072,00	2.470.287.678,00	Pengurangan Anggaran pada sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	100 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	100 Keluarga	448.718.368,00	498.722.368,00	589.501.715,00	Penambahan Anggaran Pada Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan%	67.889.769,00	117.889.769,00	166.350.689,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	67.889.769,00	117.889.769,00	166.350.689,00	Penambahann anggaran pada sub kegiatan koodinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan yang di susun Target Waktu	80,83%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan yang di susun Target Waktu	81%	75.151.000,00	125.151.000,00	136.893.736,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Dokumen	75.151.000,00	125.151.000,00	136.893.736,00	Penambahan Anggaran pada sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	33.796.000,00	83.796.000,00	83.796.000,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka fasilitas,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintah desa	12 Dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka fasilitas,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintah desa	12 Dokumen	33.796.000,00	83.796.000,00	83.796.000,00	-
JUMLAH								15.887.483.001,00	16.121.216.786,00	17.565.501.786,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	3.708.802.612,00	4.166.354.526,00	4.655.334.985,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	10.251.075,00	10.250.483,00	10.250.483,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	2.877.715.226,00	3.226.617.000,00	3.392.710.000,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	2 paket	330.942.811,00	334.395.043,00	640.633.646,00	Banyak Alat dan perlengkapan kantor yang rusak akibat musibah kebakaran
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	85.000.000,00	83.992.000,00	91.745.856,00	Pengadaan Sofa yg rusak Parak karna kebakaran
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	271.584.500,00	266.973.000,00	267.273.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor yang rusak karna kebakaran

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	133.309.000,00	244.127.000,00	252.722.000,00	Tambahan mobil Operasional Kecamatan, yang awalnya Cuma 1 buah menjadi 2 buah
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Masyarakat an	75%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Masyarakat an	75%	108.491.368,00	106.470.274,00	171.022.241,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	86.494.000,00	86.493.186,00	171.022.241,00	Tambahan Sewa Pondokan, Makan Minum Kapilah MTQ, Uang Transport Perjalanan Dinas Peserta Kapilah, Official, MTQ
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21.997.368,00	19.977.088,00	0,00	Kesalahan pada awal update kode rekening Sub kegiatan, seharusnya kegiatan itu ada pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	41.037.562,00	91.055.769,00	122.102.857,00	
					7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		14 Laporan	0,00	0,00	14.977.088,00	Pindahan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan, yg memang seharusnya kegiatan yg dilaksanakan dikecamatan dilaksanakan di prorgam/kegiatan /sub kegiatan ini
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Keluarga	41.037.562,00	91.055.769,00	107.125.769,00	Kegiatan ini adalah utk PKK Kecamatan yang dibawah Kasi Pembangunan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	1	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)		45.000.000,00	94.999.996,00	89.750.396,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	45.000.000,00	94.999.996,00	89.750.396,00	Pengurangan Pembelian Spanduk/ Baleho
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	66.100.000,00	120.730.000,00	207.493.086,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	66.100.000,00	120.730.000,00	207.493.086,00	Tambahan buat kegiatan HUT RI, Hari Jadi Kab. Tabalong
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	11.283.684,00	50.304.435,00	50.304.435,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	14 Dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	14 Dokumen	11.283.684,00	50.304.435,00	50.304.435,00	
JUMLAH								3.980.715.226,00	4.629.915.000,00	5.296.008.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	2.932.890.303,00	3.214.060.560,00	3.781.619.528,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	9.523.860,00	9.523.860,00	9.523.860,00	-
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Dokumen	2.416.328.553,00	2.710.847.768,00	2.906.399.768,00	
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	1.805.976,00	1.805.976,00	1.805.976,00	-
					7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	16 paket	0,00	0,00	16.650.000,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	158.210.155,00	158.270.707,00	373.640.577,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	3 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	7 unit	28.371.224,00	28.933.162,00	96.289.226,00	Penambahan belanja modal laptop,kursi gandeng dan gordan
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	223.502.500,00	209.531.052,00	214.371.052,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	34 unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	35 Unit	95.148.035,00	95.148.035,00	162.939.069,00	Penambahan pemeliharaan kendaraan roda 4 sekcam
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	72.772.300,00	72.441.258,00	130.820.378,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 laporan	72.772.300,00	72.441.258,00	130.820.378,00	Salah entry target kegiatan pada awal entry Renja seharusnya 4 laporan
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kinerja aparatur,kapasitas aparatur dan	75%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kinerja aparatur,kapasitas aparatur dan	80%	66.194.730,00	116.194.730,00	123.166.730,00	Menyesuaikan dengan target program pada Renstra, karena salah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DESA DAN KELURAHAN	tata kelola kewilayahan desa		DESA DAN KELURAHAN	tata kelola kewilayahan desa					entry target program pada awal entry Renja
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	1.544 keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	1.544 keluarga	52.594.730,00	102.594.730,00	109.566.730,00	-
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	36.930.000,00	86.930.000,00	98.470.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	36.930.000,00	86.930.000,00	98.470.000,00	-
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	44.189.721,00	94.189.721,00	145.291.633,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 laporan	44.189.721,00	94.189.721,00	145.291.633,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	75%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80%	13.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	Menyesuaikan dengan target program pada Renstra, karena salah entry target program pada awal entry Renja
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diawasi	7 desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diawasi	7 desa	13.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	
JUMLAH								3.166.577.054,00	3.647.416.269,00	4.342.968.269,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	B	3.398.399.616,00	3.555.961.222,00	4.212.944.489,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	tidak ada perubahan
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	2.821.654.944,00	2.947.907.000,00	3.222.886.000,00	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Gaji

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	210.491.059,00	230.701.059,00	453.648.859,00	adanya penambahan untuk belanja perjalanan dinas , karena banyaknya undangan dan pelaksanaan kegiatan di luar daerah sedangkan anggaran yang ada masih kurang
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat yang dibeli	2 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat yang dibeli	18 Unit	31.784.850,00	31.784.850,00	117.154.106,00	Kebutuhan pengadaan barang untuk keperluan rumah dinas camat karena masih banyak peralatan dan mesin yang belum teranggarkan dan rusak
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	214.957.400,00	245.398.313,00	284.705.524,00	adanya penambahan anggaran untuk belanja perabot kantor (ruang kerja camat) karena belum teranggarkan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	48 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	49 Unit	109.011.363,00	89.670.000,00	124.050.000,00	adanya penambahan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 karena yang teranggarkan di RKPD induk hanya 1 buah sedangkan kendaraan dinas roda 4 yang ada di Kecamatan ada 2 buah
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat an	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat an	80%	119.560.000,00	90.950.000,00	180.876.372,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	77.720.000,00	70.330.000,00	150.526.372,00	adanya penambahan anggaran untuk kegiatan MTQ, untuk biaya pemondokan dan makanan dan minuman Kafilah MTQ di masukkan di anggaran kecamatan masing-masing.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang difasilitasi	3 Kegiatan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang difasilitasi	3 Kegiatan	41.840.000,00	20.620.000,00	30.350.000,00	adanya penambahan anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan bidang kesra (kegiatan rapat UKS, Rapat Kecamatan Sehat, Rapat Koordinasi bidang Kesra) sedangkan anggaran yang ada tidak mencukupi
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayah Desa	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayah Desa	80%	47.371.586,00	97.371.586,00	126.520.247,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Dibina dan diberdayakan	15 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Dibina dan diberdayakan	15 Desa	23.615.000,00	23.615.000,00	24.075.000,00	adanya penambahan anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan bidang Pembangunan karena anggaran yang ada masih belum mencukupi

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina	15 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina	15 Desa	23.756.586,00	73.756.586,00	102.445.247,00	penambahan anggaran untuk kegiatan PKK Kecamatan karena adanya kebutuhan untuk pembelian seragam PKK untuk kader PKK Kecamatan serta adanya penambahan untuk persiapan menghadapi lomba PKK Tk. Kabupaten
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	55.750.000,00	96.665.000,00	110.610.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	55.750.000,00	96.665.000,00	110.610.000,00	adanya penambahan anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan bidang trantib (rapat Forkopimca serta rapat Koordinasi bidang trantib dengan desa) sedangkan anggaran yang ada tidak mencukupi

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	80%	90.714.742,00	134.594.992,00	161.420.692,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	90.714.742,00	134.594.992,00	161.420.692,00	adanya penambahan anggaran untuk keperluan Hari Jadi Kab. Tabalong karena belum teranggarkan di RKPD Induk
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	11.250.000,00	61.250.000,00	19.400.000,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	11.250.000,00	61.250.000,00	19.400.000,00	Pengurangan anggaran transport untuk belanja pembinaan dan pengawasan desa karena adanya pembatasan pagu untuk belanja perjalanan dinas
JUMLAH								3.723.045.944,00	4.036.792.800,00	4.811.771.800,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	4.466.525.347,00	4.904.511.558,00	5.430.600.471,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	15 Dok	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	15 Dok	25.429.962,00	29.118.757,00	25.734.220,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	7 Dok	3.412.658.109,00	3.852.065.000,00	4.109.255.000,00	Pergeseran di dalam karena tunjangan PPH kurang untuk pembayaran gaji ke 13
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	365.023.209,00	373.321.903,00	629.472.560,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	5 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	4 unit	15.540.000,00	15.540.000,00	22.709.593,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bln	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 laporan	480.389.407,00	496.008.027,00	491.655.227,00	Pergeseran dan Pengurangan di Kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	167.484.660,00	138.457.871,00	151.773.871,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat	74%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat	80%	113.001.192,00	109.881.192,00	302.568.240,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	113.001.192,00	109.881.192,00	302.568.240,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	80%	448.898.201,00	482.098.201,00	458.500.817,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 keg	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 lembaga kemasyarakatan	114.665.893,00	114.665.893,00	88.702.086,00	Pergeseran dan Pengurangan di Kegiatan
		7.01.03.2.02 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 keg	7.01.03.2.02 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan	11 desa	309.032.308,00	292.232.308,00	294.598.731,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemberdayaan Kelurahan	pemberdayaan kelurahan		Pemberdayaan Kelurahan	pemberdayaan kelurahan					
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran dalam Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 keg	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran dalam Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 keg	25.200.000,00	75.200.000,00	75.200.000,00	
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman & Keamanan)	98%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman & Keamanan)	100%	22.407.400,00	22.407.400,00	22.407.400,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 keg	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	22.407.400,00	22.407.400,00	22.407.400,00	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	146.637.117,00	243.517.117,00	331.285.617,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 keg	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	146.637.117,00	243.517.117,00	331.285.617,00	Pergeseran dan Penambahan Antar Kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	40.116.850,00	106.916.850,00	106.159.773,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Keg	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dok	40.116.850,00	106.916.850,00	106.159.773,00	Pergeseran dan Pengurangan di Kegiatan
JUMLAH								5.237.586.107,00	5.869.332.318,00	6.651.522.318,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	3.213.572.718,00	3.388.382.536,00	3.952.932.332,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	9.823.240,00	9.823.240,00	9.823.240,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Dokumen	2.670.467.369,00	2.822.629.186,00	2.987.321.186,00	Penambahan Pagu Gaji dan Tunjangan ASN

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	219.048.065,00	232.967.096,00	558.140.311,00	Tambahan Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Tambahan Pengadaan AC, Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Pengadaan Genset, Pengadaan Laptop Non Tekhnis (1 Unit), pengadaan Printer Kantor
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	100%	227.715.000,00	246.953.014,00	222.905.090,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	40 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	40 Unit	86.519.044,00	76.010.000,00	174.742.505,00	Penambahan Pemeliharaan Mobil Dinas Sekcam (1 Unit menjadi 2 unit) dan Kendaraan Roda Dua Dari 9 Unit menjadi 11 Unit
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	85%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	85%	86.740.634,00	87.876.855,00	153.594.099,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	86.740.634,00	87.876.855,00	153.594.099,00	Penambahan Makan minum Rapat MTQ , sewa rumah MTQ , ATK untuk Kaligrafi Peserta MTQ
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	38.763.541,00	83.459.220,00	83.459.220,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	20.406.260,00	17.256.260,00	17.256.260,00	
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	18.357.281,00	66.202.960,00	66.202.960,00	
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, keamanan dan kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, keamanan dan kenyamanan)	100%	37.875.000,00	53.470.000,00	54.570.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	7 desa	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	7 desa	37.875.000,00	53.470.000,00	54.570.000,00	Penambahan Perjalanan dinas dalam rangka monitoring PILKADA
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	93.000.290,00	153.304.680,00	187.059.240,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	93.000.290,00	153.304.680,00	187.059.240,00	Penambahan Dekorasi Panggung, Penambahan Hadiah bersifat Perlombaan untuk Hari Jadi Kab Tabalong dan Makan Minum aktivitas Lapangan Hari Jadi Tabalong
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	80%	17.500.000,00	56.038.709,00	55.609.109,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	7 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	7 Desa	17.500.000,00	56.038.709,00	55.609.109,00	
JUMLAH								3.487.452.183,00	3.822.532.000,00	4.487.224.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB (8B)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB (8B)	3.152.692.791,00	3.201.884.414,00	3.781.844.209,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10.544.000,00	10.544.000,00	10.544.000,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yg disusun	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yg disusun	20 Dokumen	2.622.889.425,00	2.667.592.683,00	2.861.168.683,00	
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.913.752,00	1.913.752,00	1.913.752,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	163.371.956,00	218.720.437,00	466.570.437,00	Kekurangan perhitungan dalam penyusunan perencanaan rapat koordinasi
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	5 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	5 Unit	30.216.945,00	0,00	101.153.795,00	Kesalahan Perhitungan dalam perencanaan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli		Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli					kebutuhan barang
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	238.626.713,00	215.430.542,00	218.430.542,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit	85.130.000,00	87.683.000,00	122.063.000,00	Rasionalisasi perhitungan kebutuhan anggaran pemeliharaan
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	85%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	85%	110.943.719,00	162.686.633,00	215.840.033,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	70,00%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	70,00%	98.943.854,00	150.476.633,00	203.630.033,00	Kekurangan perhitungan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran dan optimalisasi penyelenggaraan MTQ

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70,00%	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70,00%	11.999.865,00	12.210.000,00	12.210.000,00	
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan tata kelola Kewilayahan Desa	85%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan tata kelola Kewilayahan Desa	85%	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang dibina/ diberdayakan	9 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang dibina/ diberdayakan	9 desa	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan n K3 (Ketertiban,Keamanan dan Kenyamanan)	80%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan n K3 (Ketertiban,Keamanan dan Kenyamanan)	80%	49.556.280,00	94.004.501,00	94.004.501,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 desa	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 desa	49.556.280,00	94.004.501,00	94.004.501,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	16.544.952,00	74.850.452,00	135.313.257,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	16.544.952,00	74.850.452,00	135.313.257,00	Kekurangan perhitungan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran dan optimalisasi penyelenggaraan Hari Jadi
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	21.741.000,00	62.756.000,00	62.756.000,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	21.741.000,00	62.756.000,00	62.756.000,00	
JUMLAH								3.372.478.742,00	3.617.182.000,00	4.310.758.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	3.336.274.947,00	3.330.724.491,00	4.661.987.364,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	9.893.170,00	9.893.170,00	10.939.610,00	Kekurangan perhitungan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	2.515.954.000,00	2.555.131.715,00	2.743.961.620,00	Kekurangan perhitungan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	2.997.956,00	2.997.956,00	2.997.956,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	283.923.880,00	304.100.343,00	501.895.911,00	Kesalahan perhitungan dalam perencanaan kebutuhan barang peralatan dan perlengkapan kantor

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	15 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	15 Unit	191.492.559,00	127.747.584,00	448.169.386,00	Kesalahan perhitungan dalam perencanaan kebutuhan barang peralatan dan perlengkapan kantor
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	251.693.382,00	252.913.723,00	327.806.715,00	Kebutuhan pengisian kantor baru dan penggantian barang yang telah mengalami kerusakan
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Unit	80.320.000,00	77.940.000,00	626.216.166,00	Optimalisasi pelaksanaan perawatan bangunan dan kekurangan perhitungan terhadap objek bangunan yang harus dipelihara
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Masyarakat	85%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Masyarakat	85%	125.464.748,00	111.137.608,00	173.353.322,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	125.464.748,00	111.137.608,00	173.353.322,00	Rasionalisasi perhitungan kebutuhan anggaran

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	85%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	85%	89.063.628,00	137.560.423,00	177.828.854,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang dibina/diberdayakan	14 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang dibina/diberdayakan	14 Desa	30.293.828,00	30.293.828,00	15.219.828,00	Rasionalisasi perhitungan kebutuhan anggaran
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/diberdayakan	14 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/diberdayakan	14 Desa	58.769.800,00	107.266.595,00	162.609.026,00	Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan PKK dalam pemberdayaan keluarga
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	61.499.200,00	110.390.000,00	89.085.600,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	61.499.200,00	110.390.000,00	89.085.600,00	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan patroli terpadu kamtibmas
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	108.450.288,00	155.524.601,00	203.108.247,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 Laporan	108.450.288,00	155.524.601,00	203.108.247,00	Kekurangan perhitungan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran dan optimalisasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	30.293.828,00	80.336.920,00	59.022.656,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	30.293.828,00	80.336.920,00	59.022.656,00	Rasionalisasi perhitungan kebutuhan anggaran
JUMLAH								3.751.046.639,00	3.925.674.043,00	5.364.386.043,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	2.739.515.151,00	2.937.617.281,00	3.544.793.781,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	9.547.650,00	9.547.650,00	9.547.650,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Dokumen	2.069.370.432,00	2.271.572.562,00	2.477.298.562,00	Penambahan Pagu Gaji dan Tunjangan ASN
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	1.799.550,00	1.799.550,00	1.799.550,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	194.798.899,00	194.798.899,00	442.809.818,00	Tambahan Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	3 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	20 Unit	50.128.620,00	50.128.620,00	138.188.201,00	Tambahan Pengadaan AC, Pengadaan mesin cuci, Pengadaan Laptop Non Tekhnis (4 Unit), pengadaan Printer Kantor
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	310.900.000,00	306.800.000,00	312.800.000,00	Tambahan Tagihan Listrik Tipe B pada

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah		Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah					Kantor Kec Haruai
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	31 unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	32 Unit	102.970.000,00	102.970.000,00	162.350.000,00	Penambahan Pemeliharaan Mobil Dinas Sekcam (1 Unit menjadi 2 unit). Serta Penambahan Pengadaan Gorden Untuk gedung kantor kecamatan Haruai
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80%	63.934.000,00	58.184.000,00	110.248.500,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	63.934.000,00	58.184.000,00	110.248.500,00	Penambahan Makan minum Rapat MTQ , sewa rumah MTQ , Fotocopy spanduk dan transport Lokal MTQ, Penambahan Transport Lokal untuk monitoring ke Desa pada Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	28.400.000,00	78.495.269,00	91.680.269,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	13 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	13 desa	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	9021 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	9021 Keluarga	20.600.000,00	70.695.269,00	83.880.269,00	Penambahan Perjalanan dinas dalam Daerah untuk Kegiatan PKK, serta Perubahan standar satuan Harga pada Biaya Penginapan Perjalanan dinas Luar Daerah.
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	40.440.000,00	90.065.000,00	90.065.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	40.440.000,00	90.065.000,00	90.065.000,00	-

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	80%	48.380.000,00	98.744.731,00	137.444.731,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 dokumen	48.380.000,00	98.744.731,00	137.444.731,00	Penambahan Dekorasi Panggung, Penambahan Hadiah bersifat Perlombaan untuk Hari Jadi Kab Tabalong dan Makan Minum aktivitas Lapangan Hari Jadi Tabalong
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	10.930.000,00	60.845.000,00	55.445.000,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 dokumen	10.930.000,00	60.845.000,00	55.445.000,00	Perubahan standar satuan harga pada perjalanan dinas dan Rasionalisasi belanja makan minum Rapat, dan Rasionalisasi Uang Transport Lokal (Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten).
JUMLAH								2.931.599.151,00	3.323.951.281,00	4.029.677.281,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	2.697.330.767,00	2.817.453.000,00	3.322.860.430,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	2.014.015.767,00	2.152.938.000,00	2.294.504.000,00	Penambahan Pagu Gaji dan Tunjangan ASN
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	276.931.504,00	258.908.885,00	625.609.896,00	Tambahan Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Tambahan Pengadaan Belanja Modal untuk keperluan penunjang kegiatan kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.000.000,00	257.180.000,00	245.587.500,00	Tambahan Belanja Tagihan Air serta Pengurangan pada Belanja Internet Berlangganan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penganggaran pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	11 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	20 Unit	138.383.496,00	138.426.115,00	147.159.034,00	Pergeseran pada Pemeliharaan Peralatan Kantor pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	95.000.000,00	95.000.000,00	131.570.000,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	101.570.000,00	Penambahan Uang Harian Kafilah dan Official MTQ
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelayanan Kepada Masyarakat	3 Laporan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelayanan Kepada Masyarakat	3 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayah	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayah	80%	28.200.000,00	78.200.000,00	93.768.000,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan diberdayakan	6 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan diberdayakan	6 Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	16.540.000,00	Penambahan Honor PPTK

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	15.700.000,00	65.700.000,00	77.228.000,00	Pergeseran pada Perjalanan Dinas TP PKK
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	41.700.000,00	91.700.000,00	115.690.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	41.700.000,00	91.700.000,00	115.690.000,00	Penambahan keperluan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat Waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat Waktu	80%	81.000.000,00	131.000.000,00	224.632.332,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Laporan	81.000.000,00	131.000.000,00	224.632.332,00	Penambahan keperluan Keikutsertaan memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tabalong

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	14.700.000,00	60.700.000,00	27.098.238,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	14.700.000,00	60.700.000,00	27.098.238,00	Pengurangan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparat Desa
JUMLAH								2.957.930.767,00	3.274.053.000,00	3.915.619.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	2.705.892.325,00	2.973.100.440,00	3.605.447.616,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	9.629.000,00	9.629.000,00	9.629.000,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	2.153.864.274,00	2.415.606.000,00	2.560.687.000,00	Penambahan Pagu Gaji

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	139.151.027,00	135.737.391,00	340.689.391,00	Penambahan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten pada Rapat koordinasi SKPD
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	15 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	16 Unit	77.100.854,00	77.100.854,00	98.828.925,00	Penambahan Pengadaan Mebel, Ac, LCD dan Scanner
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	242.204.170,00	247.754.670,00	201.180.775,00	Pengurangan Tenaga Non ASN 1 Orang
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	19 Unit	82.130.000,00	85.459.525,00	392.619.525,00	Penambahan Pemeliharaan Gedung Kantor, Mobil dinas dan Pengurangan untuk Pemeliharaan Sepeda Dinas
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat	80%	97.375.182,00	89.295.182,00	182.506.006,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	97.375.182,00	89.295.182,00	182.506.006,00	Penambahan untuk biaya keperluan MTQ
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	47.344.000,00	97.344.000,00	98.870.000,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 Desa	27.344.000,00	27.344.000,00	28.870.000,00	
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	9 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	9 Desa	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100	68.394.000,00	115.274.000,00	54.124.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	68.394.000,00	115.274.000,00	54.124.000,00	Pengurangan untuk Perjalanan Dinas ke Desa Terpencil/ Pergeseran ke kegiatan lain

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	69.161.493,00	115.321.493,00	121.321.493,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	69.161.493,00	115.321.493,00	121.321.493,00	
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	42.144.000,00	90.064.000,00	63.211.000,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	42.144.000,00	90.064.000,00	63.211.000,00	Pergeseran ke Kegiatan lain
JUMLAH								3.030.311.000,00	3.480.399.115,00	4.125.480.115,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
1	X.XX. NON URUSAN	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	5.628.492.701,00	6.433.331.471,00	7.527.700.471,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	11 buah	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	11 buah	32.000.000,00	32.000.000,00	122.169.000,00	
		8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	12 bulan	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	12 bulan	3.647.703.322,00	4.523.911.000,00	4.862.191.000,00	
		8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	12 bulan	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	12 bulan	42.625.000,00	42.625.000,00	62.625.000,00	
		8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	378.824.166,00	472.332.350,00	898.727.850,00	
		8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	20 unit	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	28 unit	200.000.000,00	81.742.908,00	121.742.908,00	
		8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	12 bulan	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	12 bulan	756.679.362,00	756.139.362,00	860.139.362,00	
		8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	18 unit	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	52 unit	570.660.851,00	524.580.851,00	600.105.351,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	80%	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	80%	1.574.294.118,00	1.574.294.118,00	2.070.086.118,00	
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	1.574.294.118,00	1.574.294.118,00	2.070.086.118,00	
		8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	80%	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	80%	59.160.358.368,00	29.361.986.568,00	29.692.854.568,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	59.160.358.368,00	29.361.986.568,00	29.692.854.568,00	
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	80%	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	80%	287.331.000,00	278.631.000,00	782.510.000,00	
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	287.331.000,00	278.631.000,00	782.510.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2024)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2024)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2024 (Induk)	APBD INDUK 2024 dan PERGESERAN	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	80%	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	80%	634.439.420,00	634.439.420,00	1.046.429.420,00	
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	634.439.420,00	634.439.420,00	1.046.429.420,00	
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	80%	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	80%	1.160.000.000,00	7.930.664.000,00	8.905.664.000,00	
		8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	1.160.000.000,00	7.930.664.000,00	8.905.664.000,00	
JUMLAH								68.444.915.607,00	46.213.346.577,00	50.025.244.577,00	

Sumber: Renja PD / SIPD.RI Tahun 2024

BAB VI

PENUTUP

*PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024*

BAB VI **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya hal ini digunakan sebagai dasar menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRAPBD) Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara baik, konsisten dan berkelanjutan dengan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024



Tepat Data
Tepat Rencana
Tepat Sasaran

DATA YANG AKURAT, MELAHIRKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN SASARAN YANG DICAPAI AKAN BERDAMPAK LUAS BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT